



## Peran Spiritualitas Di Tempat Kerja, Budaya Pela Gandong Dan Kepribadian Dalam Meningkatkan Kinerja

Olivia Laura Sahertian

Politeknik Negeri Ambon  
oliviasahertian@yahoo.com

[doi.org/10.18382/jraam.v3i2.59](https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.59)

### Informasi Artikel:

Tanggal masuk	31-8-2018
Tanggal revisi	5-9-2018
Tanggal diterima	30-9-2018

### Keywords:

*Workplace spirituality; pela gandong culture; personality; employee performance.*

### Abstract

*The purpose of this research is to analyze the effect of workplace spirituality, pela gandong culture and personality on employee performance. Sample in this research was nurses in Regional General Hospital dr. Haulussy Ambon, 131 people. Data were analyzed using the multiple regression with SPSS software. The results show that workplace spirituality, pela gandong culture and personality simultaneously affect performance. Workplace spirituality affects performance, pela gandong culture affects performance and personality affects performance. Workplace spirituality has a dominant affect on performance.*

### Kata Kunci :

spiritualitas; budaya *pela gandong*; kepribadian; kinerja pegawai.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian terhadap kinerja pegawai. Sampel penelitian adalah perawat rumah sakit dr. Haulussy Ambon yang berjumlah 131 orang. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian secara simultan berpengaruh terhadap kinerja. Spiritualitas di tempat kerja berpengaruh terhadap kinerja, budaya *pela gandong* berpengaruh terhadap kinerja dan kepribadian berpengaruh terhadap kinerja. Spiritualitas di tempat kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja.

## 1. Pendahuluan

Beberapa dekade ini, banyak peneliti yang mengkaji faktor yang mempengaruhi kinerja dalam organisasi kesehatan (Al-Ahmadi, 2009). Rumah sakit merupakan salah satu lembaga penyelenggara kesehatan dan berperan sebagai ujung tombak dalam keberhasilan

pelayanan kesehatan. Tenaga medis sebagai pelayan dalam rumah sakit menjadi sumber daya yang memegang peranan penting dalam melayani masyarakat dan menentukan kemajuan rumah sakit. Perawat adalah salah satu tenaga me dis yang secara kuantitas sangat mendominasi rumah sakit (Al-Ahmadi, 2009)

dengan jumlah sekitar 40-60% dari jumlah tenaga medis dan melakukan tugas selama 24 jam secara berkesinambungan (Gillies, 1994). Pengukuran kinerja menjadi yang mutlak dan penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan rumah sakit sangat ditentukan oleh tenaga medis yang melayani masyarakat, salah satunya perawat. Pelayanan yang baik kepada pasien sangat ditentukan oleh kinerja perawat. Keberhasilan rumah sakit juga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh rumah sakit.

Perawat adalah individu yang bekerja dalam rumah sakit. Berbicara mengenai individu tidak dapat dipisahkan dari sikap, perilaku dan kepribadian. Berdasarkan teori kognitif sosial, seorang individu akan berperilaku yang sesuai dan sejalan dengan kepercayaan dan nilai yang diyakini. Individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan dan tindakan, yang dikendalikan oleh kondisi biologis dan lingkungan

Salah satu nilai yang berkembang saat ini dalam sebuah organisasi adalah spiritualitas di tempat kerja (Pandey, 2014; Petchsawanga dan Duchon, 2012). spiritualitas di tempat kerja menjadi perhatian di dunia (Giacolone dan Jurkiewicz, 2010; Albuequerque *et al.* 2014). Spiritualitas di tempat kerja sangat menunjang kinerja individu (Krishnakumar dan Neck, 2002; Rego *et al.*, 2008; Duchon dan Plowman, 2005; Milliman *et al.*, 2003, Garcia-Zamor, 2003) dan berhubungan dengan perilaku individu (Mahakud dan Gantai, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Duchon dan Plowman (2005) pada rumah sakit, mengemukakan bahwa spiritualitas yang tinggi akan meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Albuquerque *et al.* (2014) pada tenaga medis rumah sakit dan klinik, Muliarti *et al.* (2015) yang melakukan penelitian pada Perum Bulog Kalimantan Selatan dan Prihono *et al.* (2016) yang meneliti pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bali Namun hasil yang bertolak belakang dikemukakan oleh Pratama (2014) dalam

penelitiannya. Pratama (2014) menemukan bahwa spiritualitas tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Selain spiritualitas di tempat kerja, budaya juga merupakan nilai yang dapat memengaruhi sikap individu. Budaya merupakan kebiasaan sosial yang berhubungan dengan perilaku individu. Budaya menjadi kajian menarik untuk diteliti dalam penelitian ini. Tsui *et al.* (2007) dalam penelitiannya merekomendasikan untuk melakukan penelitian budaya dengan karakteristik dari negara di Asia, yaitu negara-negara berkembang, yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan manajemen global. Indonesia adalah negara yang beragam dengan budayanya. Salah satu nilai budaya yang sudah ada sejak lama dan telah berakar kuat di Maluku adalah budaya *pela gandong*, khususnya di daerah Kota Ambon, Pulau Lease dan Pulau Seram. Nilai yang terkandung dalam budaya *pela gandong* adalah cinta kasih, kejujuran, kepercayaan dan keadilan. Budaya *pela gandong* merupakan variabel yang menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini. Penelitian Steel *et al.* (2010) mengemukakan bahwa budaya dapat memengaruhi perilaku individu dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngo dan Li (2015) mengenai pengaruh budaya Cina yang sangat kuat terhadap kinerja serta Rante (2010) yang meneliti pengaruh budaya Papua terhadap kinerja. Namun, Kambu (2012) menemukan bahwa budaya Papua berpengaruh negatif terhadap kinerja, dan Anisah (2011) menemukan bahwa kinerja tidak budaya tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Berbicara mengenai individu tidak terlepas dari kepribadian. Individu dalam organisasi berbeda satu dengan yang lain dan merupakan kekayaan dalam sebuah organisasi (Ivancevich *et al.*, 2011). Kepribadian individu sangat penting dalam menentukan kinerja dan merupakan anteseden yang sangat penting dari kinerja (He *et al.*, 2015). Kepribadian juga memengaruhi perilaku individu dan me-

mengaruhi kinerja (Yang dan Hwang, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Bhatti *et al.* (2013), Yang dan Hwang (2014), He *et al.* (2015) dan Rashid *et al.* (2016) membuktikan bahwa kepribadian memengaruhi kinerja.

Berdasarkan uraian di atas telah dikemukakan beberapa alasan untuk dilakukannya penelitian ini, yaitu rekomendasi penelitian serta adanya *research gap*. Berkaitan dengan kinerja, maka dapat dicapai oleh pegawai yang memiliki spiritualitas di tempat kerja, adanya budaya lokal dan kepribadian individu.

Fenomena yang terjadi bahwa banyak masalah yang dihadapi rumah sakit dan dalam prakteknya banyak fakta yang membuktikan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit. Penyebab masalah kesehatan di Indonesia adalah penyakit dan buruknya pelayanan rumah sakit. Selain itu, masalah kesehatan di Indonesia dapat disebabkan masalah reliabilitas medis, masalah bukti fisik, masalah karena kesalahan medis, masalah mahal biaya layanan dan masalah penanganan keluhan. Masalah yang terkait dengan keperawatan di Indonesia adalah distribusi dan pengabdian perawat (Mboi, 2013 diakses melalui [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)).

RSUD dr. Haulussy adalah salah satu rumah sakit pemerintah terbesar di kota Ambon dengan tipe B yang juga mengalami masalah serupa, yaitu mengenai kinerja perawat. Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai buruknya pelayanan medis yang diberikan ([www.siwalimanews.com](http://www.siwalimanews.com)) dan hal ini juga diakui oleh pimpinan rumah sakit ([www.wartamaluku.com](http://www.wartamaluku.com), [www.kilasmaluku.com](http://www.kilasmaluku.com)). Padahal perawat harus menjalankan tugasnya dengan baik guna menunjang kerjanya. Hal ini tidak sesuai dengan nilai baik yaitu spiritualitas di tempat kerja dan budaya *pela gandong* serta kepribadian, yang jika dipraktekkan akan meningkatkan kinerja.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian dapat meningkatkan kinerja per-

awat pada rumah sakit RSUD dr. Haulussy Ambon? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian terhadap kinerja perawat pada RSUD dr. Haulussy Ambon secara simultan, parsial maupun pengaruh dominan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan nilai spiritualitas, budaya, kepribadian dan kinerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada RSUD dr. Haulussy Ambon mengenai peran nilai spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian dalam meningkatkan kinerja perawat.

## 2. Kajian Teori

Terminologi spiritualitas di tempat kerja atau *workplace spirituality* yang biasa digunakan terdiri dari spiritualitas organisasi atau *organizational spirituality*, spiritualitas dalam bekerja atau *spirituality at work* dan spiritualitas dalam bisnis atau *spirituality in bussiness*. Penggunaan terminologi-terminologi ini memiliki kesamaan makna, yaitu spiritualitas yang dipraktekkan dalam pekerjaan sehari-hari. Menurut Pawar (2009), istilah spiritualitas di tempat kerja yaitu pengalaman spiritual karyawan ditempat kerjanya. Spiritualitas bukan berbicara mengenai agama (Krishnakumar dan Neck, 2002; Zohar dan Marshall, 2004), namun merupakan sesuatu dalam diri seorang individu, yang kemudian dipraktekkan dalam hubungan dengan sesama dalam aktivitas sehari-hari (Ashmos dan Duchon, 2000; Neck dan Milliman, 1994; Krishnakumar dan Neck, 2002; Zohar dan Marshall, 2004). Penerapan spiritualitas di tempat kerja dalam sebuah organisasi ada pada tiga tingkatan, yaitu individu, kelompok dan organisasi (Ashmos dan Duchon 2000; Milliman *et al.* 2003). Dimensi spiritualitas di tempat kerja menurut Ashmos dan Duchon (2000), terdiri dari *inner life*, yaitu kebatinan individu yang terdiri dari pengharapan, nilai individu serta konsep

diri yang mencerminkan identitas; *meaningful work* yaitu arti dari sebuah pekerjaan yang sangat berarti bagi seorang karyawan; *condition for community*, yaitu perasaan menjadi bagian dari lingkungan pekerjaan; *blocks to spirituality*, yaitu keadaan yang membutuhkan pengembangan spiritualitas; *personel responsibility*, yaitu tanggung jawab individu untuk mengembangkan spiritualitas; *positive connections with other individuals*, yaitu perilaku positif untuk berkomunikasi dengan sesama; *contemplation*, yaitu perilaku ekstra terkait ekspresi individu untuk menunjukkan *inner life*; *work unit community*, yaitu rasa memiliki (*sense of belonging*); *positive work unit value*, yaitu pentingnya nilai dari tempat bekerja beserta tujuan dan misinya; *organization value*, yang terkait dengan persepsi dan sikap individu bagi organisasi; *individual and the organization*, yaitu evaluasi individu pada organisasi. Dari sebelas dimensi ini, ada tiga dimensi utama dalam spiritualitas di tempat kerja yaitu *onner life*, *meaningful work* dan *condition for community*, yang akan digunakan sebagai indikator pengukuran spiritualitas di tempat kerja dalam penelitian ini.

Budaya dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang apa yang disukai dan tidak disukai dalam satu komunitas tertentu. Budaya juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku dan pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang diwarikan, dimiliki dan dipraktikkan dalam masyarakat tertentu. Budaya masyarakat memengaruhi nilai, etika, sikap dan harapan seorang individu (Kreitner dan Kinicki, 2014). Budaya terkait dengan tingkah laku seorang pegawai. Hodgetts *et al.* (2005) mengemukakan bahwa budaya dalam masyarakat berpengaruh langsung pada pendekatan manajemen dalam suatu masyarakat. Indonesia kaya akan budaya. Salah satu budaya yang ada dan berakar dalam masyarakat Maluku adalah *pela gandong*, khususnya Ambon, Lease dan Pulau Seram (Lokollo *et al.*, 1997; Uneputty, 1996). Budaya *pela gandong* yang merupakan pranata dan nilai sosial sebagai perekat hubungan sosial antara satu negeri (desa atau kampung)

dengan negeri lainnya (Sahusilawane, 2004). Uneputty (1996) mengemukakan fungsi budaya *pela gandong* adalah mengatur interaksi sosial masyarakat negeri (desa atau kampung) dalam berbagai bidang (Uneputty, 1996). Secara sederhana, *pela* dapat diartikan sebagai ikatan persaudaraan antara dua negeri (desa atau kampung) atau lebih. *Gandong* dapat diartikan sebagai hubungan persaudaraan antara dua negeri (desa atau kampung) atau lebih yang didasarkan atau dilatarbelakangi oleh adanya hubungan genealogia, yaitu para leluhur dari negeri (desa atau kampung) tersebut berasal dari keturunan yang sama (Uneputty, 1996). Sistem kekerabatan karena adanya *pela gandong* mampu membentuk jati diri manusia Maluku, yang disebut *common sence of belonging* atau rasa kebersamaan, *common sence of unity* atau rasa persatuan dan kesatuan dan *common sense of responsibility* atau rasa tanggung jawab (Uneputty, 1996). Amaliah (2014) dalam penelitiannya mengemukakan nilai budaya *pela gandong* adalah cinta kasih, kejujuran, kepercayaan dan keadilan. Keempat nilai ini yang akan digunakan sebagai indikator pengukuran budaya *pela gandong* dalam penelitian ini.

Individu tidak dapat dipisahkan dari kepribadian. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai jumlah dari cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain disekitarnya (Robbins dan Judge, 2016). Kepribadian meliputi nilai, motif, sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi. Faktor penentu kepribadian adalah faktor keturunan dan faktor lingkungan. Teori dasar kepribadian adalah teori kepribadian sifat (*traits*), yang mengarahkan individu untuk berperilaku secara konsisten; teori kepribadian psikodinamis, yang isinya tentang *id* (melakukan apa yang dianggap baik), *ego* (penengah konflik dan melakukan tindakan yang memuaskan *id*) dan *superego* (berhubungan dengan kesadaran); teori kepribadian humanistik, yaitu kepribadian yang berpusat pada manusia itu sendiri. Model lima faktor atau *The Big Five*

menjadi dasar dari kepribadian dalam diri manusia (Robbins dan Judge, 2016). Faktor-faktor tersebut adalah ekstraversi (*extraversion*), keramahan (*agreeableness*), kehati-hatian (*conscientiousness*), stabilitas emosional (*emotional stability*) dan keterbukaan pada pengalaman (*openness to experience*). *The Big Five* ini akan dijadikan sebagai indikator pengukuran kepribadian dalam penelitian ini. Kinerja atau *performance* dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan individu dalam menyelesaikan pekerjaannya (Vroom dalam Dessler, 2015). Kinerja adalah wujud hasil kerja yang dilakukan seseorang (Robbins, 2008). Lebih lanjut, Mangkunegara (2007) mengemukakan bahwa kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja individu merupakan dasar kinerja organisasi, yang dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam bekerja dengan menggunakan keahlian tertentu. Ada tiga perangkat variabel yang memengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja yaitu variabel individual, yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan; variabel organisasional, yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan; serta variabel psikologis, yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. Teori yang menjadi fondasi kinerja adalah teori penetapan tujuan (*Goal-Setting Theory*). Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1968, yang menunjukkan terkaitnya tujuan dan kinerja individu. Teori penetapan tujuan menunjuk pada komitmen individu pada tujuan yang akan dicapainya.

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai spiritualitas di tempat kerja, budaya, kepribadian dan kinerja. Albuquerque *et al.* (2014) dalam penelitiannya pada puskesmas (Health Center/HC) dan unit kesehatan keluarga (Family Health Unit/FHU) di Portugal yang menguji pengaruh spiritualitas di tempat kerja terhadap kinerja membuktikan bahwa spiritualitas yang tinggi menghasil-

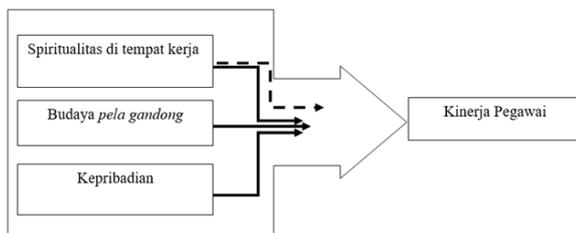
kan kinerja yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Petchsawanga dan Duchon (2012) yang menguji pengaruh spiritualitas di tempat kerja terhadap kinerja dalam konteks ketimuran dengan pada perusahaan makanan besar di Thailand, juga penelitian Osman-Gani *et al.* (2013) pada 28 organisasi di Malaysia. Penelitian yang menguji pengaruh spiritualitas di tempat kerja terhadap kinerja di Indonesia dilakukan oleh Muliarti *et al.* (2015) dan Prihono *et al.* (2016), yang juga membuktikan bahwa spiritualitas berpengaruh positif terhadap kinerja.

Penelitian yang mengkaji pengaruh budaya terhadap kinerja dilakukan oleh Fan (2000) serta Child dan Werner (2003) mengemukakan bahwa budaya Cina sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Cina. Liu *et al.* (2013) yang meneliti sektor publik di Cina, menemukan bahwa lima nilai budaya yaitu rasa memiliki, kebahagiaan, kerukunan, efisiensi dan prestasi merupakan nilai yang sangat penting. Lebih lanjut, Lin dan Zhao (2016) yang meneliti pada ekspatriat pada perusahaan multinasional menemukan bahwa budaya Cina *Renqing*, *Mianzi*, *power distance*, *Guanxi*, *Yinyang*, *Hexie* dan *collectivism* berpengaruh terhadap kinerja, serta Ngo dan Li (2015) menemukan bahwa budaya tradisional Cina berpengaruh terhadap suksesnya karir individu di Cina. Penelitian budaya di Jepang dilakukan oleh Teasdale (1999) menemukan bahwa budaya Jepang menentukan kesuksesan masyarakat Jepang. Penelitian mengenai pengaruh budaya terhadap kinerja di Indonesia, dilakukan oleh Rante (2010) yang meneliti di Papua dan hasilnya menunjukkan budaya berpengaruh terhadap kinerja.

Penelitian yang menguji hubungan kepribadian dengan kinerja dilakukan oleh Yang dan Hwang (2014) serta He *et al.* (2015) pada karyawan di Cina dan hasilnya menunjukkan bahwa kepribadian *Big Five* memengaruhi kinerja. Bhatti *et al.* (2013) yang meneliti pada 201 ekspatriat yang bekerja di Malaysia dan Rashid *et al.* (2015)

yang meneliti pada pegawai bank di Malaysia juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu kepribadian memengaruhi kinerja. Abdulah *et al.* (2013) yang meneliti pada karyawan bank di Pakistan, serta Ahmad *et al.* (2014) juga membuktikan pengaruh yang kuat budaya terhadap kinerja. Sementara di Amerika Serikat, Cartaya (2012) melakukan penelitian pada pekerja serta Collins dan Cooke (2011) yang meneliti pada perusahaan farmasi juga menemukan pengaruh kepribadian terhadap kinerja. Krawjesky *et al.* (2007) di Kanada membuktikan bahwa kepribadian sangat memengaruhi kinerja.

Adapun tujuan pengembangan model penelitian adalah untuk menguji pengaruh spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian terhadap kinerja pegawai secara simultan, parsial maupun dominan. Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka di atas, kerangka konseptual penelitian tersaji pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

Keterangan:

➡ : Pengaruh Simultan

➡ : Pengaruh Parsial

- - ➡ : Pengaruh Dominan

Berdasar kerangka konseptual, maka dugaan penelitian ini meliputi (1) Spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian secara simultan memengaruhi kinerja pegawai; (2) Spiritualitas di tempat kerja memengaruhi kinerja pegawai; (3) Budaya *pela gandong* memengaruhi kinerja pegawai; (4)

Kepribadian memengaruhi kinerja pegawai; (5) Spiritualitas di tempat kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang menjelaskan hubungan variabel dan pengaruhnya melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu mengambil sampel penelitian dan menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan data. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antara variabel dan melakukan pengujian hipotesis, serta data disajikan dalam bentuk angka-angka yang dihitung melalui uji statistik.

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Haulussy Ambon. Populasi penelitian adalah perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Haulussy Ambon, yang berjumlah 357 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan metode *judgement sampling*, yaitu sampel yang akan dijadikan responden harus memenuhi kriteria dan pertimbangan tertentu, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan (Ferdinand, 2014). Beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu perawat yang melayani pasien rawat inap, merupakan perawat tetap, bukan perawat honorer atau kontrak (Kambu, 2012; Nongkeng, 2012; Syauta, 2012) serta perawat bekerja minimal 3 tahun (Fuadiputra dan Irawanto, 2013; Nongkeng, 2012; Syauta, 2012). Penyebaran kuisioner hanya dilakukan pada perawat di ruangan rawat inap. Jumlah sampel sebanyak 150 perawat yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas. Kuisioner yang telah diedarkan hanya kembali sebanyak 136 dan yang tidak lengkap dan tidak layak untuk diolah sebanyak 5, sehingga data yang diolah berjumlah 131 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner yang dibagikan serta data sekunder,

berupa laporan kinerja perawat berupa SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Pengambilan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner, wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan responden, observasi yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian serta studi dokumentasi yaitu pengumpulan informasi yang relevan dengan penelitian dari sumber data tertulis dan data sekunder.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian serta variabel dependen yaitu kinerja pegawai. Pengukuran variabel spiritualitas di tempat kerja menggunakan tiga indikator, yaitu *inner life* (kehidupan batin), *meaningful work* (pekerjaan yang berarti), *condition for community* (rasa kebersamaan) yang diadopsi dari Ashmos dan Duchon (2000). Pengukuran variabel budaya *pela gandong* menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam *pela gandong*, yaitu cinta kasih, kejujuran, kepercayaan dan keadilan, yang diadopsi, diadaptasi dan dimodifikasi dari Amaliah (2014). Pengukuran variabel kepribadian menggunakan *The Big Five* yaitu ekstrasversi (*extraversion*), keramahan (*agreeableness*), kehati-hatian (*conscientiousness*), stabilitas emosional (*emotional stability*) dan keterbukaan pada pengalaman (*openness to experience*) yang diadopsi dari Brown (2002) dalam penelitian He *et al.* (2015). Pengukuran variabel kinerja pegawai diukur dengan hasil kinerja masing-masing perawat yang mengacu pada PP No. 46 tahun 2011 yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, yaitu seperangkat pertanyaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh responden. Kuisioner yang dipahami dengan baik oleh responden akan menghasilkan data yang akurat. Untuk mengukur indikator maka item pertanyaan untuk variabel spiritualitas di tempat kerja, budaya lokal *pela gandong* dan kepribadian, dibuat skoring dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert*, untuk mengukur persepsi seseorang mengenai gejala

sosial tertentu. Adapun alternatif jawaban terdiri dari 5 (lima) pilihan yang mempunyai tingkatan sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, yang nilainya 1 sampai 5). Setiap item pertanyaan akan diukur dengan skala *likert* dengan penjelasan 5=sangat setuju, 4=setuju, 3=kurang setuju, 2=tidak setuju, 1=sangat tidak setuju.

Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan agar instrumen dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan. Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen tersebut dapat mengukur dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Singarimbun dan Effendi, 1995). Instrumen dianggap valid jika nilai  $r > 0,5$  (Hair, 2006). Reliabilitas menunjukkan konsistensi data yang dikumpulkan, instrumen tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (Arikunto, 2002). Instrumen dikatakan baik dan *reliabel* jika nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 (Malhotra, 1996).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi digunakan untuk melihat pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis tersebut akan diperoleh persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Untuk mengolah data, digunakan *software-program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 16.0 for Windows*. Dalam analisis regresi berganda, akan dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik, diantaranya 1) Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji normalnya distribusi variabel dependen dan independen. Normal atau tidaknya data dapat dilihat pada garis diagonal, dimana titik-titik yang merupakan data menyebar pada sekitar garis diagonal atau dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (Liliefors), dengan nilai  $\alpha$  lebih dari 0,05; 2) Uji multikolinearitas, yang tujuannya

ya untuk menguji model regresi apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik harus tidak adanya korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* yang harus lebih besar dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10; 3) Uji heterokedastisitas, yang dilakukan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak untuk semua pengamatan. Untuk mendeteksi adanya atau tidaknya heterokedastisitas dengan uji Glesjer, yaitu dengan meregresikan secara parsial semua variabel bebas dengan absolut residual dan nilai koefisien signifikansi lebih dari 0,05 (Sudarmanto, 2004).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum data diolah menggunakan regresi berganda, data terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas, semua item pertanyaan adalah valid, yang dapat dilihat pada tabel 1. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi mempunyai nilai  $r_{hitung} \geq 0,5$  dengan signifikansi 0,000. Variabel spiritualitas di tempat kerja yang terdiri dari tiga indikator, yaitu *inner life*, dengan lima item semuanya valid, indikator *meaningful work* dengan enam item yang semuanya valid, serta indikator *conditions for community* dengan tujuh item semuanya valid dengan koefisien korelasi lebih dari 0,5. Variabel budaya *pela gandong* yang terdiri dari empat indikator, yaitu cinta kasih dengan empat item yang semuanya valid, indikator kejujuran dengan dua item yang semuanya valid, indikator kepercayaan dengan dua item yang semuanya valid serta indikator keadilan dengan dua item yang semuanya juga valid dengan koefisien korelasi lebih dari 0,5. Variabel kepribadian yang terdiri dari indikator *extraversion*, dengan tiga item yang semuanya valid, indikator *agreableness* dengan tiga item yang semuanya valid, indikator *conscientiousness*, dengan tiga item yang valid semuanya, *emotional sta-*

*bility* dengan lima item yang valid semuanya, serta indikator *openess to experience* dengan empat item yang juga valid semuanya dengan koefisien korelasi lebih dari 0,5. Dengan demikian, item-item pertanyaan adalah valid dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel. Data yang ada valid, artinya bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian adalah tepat untuk digunakan sebagai alat ukur.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2, yang menunjukkan bahwa variabel spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian adalah reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien *alpha* yang lebih dari 0,6. Nilai koefisien *alpha* untuk variabel spiritualitas di tempat kerja sebesar 0,887, variabel budaya *pela gandong* sebesar 0,913 dan variabel kepribadian sebesar 0,909. Data ini reliabel, yang berarti bahwa adanya konsistensi dari serangkaian pengukuran dari alat ukur, sehingga dapat dikatakan bahwa pengukuran dapat diandalkan dan dapat mengukur secara konsisten.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

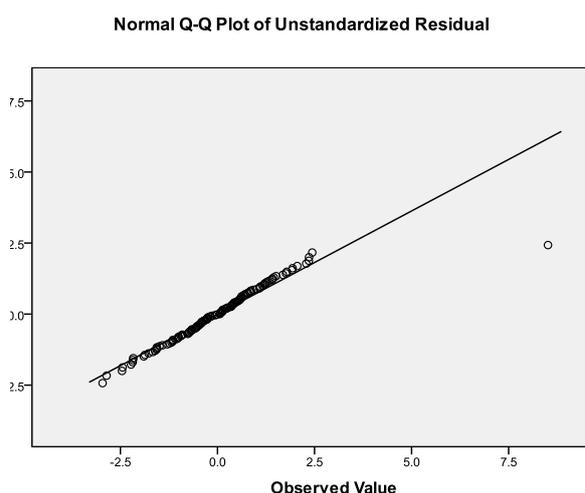
Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Keterangan
Spiritualitas di tempat kerja	X1.1.1	0,510	0,000	Valid
	X1.1.2	0,565	0,000	Valid
	X1.1.3	0,541	0,000	Valid
	X1.1.4	0,512	0,000	Valid
	X1.1.5	0,739	0,000	Valid
	X1.2.1	0,560	0,000	Valid
	X1.2.2	0,571	0,000	Valid
	X1.2.3	0,673	0,000	Valid
	X1.2.4	0,682	0,000	Valid
	X1.2.5	0,724	0,000	Valid
	X1.2.6	0,507	0,000	Valid
	Budaya <i>pela gandong</i>	X1.3.1	0,714	0,000
X1.3.2		0,506	0,000	Valid
X1.3.3		0,609	0,000	Valid
X1.3.4		0,618	0,000	Valid
X1.3.5		0,528	0,000	Valid
X1.3.6		0,510	0,000	Valid
X1.3.7		0,682	0,000	Valid
Budaya <i>pela gandong</i>	X2.1.1	0,708	0,000	Valid
	X2.1.2	0,734	0,000	Valid
	X2.1.3	0,793	0,000	Valid
	X2.1.4	0,747	0,000	Valid
	X2.2.1	0,718	0,000	Valid
	X2.2.2	0,671	0,000	Valid
	X2.3.1	0,805	0,000	Valid
	X2.3.2	0,767	0,000	Valid
Kepribadian	X2.4.1	0,767	0,000	Valid
	X2.4.2	0,782	0,000	Valid
	X3.1.1	0,591	0,000	Valid
	X3.1.2	0,696	0,000	Valid
	X3.1.3	0,658	0,000	Valid
	X3.2.1	0,665	0,000	Valid
	X3.2.2	0,623	0,000	Valid
	X3.2.3	0,546	0,000	Valid
	X3.3.1	0,585	0,000	Valid
X3.3.2	0,650	0,000	Valid	
X3.3.3	0,688	0,000	Valid	

X3.4.1	0,644	0,000	Valid
X3.4.2	0,683	0,000	Valid
X3.4.3	0,660	0,000	Valid
X3.4.4	0,673	0,000	Valid
X3.4.5	0,710	0,000	Valid
X3.5.1	0,597	0,000	Valid
X3.5.2	0,518	0,000	Valid
X3.5.3	0,592	0,000	Valid
X3.5.4	0,564	0,000	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Spiritualitas di Tempat Kerja	0,887	Reliabel
Budaya <i>Pela Gandong</i>	0,913	Reliabel
Kepribadian	0,909	Reliabel

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, yang dapat dilihat pada grafik dimana titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan nilai signifikansi lebih dari 0,05 dari hasil uji Kolmogorov Smirnov. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan grafik. Gambar 2 menunjukkan titik-titik menyebar pada garis diagonal. Hal ini membuktikan bahwa data terdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas

Selain melihat titik-titik menyebar pada garis diagonal, normalitas data dapat dilihat pada nilai signifikansi pada tabel uji Kolm-

ogorov Smirnov di bawah ini. Tabel 3 berikut ini menunjukkan hasil uji normalitas. Hal ini terlihat pada nilai signifikansinya 0,200, yaitu lebih dari 0,05. Uji Kolmogorov Smirnov juga merupakan cara untuk melakukan uji normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.067	131	.200*

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

Uji multikolinearitas yang dilakukan dalam uji asumsi klasik adalah untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi ada atau tidaknya interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak adanya multikolinearitas. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada *collinearity statistics*, dimana nilai *tolerance* untuk ketiga variabel independen lebih dari 0,1, yaitu variabel spiritualitas di tempat kerja (*X1*) sebesar 0,509, variabel budaya *pela gandong* (*X2*) sebesar 0,651 dan variabel kepribadian (*X3*) sebesar 0,521. Selain dapat dilihat dari nilai *tolerance*, juga dapat dilihat pada nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), yang harus kurang dari 10. Untuk variabel spiritualitas di tempat kerja (*X1*) sebesar 1,963, variabel budaya *pela gandong* (*X2*) sebesar 1,536 dan variabel kepribadian (*X3*) sebesar 1,919. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak mengandung multikolinearitas (dapat dilihat pada Tabel 4).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance VIF	
1	(Constant)	63.735	1.864	34.185	.000		
	<i>X1</i>	.107	.029	.315	3.737	.000	.509 1.963
	<i>X2</i>	.145	.042	.257	3.452	.001	.651 1.536
	<i>X3</i>	.099	.028	.292	3.503	.001	.521 1.919

a. Dependent Variable: Y

Uji heterokedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada

model regresi. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas. Ini dapat dilihat pada nilai signifikansi pada pengujian lebih dari 0,05 pada semua variabel independen (yang dapat dilihat pada tabel 5. Nilai signifikansi variabel spiritualitas di tempat kerja ( $X1$ ) sebesar 0,398, variabel budaya *pela gandong* ( $X2$ ) sebesar 0,101 dan variabel kepribadian ( $X3$ ) sebesar 0,194.

Berdasarkan hasil pengujian semua asumsi klasik terpenuhi, yaitu data terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heterokedastisitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.074	1.268		-.058	.954
X1	.017	.019	.103	.848	.398
X2	-.047	.028	-.178	-1.650	.101
X3	.025	.019	.157	1.307	.194

a. Dependent Variable: absres

Analisis regresi berganda yang dilakukan meliputi variabel independen spiritualitas di tempat kerja ( $X1$ ), budaya *pela gandong* ( $X2$ ) dan kepribadian ( $X3$ ) terhadap variabel dependen Kinerja Pegawai ( $Y$ ). Ringkasan hasil regresi tersaji pada Tabel 6.

**Tabel 6. Ringkasan Hasil Regresi**

Variabel	Koefisien Regresi	Beta ( $\beta$ )	T-hitung	Signifikansi	Keterangan
X1	0,107	0,315	3,737	0,000	Signifikan
X2	0,145	0,257	3,452	0,001	Signifikan
X3	0,099	0,292	3,503	0,001	Signifikan
R	= 0,735				
R <sup>2</sup>	= 0,541				
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0,530				

Berdasarkan hasil regresi, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 63,735 + 0,107X1 + 0,145X2 + 0,099X3$$

Nilai koefisien regresi variabel spiritualitas di tempat kerja sebesar 0,107 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa spiritualitas di tempat kerja ( $X1$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai ( $Y$ ), dimana setiap kenaikan satu satuan variabel spiritualitas di tempat kerja maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,107.

Nilai koefisien regresi variabel budaya *pela gandong* adalah positif sebesar 0,145. Artinya bahwa budaya *pela gandong* ( $X2$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai ( $Y$ ), dimana setiap kenaikan satu satuan variabel budaya *pela gandong* maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,145.

Nilai koefisien regresi variabel kepribadian sebesar 0,099 dan nilainya positif. Hal ini berarti bahwa kepribadian ( $X3$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai ( $Y$ ), dimana setiap kenaikan satu satuan variabel kepribadian maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,099.

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel. Korelasi semua variabel independen, yaitu spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian terhadap variabel dependen yaitu kinerja pegawai ditunjukkan oleh besarnya nilai R yaitu sebesar 0,735 yang artinya bahwa hubungan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen adalah sangat kuat atau sangat erat. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen lebih dari dua, maka nilai yang menentukan kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilihat pada nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,530. Hal ini berarti bahwa besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 53%, dan sisanya 47% diberikan dari variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Untuk menjawab hipotesis yang dikemukakan, maka akan dijelaskan pengaruh secara simultan, parsial dan dominan. Pengaruh simultan dapat dilihat pada nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, pada tabel hasil regresi berikut ini.

**Tabel 7. Hasil Regresi**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	290.485	3	96.828	49.799	.000 <sup>a</sup>
	Residual	246.934	127	1.944		
	Total	537.419	130			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada Tabel 7, terlihat nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian secara bersama-sama atau secara simultan memengaruhi kinerja pegawai. Spiritualitas berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (lihat Tabel 6). Budaya *pela gandong* berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (lihat tabel 6). Dengan demikian budaya *pela gandong* berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kepribadian berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (lihat tabel 6). Dengan demikian, kepribadian berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh dominan dapat dilihat pada nilai beta, dimana nilai beta variabel spiritualitas di tempat kerja yang paling besar yaitu 0,315 (lihat tabel 6). Dengan demikian, spiritualitas di tempat kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai.

Nilai spiritualitas di tempat kerja menjadi hal penting dalam sebuah organisasi dan dapat meningkatkan kinerja (Duchon dan Plowman, 2005; Albuquerque *et al.* (2014)). Nilai lain yang terkait dengan perilaku individu adalah budaya, yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu budaya daerah di Maluku adalah budaya *pela gandong*, yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku. Kepribadian terkait dengan perilaku individu (Yang dan Hwang, 2014). Kepribadian individu sangat penting dalam menentukan kinerja dan merupakan anteseden yang sangat penting dari kinerja (He *et al.*, 2015). Dalam praktek organisasi, kepribadian memengaruhi kinerja (Bhatti *et al.*, 2013; Yang dan Hwang, 2014; He *et al.*, 2015 dan Rashid *et al.*, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dibuktikan bahwa spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong*, dan kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai secara simultan atau serempak

maupun secara parsial. Spiritualitas di tempat kerja yang dimiliki perawat yang tinggi akan memengaruhi kinerja perawat tersebut. Variabel spiritualitas di tempat kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Albuquerque *et al.* (2014), Petchsawang dan Duchon (2012), Mulianti *et al.* (2015) dan Prihono *et al.* (2016). Perawat yang mempraktekkan spiritualitas dalam bekerja memiliki kecenderungan kinerja yang baik. Perawat yang selalu mempertimbangkan nilai yang baik dan benar, melandasi pekerjaan dengan berdoa serta menjalani pekerjaan dengan sukacita akan memberikan dampak positif bagi kinerjanya.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa budaya *pela gandong* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Zhao (2016), Ngo dan Li (2015) serta Rante (2010). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kambu (2012) yang menemukan budaya Papua berpengaruh negatif terhadap kinerja serta budaya Banjar tidak berpengaruh terhadap kinerja (Anisah, 2011). Budaya *pela gandong* yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku, khususnya daerah kota Ambon, pulau Lease dan pulau Seram sangat memengaruhi hasil kerja. Perawat yang melayani pasien dengan penuh cinta kasih, dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja perawat tersebut.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pembuktian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Hwang (2014), Bhatti *et al.* (2013), He *et al.* (2015) dan Rashid *et al.* (2016). Perawat dengan kepribadian yang baik, yang ramah kepada orang lain, bekerja dengan terstruktur, tidak tempramental serta kreatif memiliki kecenderungan memiliki kinerja yang baik.

Nilai yang diyakini baik dan benar oleh individu, dalam konteks ini adalah perawat

rumah sakit pada RSUD dr. Haulussy Ambon, yaitu spiritualitas di tempat kerja dan budaya *pela gandong* serta kepribadian individu perawat menjadi hal yang sangat penting bagi perawat dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, perawat RSUD dr Haulussy Ambon diharapkan mengembangkan nilai-nilai penting dan dianggap baik dan benar yang teraktualisasi dalam nilai spiritualitas di tempat kerja, nilai budaya lokal *pela gandong*, yang mengandung nilai kekeluargaan, serta perawat dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perawat.

Pihak manajemen RSUD dr. Haulussy Ambon dapat memperhatikan dan mengembangkan nilai-nilai penting dalam diri perawat, nilai budaya *pela gandong* serta kepribadian melalui *capacity building* kepada perawat. Hal ini sangat penting untuk diterapkan, karena akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perawat itu sendiri, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja rumah sakit.

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian secara keseluruhan menemukan bahwa spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Variabel spiritualitas di tempat kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai. Spiritualitas di tempat kerja yang tercermin melalui *inner life*, *meaningful work* dan *condition for community* dalam kehidupan perawat dapat meningkatkan kinerja. Spiritualitas di tempat kerja menjadi sangat penting bagi individu dalam menjalani pekerjaannya.

Budaya *pela gandong* yang telah lama ada dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku haruslah menjadi identitas masyarakat Maluku tak terkecuali perawat. Budaya *pela gandong* menjadi orisinalitas penelitian ini. Nilai yang terkandung didalamnya, antara lain cinta kasih, kejujuran, kepercayaan dan keadilan menjadi hal

penting bagi perawat dalam melayani pasien. Kepribadian individu antara satu orang dengan orang lain adalah berbeda. Namun dalam sebuah organisasi perbedaan kepribadian merupakan kekayaan bagi organisasi. Kepribadian yang baik dari perawat akan menunjang kinerjanya, yang diukur melalui *The Big Five*, yaitu ekstraversi (*extraversion*), keramahan (*agreeableness*), kehati-hatian (*conscientiousness*), stabilitas emosional (*emotional stability*) dan keterbukaan pada pengalaman (*openness to experience*). Perawat yang memiliki pribadi yang terbuka, ramah kepada orang lain, bekerja dengan baik, memiliki emosi yang stabil serta kreatif akan menunjang kerja perawat dan dapat meningkatkan kinerjanya.

Spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian haruslah menjadi perhatian penting bagi perawat guna menunjang pekerjaannya dalam melayani pasien. Hasil kerja perawat atau kinerja perawat yang merupakan kinerja individu merupakan dasar untuk membentuk kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, spiritualitas di tempat kerja, budaya *pela gandong* dan kepribadian memengaruhi kinerja pegawai tidak seratus persen, yaitu sebesar 53%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dengan demikian, untuk agenda penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain sebagai variabel independen.

## Daftar Rujukan

- Abdullah, I.; Omar, R., dan Rashid, Y. (2013). Effect of Personality on Organizational Commitment and Employees' Performance: Empirical Evidence from Banking Sector of Pakistan. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 18 (6), 140-147.
- Ahmad, Jawwad; Muhammad R. Ather dan Mazhar Hussain. 2014. Impact of Big Five Personality Traits on Job Performance (Organizational

- Commitment as a Mediator). International Conference.
- Al-Ahmadi, Hanan. 2009. Factor Affecting Performance of Hospital Nurses in Riyadh Region, Saudi Arabia. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, Vol. 22 (1), 40-54.
- Albuquerque, I.F., Cunha, R. C., Lu's Martins, D., Sa', A. B. (2014). Primary health care services: workplace spirituality and organizational performance, *Journal of Organizational Change Management*, Vol 27, 59-82.
- Amaliah, T.H. (2014). Konsep Penetapan Harga Jual Papalele Dalam Lingkup Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Maluku, *Disertasi tidak dipublikasikan*, Universitas Brawijaya.
- Anisah, H. U.; Salim, U; Sudarma, M; Djumahir. (2011). Peran Budaya Banjar dalam Meningkatkan Kinerja dan Keunggulan Bersaing melalui Kewirausahaan Islami dan Strategi (Studi pada Industri Kecil Menengah Batu Mulia/Permata di Martapura). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9 (3), 931-942.
- Arikunto, S., 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Malang.
- Ashmos, D.P. and Duchon, D. (2000), Spirituality at work: a conceptualization and measure, *Journal of Management Inquiry*, Vol. 9 (2), 134-145.
- Bhatti, M. A., Battour, M. M., Ismail, A. R., Sundram, V. P. (2014). Effects of personality traits (big five) on expatriates adjustment and job performance. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*. Vol. 33 (1) : 73-96.
- Cartaya, E. (2012). Personality and Performance : Assessing The Mediating Role of Mental Model Formation In The Personality-Performance Relationship. Doctor of Philosophy in Business Administration. Florida International University.
- Child, J dan Warner, M. (2003). Culture and Management in China. Research Paper in Management Study. University of Cambridge
- Collins, J. dan Cooke, D.K. (2013). Creative Role Models, Personality and Performance. *Journal of Management Development*, Vol. 33 (4), 336-350.
- Dessler, G. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi terjemahan. Prenhallindo. Jakarta.
- Duchon, D; Plowman, D.A. (2005). Nurturing the Spirit at Work : Impact on Work Unit Performance. *Leadership Quarterly*, Vol. 16 (5) : 807-833.
- Fan, Y. (2000). A Classification of Chinese Culture. *Cross Cultural Management*. Vol. 7 (2), 3-10.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. CV. Indoprint, Semarang.
- Fuadiputra, I. R dan Irawanto, D. W. (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Paramedis di Rumah Sakit Al-Rohman. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 2
- Garcia-Zamor, Jean-Claude. (2003). Workplace Spirituality and Organizational Performance. *Public Administration Review*, Vol. 63(3), 355-363.
- Gillies, D. A. (1994). *Nursing Management : A System Approach* (Ed. 3). WB Sanders. Toronto.
- Hair, A. dan Tatham, B. (2006). *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition. Prentice Hall. New Jersey.
- He, H., Wang, W., Zhu, W., Harris, W. (2015). Service Workers' Job Performance : The Roles of Personality Traits, Organizational Identification and Customer Orientation. *European Journal of Marketing*. Vol. 49, 1751-1776.
- Hodgetts, L. D. (2005). The Role of Culture

- Part 2. The McGraw-Hill Companies. Diakses melalui <http://www.unice.fr>.
- Kambu, A.; Troena, E. A; Surachman dan Setiawan, M. 2012. Influence of Leader-Member Exchange, Perceived Organizational Support, Papua Ethnic Culture and Organizational Citizenship Behavior Toward Employee Performance of Workers in Papua Provincial Secretary Office. *IOSR Journal of Business and Management*. Vol. 5 (4), 31-38.
- Kreitner, R dan Kinicki, A. (2014). Perilaku Organizational Behavior. Edisi 9 Buku 1, Salemba Empat. Jakarta.
- Krishnakumar, S. dan Neck, C. P. (2002). The “what”, “why” and “how” of spirituality in the workplace. *Journal of Managerial Psychology*. Vol. 17, 153-164.
- Lin, Z. dan Zhao, Z. (2016). Culture, Expatriation and Performance : Case of Chinese Multinational Enterprises. *Chinese Management Studies*, Vol. 10 (2).
- Liu, Y., Bao, Y., Liu, W. (2013). Mapping the values and culture in Chinese public sectors: an exploratory study. *Cross Culture Management*, Vol 20 (4), 559-577.
- Lokollo, J. E., Pattiruhu, C. M., Lestaluhu, M., Timisela, Iz., Limahelu, D., Limahelu, L., Leatemala, J., Leasa G., (1997). *Seri Budaya Pela Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon : Lembaga Kebudayaan daerah Maluku.
- Mahakud, G. C dan Gangai, K. N. (2015). The Influence of Workplace Spirituality on Organizational Commitment Among Public Sector Employee. *Journal of Organization and Human Behavior*. Vol. 4 (1), 37-46.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan keenam. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mboi, N. 2013. Ada Dua Masalah Keperawatan di Indonesia. <http://antaranews.com>. Maret 2017.
- Milliman, J., Czaplewski, A. J., Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. *Journal of Organizational Change Management*, Vol.16, 426-447.
- Mulianti, A. R., Anisah, H.U dan Sugiati, T. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Spiritualitas di Tempat Kerja terhadap Kinerja Karyawan Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin. *Jurnal Wawasan Manajemen*. Vol. 3 (2).
- Ngo, Hang-Yue; Li, H. (2015). Chinese Traditionality and Career Success : Mediating Roles of Procedural Justice and Job Security. *Career Development International*, Vol. 20 (6), 627-645.
- Nongkeng, H. 2012. Pengaruh Pemberdayaan dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Dosen (Persepsi Dosen Dipekerjakan PTS Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar). *Disertasi tidak dipublikasikan*. Universitas Brawijaya Malang.
- Osman-Gani, A. M., Hashim, J dan Ismail, Y. 2013. Establishing Linkages between Religiosity and Spirituality on Employee Performance. *Employee Relation*, Vol. 35 (4), 360-376.
- Pandey, S. (2014). Workplace Spirituality: Linkages with Attitude, Mental Health, Leadership, Organizational Development, Earning Management, Stress and Wellbeing. *The International Journal Of Business & Management*, Vol. 2 (7), 139-144.
- Pawar, B. S. (2009). Individual spirituality, workplace spirituality and work attitudes: An empirical test of direct and interaction effects. *Leadership & Organization Development Journal*, Vol. 30, 759-777.

- Petchsawanga, P., Duchon, D. (2012). Workplace Spirituality, Meditation, and Work Performance. *Journal of Management Spirituality and Religion*. Vol.9 (2), 189-208.
- Pratama, A. A. N. (2014). Pengaruh Spiritualitas, Intelektualitas dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Dosen STAIN Salatiga. *Inferensi*. Vol. 8 (2), 415-436.
- Prihono, I. K. B., Astika, I. B. P. (2016). Pengaruh Motivasi, Budaya Organisasi dan Spiritualitas pada Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 5 (7), 2063-2090.
- Rante, Y. (2010). Pengaruh Budaya Etnis dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Agribisnis di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12 (2), 133-141.
- Rashid, N .M, Sah, N. F. M, Ariffin, N. M., Ghani, W. S. W. A., Yunus, N. S. N. M. (2016). The Influence of Bank's Frontlines' Personality Traits on Job Performance. *Procedia Economics and Finance*. Vol. 37, 65-72.
- Robbins, S. P dan Judge, T. A. (2016). *Perilaku Organisasi*. Edisi 16 Salemba Empat : Jakarta.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi*. Edisi ke delapan. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan. Prentice-Hall. New Jersey.
- Sahusilawane, F. (2004). Sejarah Lahirnya Pela dan Gandong Antar Negeri-negeri Di Pulau Ambon. Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon. Ambon : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon.
- Singarimbun M dan Effendi .(1995). *Metodologi Penelitian Survey*. Edisi Revisi LP3ES. Jakarta.
- Steel, Piers, Vas Taras dan Bradley L. Kirkman. (2010). Examining the Impact of Culture's Consequences : A Three-Decade, Multilevel, Meta Analytic Review of Hofstede's Cultural Value Dimensions. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 95 (3) : 405-439.
- Syauta, J. H. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasional Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura Provinsi Papua. FEB Universitas Brawijaya Malang.
- Teasdale, B. A. (1999). Japanese Tradition and Culture: Aid or Obstacle to Future Success?
- Tim Redaksi. Direktur Akui Banyak Keluhan Pasien RSUD Ambon. <http://www.wartamaluku.com>. Maret 2017.
- Tim Redaksi. Direktur Akui Banyak Keluhan Pasien RSUD Ambon. <http://www.wartamaluku.com>. Maret 2017.
- Tsui, A. S., Nifadkar, S. S., dan Amy Yi Ou. (2007). Cross-National, Cross-Cultural Organizational Behavior Research : Advances, Gaps, and Recommendations. *Journal of Management*, Vol. 33, 426-478.
- Uneputty, T. J. A. (1996). *Perwujudan Pela Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Maluku.Ambon : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Maluku*.
- Yang, Cheng-Ling and Hwang, M. (2014). Personality traits and simultaneous reciprocal influences between job performance and job satisfaction. *Chinese Management Studies*, Vol. 8 (1), 6-26.
- Zohar, D.; Marshall, I. (2004). *Spiritual Capital, Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*. Penerjemah Helmi Mustofa. Mizan Pustaka. Bandung.



## **Environmental Management Accounting (Ema) Sebagai Dasar Pengukuran Dampak Usaha pada Perusahaan**

Gomal Halomoan Nainggolan  
Annisa Fatimah  
Basuki Rachmat

Politeknik Negeri Malang  
haigomal96@gmail.com

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.74

### **Informasi Artikel:**

Tanggal masuk	3-9-2018
Tanggal revisi	27-9-2018
Tanggal diterima	30-9-2018

### **Keywords:**

*Environmental Management Accounting (EMA), Physical Environmental Management Accounting (PEMA), Monetary Environmental Accounting (MEMA)*

### **Abstract**

*To determine the environmental impact, cost and benefits of it's conservation has done, this study will be explained descriptively. It used interview and documentary techniques in obtaining data, for example raw materials data, finished products and waste quantity, production costs, inputs and outputs at each station and activity costs which probably used by environmental conservation. First step of EMA is calculation of Physical Environmental Management Accounting (PEMA) then Monetary Environmental Accounting (MEMA). The results of this study indicate that the company can save electricity costs from the conversion value of bagasse, even getting additional profits from the sale of tetes waste.*

### **Kata Kunci :**

*Environmental Management Accounting (EMA), Physical Environmental Management Accounting (PEMA), Monetary Environmental Accounting (MEMA)*

### **Abstraksi**

Untuk mengetahui dampak lingkungan serta *cost and benefit* atas konservasi lingkungan yang telah dilakukan perusahaan secara deskriptif, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumenter dalam mendapatkan data penggunaan bahan baku, jumlah produk jadi dan limbah, biaya produksi, masukan dan keluaran di setiap stasiun serta biaya aktivitas konservasi lingkungan yang mungkin dilakukan. EMA terlebih dahulu dilakukan dengan perhitungan *Physical Environmental Management Accounting (PEMA)* lalu *Monetary Environmental Accounting (MEMA)*. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan dapat menghemat biaya listrik dari nilai konversi limbah ampas tebu, bahkan mendapatkan tambahan keuntungan dari hasil penjualan limbah tetes.

## **1. Pendahuluan**

Akuntansi lingkungan merupakan perlakuan akuntansi berkaitan dengan seluruh biaya lingkungan mulai dampak dan konservasinya yang dilakukan perusahaan atau lembaga pemerintah. Lebih lanjut, biaya lingkungan merupakan akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

PG Tjoekir Kabupaten Jombang merupakan perusahaan yang bergerak pada pengelolaan gula pasir dengan menggunakan bahan baku tebu. Dalam operasinya untuk memproses bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat tentunya juga akan melibatkan lingkungan.

Sebuah sumber menyebutkan indikasi adanya keluhan warga sekitar mengenai permasalahan pembuangan limbah cair dari PG Tjoekir

(<http://www.jatimtimes.com/tak-tahan-bau-limbah-warga-demo-pg-djombang-baru>). Oleh karena dampak negatif tersebut telah mengakibatkan citra perusahaan serta kepercayaan masyarakat terhadap PG. Tjoe-ekir berkurang. Maka dari itu perusahaan mulai menerapkan *eco-efficiency*, yang mana dalam meningkatkan produksinya secara bersamaan dan diwaktu yang sama pula melakukan pengurangan efek dari proses industrinya terhadap lingkungan. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat maka secara langsung perusahaan wajib mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam pengelolaan limbahnya, salah satunya adalah biaya penanganan limbah agar selanjutnya ditelusuri secara sistematis bagaimana biaya-biaya ini dikelola.

Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan karena telah mengambil manfaat dari lingkungan. Penggunaan akuntansi lingkungan bagi perusahaan sangat mendorong untuk meminimalisir berbagai persoalan mengenai lingkungan yang dihadapinya. Misalnya, bagaimana sebuah perusahaan dapat memproduksi barang ataupun jasa memiliki nilai manfaat sekaligus dapat mengurangi dampak lingkungan yang bersifat negatif dimulai dari perbaikan kinerja lingkungan didalam proses produksinya.

Salah satu langkah yang menjadi bagian dalam akuntansi lingkungan adalah *Environmental Management Accounting* selanjutnya disebut EMA. EMA terlebih dahulu dilakukan dengan perhitungan *Physical Environmental Management Accounting* (PEMA) lalu *Monetary Environmental Accounting* (MEMA).

EMA memberikan dasar untuk pengungkapan hasil dari dampak usaha terhadap lingkungan termasuk bagaimana konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi yang diukur secara kuantitatif. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut.

Hal ini memungkinkan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan *stakeholders*, seperti pelanggan, rekan bisnis,

investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada *stakeholders* atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Diharapkan dengan adanya EMA akan berfungsi dan berarti bagi perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab secara simultan.

Berdasarkan uraian di atas serta melihat pentingnya permasalahan lingkungan terhadap perkembangan sebuah perusahaan, maka masalah yang diangkat pada penelitian ini terfokus pada bagaimana hasil pengukuran dampak lingkungan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan EMA terbatas pada limbah tebu yang digunakan untuk produksi.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan motivasi positif bagi perusahaan untuk terus mengupayakan konservasi lingkungan atas dampak usahanya sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholder* secara keseluruhan.

## 2. Kajian Teori

Pada perkembangannya, akuntansi bu-kan merupakan sebuah proses pertanggung jawaban terhadap keuangan saja namun saat ini akuntansi mulai mempertanggungjawabkan mengenai masalah lingkungan sosial. Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kemali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut (Ikhsan, 2008:14).

Dalam pengertian diatas, pencemaran serta limbah produksi memang merupakan salah satu contoh dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Sistem akuntansi lingkungan dirasa sangat perlu diterapkan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan karena dalam pengolahan limbahnya per-

sahaan harus melakukan pengidentifikasian, pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pelaporan biaya atas pengolahan limbah dari kegiatan operasionalnya.

Lingkup akuntansi lingkungan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama didasarkan pada kegiatan akuntansi lingkungan suatu perusahaan baik secara nasional maupun regional. Bagian kedua berkaitan dengan akuntansi lingkungan untuk perusahaan-perusahaan dan organisasi lainnya. Pada dasarnya penjelasan mengenai konsep akuntansi lingkungan harus mengikuti beberapa faktor berikut, antara lain: (1) Biaya konservasi lingkungan (diukur dengan menggunakan nilai satuan uang); (2) Keuntungan konservasi lingkungan (diukur dengan unit fisik); (3) Keuntungan ekonomi dari kegiatan konservasi lingkungan (diukur dengan nilai satuan uang/rupee).

Aspek-aspek yang menjadi bidang akuntansi lingkungan (Cahyono, 2002 dalam Rossje, 2006) adalah sebagai berikut: (1) Pengakuan dan identifikasi pengaruh negatif aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional; (2) Identifikasi, mencari dan memeriksa persoalan bidang garap akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan alternatif solusinya; (3) Melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif untuk memperbaiki lingkungan pada praktik akuntansi konvensional; (4) Pengembangan format baru sistem akuntansi keuangan dan non keuangan, sistem pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan; (5) Identifikasi biaya-biaya (*cost*) dan manfaat berupa pendapatan (*revenue*) apabila perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dari berbagai program perbaikan lingkungan; (6) Pengembangan format kerja, penilaian dan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan; (7) Upaya perusahaan yang berkesinambungan, akuntansi kewajiban, resiko, investasi biaya terhadap energi, limbah dan perlindungan lingkungan; (8) Pengembangan teknik-teknik

akuntansi pada aktiva, kewajiban dan biaya dalam konteks non keuangan khususnya ekologi atau lingkungan.

Fungsi dan peran akuntansi lingkungan dibagi ke dalam dua bentuk. Fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana hanya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengukur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini diharapkan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis.

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomis dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional.

SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional.

Pada fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi.

Fungsi eksternal memberi kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholders, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Diharapkan dengan publikasi hasil akuntansi lingkungan akan berfungsi dan berarti bagi perusahaan-perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawaban serta transparansi mereka bagi para *stakeholders* yang secara simultan sangat berarti untuk kepastian evaluasi dari kegiatan konservasi lingkungan.

Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya-biaya yang akan dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap periode. Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda.

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi (Hansen dan Mowen, 2009:413). Secara garis besar pengertian biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (Sulistyowati, 1999:104): Biaya lingkungan implisit (*remedial cost*) dan biaya lingkungan eksplisit (*externalities*)

Biaya internalitas tidak terkait secara langsung dengan proses produksi suatu perusahaan, tetapi merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungannya. Termasuk dalam biaya lingkungan implisit adalah : biaya pencemaran tanah, biaya pencemaran air tanah, biaya pencemaran permukaan air, dan biaya pencemaran gas udara.

Biaya eksternalitas merupakan biaya pengurangan polusi udara, limbah, kerusakan tanaman, biaya pengobatan, dan lain-lain yang sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori (Hansen Mowen, 2009:413), yaitu: (a) Biaya Pencegahan Lingkungan (*environmental prevention costs*), yaitu biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan/ atau sampah yang dapat merusak lingkungan; (b) Biaya Deteksi Lingkungan (*environmental detection cost*), adalah biaya – biaya untuk aktifitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktifitas, lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak; (c) Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (*environmental internal failure cost*), adalah biaya – biaya untuk aktifitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar; (d) Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (*environmental external failure*), adalah biaya – biaya untuk aktifitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.

Alokasi biaya lingkungan terhadap produk atau proses produksi dapat memberikan manfaat motivasi bagi manajer atau bawahannya untuk menekan polusi sebagai akibat dari proses produksi tersebut didalam akuntansi konvensional, biaya ini dialokasikan pada biaya *overhead* dan pada akuntansi tradisional dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan dialokasikan ke produk tertentu atau dialokasikan pada kumpulan-kumpulan biaya yang menjadi biaya tertentu sehingga

tidak dialokasikan ke produk secara spesifik (Haryanto, 2003).

Biaya Lingkungan yang terjadi dalam perusahaan merupakan salah satu biaya *overhead* pabrik yang sulit sekali untuk diidentifikasi secara langsung dikarenakan biaya-biaya tersebut seringkali tersembunyi dalam pusat biaya dan tidak ada bukti pencatatan ataupun pelaporan yang sangat jelas. Ada beberapa tahapan pencatatan biaya ini

Pertama, identifikasi. Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan *eksternalitas* yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif tersebut. Sebagai contoh misalnya sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, cair, maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau kegiatan karyawan maupun pasien (Sudigyo, 2002). Macam macam kemungkinan dampak ini diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak negatif yang mungkin timbul.

Kedua, Pengakuan. Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan lingkungan. (PSAK,2009).

Ketiga, Pengukuran. Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan

dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap periode. Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda.

Keempat, Penyajian. Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut.

Kelima, pengungkapan. Pada umumnya, akuntan akan mencatat biaya biaya tambahan ini dalam akuntansi konvensional sebagai biaya *overhead* yang berarti belum dilakukan spesialisasi rekening untuk pos biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan menuntut adanya alokasi pos khusus dalam pencatatan rekening pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan- sehingga dalam pelaporan akuntansi keuangan akan muncul bahwa pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebatas pada retorika namun telah sesuai praktis didalam pengelolaan sisa hasil operasional perusahaan.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan berusaha menerapkan analisa EMA untuk menghitung *cost* dan *benefit* yang mungkin didapatkan perusahaan melalui konservasi lingkungannya, khususnya pemanfaatan limbah produksi dari bahan baku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menumpulkan data mengenai perusahaan (dokumentasi) dan wawancara dengan

pihak perusahaan dalam rangka pengumpulan informasi yang berguna bagi penelitian.

Data primer dikumpulkan secara khusus melalui wawancara dengan pihak perusahaan yang terkait kegiatan proses produksi, keuangan, sumber daya manusia, sejarah dan perkembangan perusahaan, serta bagaimana upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk mengolah limbah produksi selama ini. Selanjutnya, data sekunder yang digunakan adalah data laporan biaya produksi tahun 2016 dan 2017, data input dan output proses produksi, data biaya konservasi lingkungan, dan data yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Penelitian ini mengolahinformasi pada EMA, mengenai: (1) Informasi fisik pada penggunaan, aliran dan tujuan aliran energi, air dan material (termasuk limbah) yang disebut sebagai PEMA (*Physical Environmental Management Accounting*). (2) Informasi moneter pada biaya, pendapatan dan penghematan yang berhubungan dengan pengolahan energi, air dan material (termasuk limbah) yang disebut sebagai MEMA (*Monetary Environmental Accounting*).

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah: (a) Mengolah data dengan menganalisis dampak usaha terhadap proses produksi PG Tjoekir; (b) Melakukan pengukuran terhadap dampak usaha akibat proses produksi PG Tjoekir yakni dengan mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan perusahaan atas dampak usaha yang ditimbulkan; (c) Melakukan pengolahan atas data PEMA yakni dengan memperhitungkan arus bahan, energi, dan air dengan basis material *flow balance produce*; (d) Melakukan pengolahan atas data MEMA yakni dengan cara mempertimbangkan nilai manfaat atas limbah yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya yang dibebankan; (e) Melakukan analisis data terhadap hasil pengolahan menggunakan EMA; (f) Melakukan mengidentifikasi *cost and benefit* atas konservasi lingkungan yang telah dilakukan oleh PG Tjoekir.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

PG Tjoekir memproduksi SHS gula melalui enam stasiun. Selain itu, ada tiga jenis limbah yang dihasilkan dari beberapa stasiun. Pada titik ini, proses produksi di setiap stasiun diikuti dengan input yang dibutuhkan dan hasil yang dihasilkan.

Stasiun Penggilingan adalah fase pertama produksi di Pabrik Gula Tjoekir. Di stasiun ini, tebu diterima dan disiapkan untuk ekstraksi nira mentah. Ada dua kegiatan utama di stasiun penggilingan yang menghancurkan struktur keras tebu dan menggiling tebu. Proses tebu dilakukan dengan menggunakan pisau dan penghancur bergulir. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin penghancur tiga roler. Di stasiun penggilingan, air imbibisi benar-benar diperlukan untuk meningkatkan ekstraksi nira mentah. Saat proses penempatan gula tebu dan air imbibisi sebagai *input* di stasiun penggilingan, maka akan menghasilkan nira mentah sebagai hasil kerja dalam proses produk dan ampas tebu sebagai *output* non-produk. Masukan dari stasiun ini adalah gula tebu dan air imbibisi. Hasilnya adalah nira mentah dan ampas tebu.

Langkah selanjutnya produksi gula adalah di stasiun pemurnian. Nira mentah sebagai *output* dari stasiun penggilingan akan menjadi input di stasiun pemurnian. Kegiatan utama di stasiun ini adalah menyaring nira mentah untuk menghilangkan partikel besar untuk diklarifikasi. Proses klarifikasi akan dibantu dengan menggunakan bahan pendukung, yaitu fosfat, susu kapur, belerang dan flukolan. Fungsi bahan pendukung menetralkan asam organik. Jus klarifikasi akan disebut nira encer dan dibawa ke stasiun penguapan tanpa memberikan perawatan lebih banyak.

Fase penguapan memiliki fungsi kuntut memusatkan nira encer yang lembut ke dalam nira kental. Nira encer dari stasiun pemurnian melewati penukar panas untuk memanaskan nira dan menuju ke stasiun evaporasi. Penukaran panas akan menciptakan proses kondensasi dan menghasilkan air kondensasi.

*Input* di stasiun penguapan adalah nira encer yang lembut dan hasilnya adalah nira kental dan air kondensat.

Setelah stasiun penguapan, stasiun kristalisasi akan dimulai dalam panci vakum yang berfungsi untuk menghasilkan kristal gula dari jus tebal. Dalam proses perebusan panci, ketika volume campuran cairan dan kristal (kristalisasi) mencapai kapasitas panci, penguapan dibiarkan berlanjut sampai *massecuite* terbentuk. Sekali lagi, proses kondensasi terjadi lagi di stasiun ini dan akhirnya akan menghasilkan air kondensasi. Masukan di stasiun ini adalah nira kental dan hasilnya adalah kristalisasi dan air kondensat.

Dari stasiun kristalisasi, *massecuite* akan ditransfer ke mesin sentrifugal kecepatan tinggi dan akhirnya menghasilkan tetes. Proses utama di stasiun ini adalah memisahkan gula mentah dari tetes. Gula mentah ini akan dikombinasikan dengan hasil kristal pertama yang dikeringkan, didinginkan dan dibuat SHS *Sugar*. Di stasiun ini, *output* adalah Gula SHS sebagai produk jadi dan tetes sebagai *output* non-produk. Setelah didinginkan, SHS *Sugar* akan dikemas di stasiun ini dan dikirim ke penyimpanan.

PG Tjoekir adalah perusahaan yang menggelolatebu menjadigulaataudisebutjugagulayang dijadikanproduk,hasilproduksiutama dariPG Tjoekiradalahgula SHSI,jugamenghasilkan produk sampingyangbermanfaat untuk keperluanlainyaitu berupa:(1) Tetes Tebu

Tetes tebu adalah hasil dari pelabuhankembali kristalgulayang tidakmemiliki standargulayang berupasirupyang berwarnahitam. Tetes tebu ini dapat digunakan sebagai bumbu masak, pembuat alkohol dan sorituserta dapatdapatdipakaisebagaibahan campuran untuk kontruksi bangunan; (2) Blotong, blotong merupakan hasil buangan limbah dari kotoran tebu yang berwarna kehitaman seperti tanah dan mengeluarkan bau tidak sedap. Blotong dapat digunakan untuk pupuk tanamandan dapat digunakan untuk bahan bakar yang bisa dipakai untuk memasak. Sedangkan untuk pupuk tidak bis-

adigunakanlangsungtetapiharus didinginkan disuatu tempatkhususselama 2bulankerena pada waktublotong dikeluarkandari dalam pabrikblotong bersuhutinggidanmengandung zat TSP. (3) Ampas Tebu merupakan hasil dari perasan tebu yang dapatdipakai sebagai ketel uap dalam proses produksi.

Berdirinya suatu pabrik pada daerah atau lokasi tertentu akan membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan daerah tersebut. Keberadaan PG Tjoekir juga mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitar. PG Tjoekir mengadakan berbagai kegiatan untuk lingkungan sekitar, diantaranya : (a) Mengadakan pesta rakyat menjelang musim giling, seperti: pasar malam, wayang kulit, jalan sehat berhadiah; (b) Pemberian santunan atau sembako kepada masyarakat sekitar pabrik; (c) Pembangunan fasilitas pengadaan air bersih untuk wilayah sekitar pabrik, ikut membantu dalam pembangunan tempat-tempat ibadah di wilayah sekitar pabrik, perekrutan tanpa tes/langsung bagi warga sekitar pabrik untuk musim giling saja.

Diantara dampak positif tersebut PG Tjoekir juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar akibat dari proses produksi PG Tjoekir, antara lain : (1) Limbah air/cair, (2) Polusi Udara (debu dan asap dari mesin proses pengolahan gula), (3) Polusi Suara (suara mesin pada saat kegiatan operasional).

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang akan penulis bahas yakni mengenai evaluasi penerapan akuntansi lingkungan sebagai dasar pengukuran dampak usaha yang mana terkait dengan aktivitas operasional perusahaan serta memperhitungkan *cost and benefit* atas konservasi lingkungan dalam hal ini merupakan pengelolaan limbah yang telah dilakukan.

Prinsip perusahaan yang sehat adalah harus memperhatikan keselamatan lingkungan sekaligus, pemaksimalan laba secara bersamaan namun demikian akhir-akhir ini perusahaan cenderung hanya berfokus pada pemaksimalan laba semata dan melanggar

prinsip tersebut. Tanpa disadari prinsip maksimalisasi laba yang banyak diterapkan oleh perusahaan justru melanggar prinsip-prinsip tersebut, adapun beberapa diantaranya adalah kaidah biaya ekonomi (*economic cost*), biaya akuntansi (*accounting cost*), dan biaya kesempatan (*opportunity cost*). Kecenderungan perusahaan yang kurang memperhatikan isu lingkungan sedikit banyak akan membuat perhatian perusahaan hanya pada perolehan profit saja tanpa memperhatikan bahwa limbah yang dihasilkan dari aktivitas produksinya akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penulis ingin memaparkan terlebih dahulu jenis bahan baku dan pembantu yang digunakan oleh perusahaan selama kegiatan produksi berlangsung sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Pemakaian BB**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tebu	404.860,60 ton
2.	Air Imbibisi	73.156,10 ton
3.	Kapur	531.130 kg
4.	Belerang	229.480 kg
5.	Phospat	43.155 kg
6.	Flukolan	125 kg

Sumber : PG Tjoekir (2017)

Tabel 1 menunjukkan data bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi gula di PG Tjoekir. Tebu sebagai bahan baku utama pembentuk gula SHS. Dalam proses produksinya, terdapat beberapa bahan penolong seperti air imbibisi, kapur, belerang, phospat, flukolan yang digunakan untuk mengekstraksikan tebu menjadi gula yang siap dijual.

**Tabel 2**  
**Data Barang Dalam Proses**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nira Mentah	426.461,10 ton
2.	Nira Encer	256.908,70 ton
3.	Nira Kental	67.145,10 ton
4.	Air Kondensat	0,00
5.	Massequite	190.000,90 ton
6.	Gula SHS	15.098,10 ton

Sumber : PG Tjoekir (2017)

Tabel diatas menjelaskan tentang jenis barang dalam proses yang dihasilkan oleh perusahaan selama proses produksi. Selama tahun 2017, perusahaan menghasilkan berbagai jenis barang dalam proses yang kemudian akan diproses menjadi barang jadi.

**Tabel 3**  
**Data Limbah**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Blotong	14.565,40 ton
2.	Ampas Tebu	113.582,10 ton
3.	Tetes	20.306,7 ton

Sumber : PG Tjoekir (2017)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa keluaran perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu produk jadi dan limbah serta emisi. Tabel data limbah menjelaskan tentang tiga jenis limbah yang dihasilkan oleh PG Tjoekir melalui kegiatan produksinya yaitu blotong, ampas tebu dan tetes. Blotong merupakan limbah yang berbentuk endapan dengan tekstur *spongy* dan memiliki warna hitam yang sangat pekat. Selanjutnya yaitu ampas tebu yang berupa serabut sebagai akibat dari penggilingan tebu di mesin giling. Ampas tebu ini memiliki aroma yang kurang sedap dan

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Keterangan
Spiritualitas di tempat kerja	X1.1.1	0,510	0,000	Valid
	X1.1.2	0,565	0,000	Valid
	X1.1.3	0,541	0,000	Valid
	X1.1.4	0,512	0,000	Valid
	X1.1.5	0,739	0,000	Valid
	X1.2.1	0,560	0,000	Valid
	X1.2.2	0,571	0,000	Valid
	X1.2.3	0,673	0,000	Valid
	X1.2.4	0,682	0,000	Valid
	X1.2.5	0,724	0,000	Valid
	X1.2.6	0,507	0,000	Valid

nantinya akan diolah di stasiun ketel untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah tetes yang merupakan produk sampingan dari PG Tjoekir. Tetes ini nantinya akan dapat dijual kembali ke petani tebu dan pengguna lainnya sesuai dengan rendemen yang terkandung di dalam tetes tersebut. Tetes pada dasarnya merupakan kandungan sukrosa di dalam gula.

Metode *Physical Management Accounting* (PEMA) merupakan metode yang menjelaskan mengenai prosedur aliran fisik atas konsumsi serta pembuangan bahan, energi

dan air atau dapat disebut sebagai dampak lingkungan terhadap sistem lingkungan. Di dalam proses pengelolaannya, data dasar yang digunakan adalah data berupa data fisik (tonase) dari keseluruhan bahan serta limbah mulai dari *input* sampai dengan *output* pada setiap tahapan proses di masing-masing stasiun. Selanjutnya untuk mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap sistem lingkungan sekitarnya PEMA menganut sistem *material flow balance procedure* yang artinya adalah *input* harus sama dengan *output*. *Output* yang dimaksud adalah meliputi limbah (*Non-Product Output*) dan juga bahan dalam proses.

Apabila hasil perhitungan menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input*, maka asumsinya adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan akan lebih besar. Bagi perusahaan menghasilkan *output* yang lebih kecil merupakan tantangan tersendiri oleh karena itu keseimbangan antara *input-output* dirasa telah mampu memenuhi tanggung jawab perusahaan sebagai penghasil limbah disamping pengelolaan limbah yang wajib hukumnya dilakukan oleh perusahaan. Secara garis besar dari perincian bahan, energi dan air yang digunakan dalam proses *input-output* dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa bahan, energi dan air yang jumlahnya tidak sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Terutama terhadap bahan-bahan yang tergolong sebagai limbah atau *non-product output*.

**Tabel 4**  
**Analisis PEMA**  
**Stasiun Penggilingan**

No	Keterangan	Catatan Perusahaan		PEMA		Selisih
		Input (1)	Output (2)	Input (3)	Output (4)	
1.	Tebu Input	404.860,60		404.860,60		
2.	Kapur Input	531.130,00		531.130,00		
3.	Nira Mentah Output		426.461,10		426.461,10	
4.	Ampas Tebu Output		113.582,10		509.529,50	395.947,40
<b>TOTAL</b>		<b>935.990,60</b>	<b>540.043,20</b>	<b>935.990,60</b>	<b>935.990,60</b>	

Sumber : Data Diolah

Kolom 1 merupakan masukan produksi berupa material, energi dan air. Nominal tersebut diperoleh dari catatan perusahaan. Kolom 2 merupakan keluaran produksi yang berupa produk jadi dan limbah (emisi). Angka

tersebut diperoleh dari catatan perusahaan. Kolom 3 merupakan hasil analisis dengan menggunakan keseimbangan material. Kolom 4 merupakan hasil analisis dari peneliti dengan melihat pada sisi mana keluaran berbeda dengan masukan. Kolom 5 diperoleh dari selisih antara masukan dan keluaran.

Konsep utama yang disajikan oleh PEMA adalah dengan melihat keseimbangan antara masukan dan keluaran. Oleh karena itu, dalam hal analisis PEMA di stasiun penggilingan, peneliti berusaha untuk melihat keseimbangan antara masukan dan keluaran. Asumsi dasar yang digunakan adalah peneliti meyakini keakuratan data jumlah masukan. Kemudian dibandingkan dengan jumlah keluaran. Keluaran terdiri dari produk jadi dan limbah. Produk jadi di stasiun penggilingan akan menjadi masukan di stasiun berikutnya. Oleh karena itu, peneliti bisa melihat kesesuaian data antara keluaran di stasiun penggilingan dengan stasiun pemurnian. Dari data tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa perbedaan terjadi pada limbah ampas tebu.

Pada dasarnya ampas tebu yang dihasilkan PG Tjoekir akan ditimbun terlebih dahulu dalam gudang untuk kemudian diolah menjadi pengganti bahan bakar dalam menghasilkan tenaga listrik. Proses pengolahan ini dilakukan di stasiun ketel. Selain itu, kandungan yang ada di ampas tebu juga dapat digunakan sebagai salah satu campuran untuk pembuatan pupuk untuk menyuburkan tanah tebu di perusahaan. Namun demikian, perusahaan hanya melakukan pencatatan atas ampas tebu yang diolah di stasiun ketel dan hal ini mengakibatkan perbedaan yang cukup signifikan dalam analisis PEMA.

**Tabel 5**  
**Analisis PEMA**  
**Stasiun Pemurnian**

No	Keterangan	Catatan Perusahaan		PEMA		Selisih
		Input	Output	Input	Output	
1.	Nira Mentah Input	426.461,10		426.461,10		
2.	Belerang Input	229.480,00		229.480,00		
3.	Fosfat Input	43.155,00		43.155,00		
4.	Susu Kapur Input	531.130		531.130		
5.	Flukolan Input	125		125		
4.	Nira Encer Output		256.908,70		256.908,70	
5.	Blotong Output		14.565,40		973.442,40	958.877
<b>TOTAL</b>		<b>1.230.351,10</b>	<b>271.474,10</b>	<b>1.230.351,10</b>	<b>1.230.351,10</b>	

Sumber : Data Diolah

Blotong adalah salah satu limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi dari stasiun pemurnian. PG Tjoekir mengolah blotong untuk digunakan sebagai pupuk guna menyuburkan tanaman tebu di pabrik untuk keperluan produksi.

**Tabel 5**  
**Analisis PEMA**  
**Stasiun Pengolahan**

No	Keterangan	Catatan Perusahaan		PEMA		Selisih
		Input	Output	Input	Output	
1.	Masecuite	Input	190.000,90		190.000,90	
2.	Air Kondensat	Input	0,00		0,00	
3.	Gula SHS	Output		15.098,10		15.098,10
4.	Tetes	Output		20.306,70		174.902,80
<b>TOTAL</b>			<b>190.000,90</b>	<b>35.404,80</b>	<b>190.000,90</b>	<b>190.000,90</b>

Sumber : Data Diolah

Tetes mengandung sukrosa yang mengandung kadar rendemen tertentu. Selama ini tetes dijual kepada petani tebu dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada kandungan rendemen dan juga perusahaan pembuat MSG sebagai salah satu bahan penolong. Tetes yang dihasilkan akan disimpan dalam sebuah tangki berukuran yang besar. Namun demikian pada tahun diatas, PG Tjoekir hanya menjual sebesar 20.306,70 ton dikarenakan kualitas tetes yang layak untuk dijual didasarkan pada batasan rendemen. Sedangkan sisanya tidak layak untuk dijual.

Metode MEMA merupakan metode yang menjelaskan mengenai prosedur pengukuran atas nilai biaya, penghematan maupun pendapatan atas konservasi lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Konservasi lingkungan merupakan segala bentuk upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan sisi manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu juga atau memmanfaatkannya di masa yang akan datang. PG Tjoekir dalam memperhitungkan *cost and benefit* atas konservasi lingkungan yang telah dilakukannya perlu adanya identifikasi mengenai segala bentuk biaya yang berkaitan dengan konservasi tersebut serta melakukan identifikasi pula terhadap manfaat yang ditimbulkannya.

Telah diketahui bahwa dari proses produksi yang dilakukan oleh Pabrik Gula Tjoekir mampu menghasilkan beberapa jenis

*non-product output* yakni diantaranya adalah ampas tebu yang merupakan limbah dari stasiun penggilingan, blotong dari stasiun pemurnian, air kondensat-1 dan air kondensat-2 yang berasal dari stasiun penguapan dan pemasakan, serta yang terakhir adalah tetes yang merupakan limbah dari stasiun putaran

### 1. Ampas Tebu

Pabrik Gula Tjoekir melakukan salah satu bentuk konservasi lingkungannya yakni dengan cara menciptakan tenaga listrik tenaga uap melalui pengelolaan ampas tebu sebagai bahan bakar pada stasiun ketel yang mana air kondensat-1 dan air kondensat-2 sebagai umpan pada stasiun ketel. Uap yang dihasilkan dari pembakaran pada stasiun ketel akan diubah menjadi listrik tenaga uap pada stasiun PLTU. Biaya-Biaya yang dibebankan merupakan biaya atas ampas tebu, air kondensat-1 dan air kondensat-2, karena pengelolaannya yang menjadi satu kesatuan sebagai penghasil listrik tenaga uap akibatnya biaya yang dibebankan merupakan biaya atas ketiganya.

Penghematan penggunaan bahan bakar yang digantikan oleh pengolahan ampas tebu dapat membantu perusahaan untuk menikmati efisiensi dari penghematan dari biaya bahan bakar ini. Selain itu, perusahaan juga memiliki kesempatan untuk menggunakan biaya ini guna membiayai keperluan biaya yang lain.

**Tabel 6**  
**Perhitungan Nilai Konversi Atas Limbah Atas Tebu Tahun 2017**

Keterangan	Dasar Perhitungan	Jumlah
Ampas tebu yang dihasilkan	Jumlah Tebu (ton) x 54%	332.385,10 ton
Kebutuhan listrik / tahun	550.000 kwh	
Kwh yang dihasilkan / 1 ton ampas tebu	Jumlah kwh/ton ampas tebu x jumlah ampas tebu	3.988.621,2 kwh
Ampas tebu yang diolah kembali		3.988.621,2 kwh
Tarif listrik tahun 2016		Rp 1.500,61
Nilai konversi	3.988.621,2 kwh x Rp 1.500,61	Rp 5.985.364.859,00

Tabel di atas merupakan hasil perhitungan nilai konversi atas limbah ampas tebu tahun 2015. Jumlah tebu dikalikan 54%, 54% diambil dari hasil tebu yang dijadikan gula 54% itu menjadi ampas dan tarif listrik tersebut diambil dari ketentuan PT PLN

mengenai tarif listrik tahun 2016 mengenai industri I4 (<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/855791-tarif-listrik-desember-2016-naik-ini-daftar-lengkapnya>).

Tabel 7

### Perhitungan Biaya dan Manfaat Limbah Ampas Tebu

Keterangan	Dasar Perhitungan	Jumlah (Rp)
Nilai Konversi	3.988.021,2 kwh x Rp 1.500,61	Rp 5.985.364.859,00
<b>Biaya atas Limbah:</b>		
Tenaga Kerja dan Lembur		295.870.000,00
Biaya Penyediaan Tenaga Uap		2.699.171.000,00
<b>Total Biaya</b>		<b>2.995.041.000,00</b>
<b>Keuntungan Limbah</b>		<b>2.990.323.859,00</b>

Akuntansi Manajemen Lingkungan yang ditinjau secara moneter akan menghasilkan informasi keuangan atau disebut dengan dampak lingkungan terhadap keuangan perusahaan. Tabel di atas menginformasikan tentang nilai konversi dari ampas tebu yang dihasilkan oleh PG Tjoekir. Ampas tebu yang diolah menjadi tenaga listrik memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya listrik. Efisiensi biaya listrik ini nantinya juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk keperluan pemenuhan biaya yang lain. Namun demikian, perusahaan tetap harus mengakui beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengolah limbah ampas tebu. Hal ini diperlukan guna melakukan perbandingan antara biaya dan manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan kegiatan konservasi lingkungan berupa pengolahan limbah. Pada tabel 5, PG Tjoekir membuktikan bahwa pengolahan limbah ampas tebu menjadi tenaga listrik menghasilkan keuntungan sebesar Rp 2.990.323.859,00 secara bersih.

Tetes merupakan produk sampingan dari PG Tjoekir. Dalam pengolahan limbahnya, PG Tjoekir memilih untuk menjual limbah ini kepada petani. Harga jual tetes ditetapkan sebesar Rp 3.500. Dan hasil penjualan bersifat bagi hasil antara petani tebu dan perusahaan. Tingkat persentase ini juga akan berbeda-beda bergantung dengan tingkat rendemen dari tetes yang dihasilkan dari kegiatan produksi gula.

Tabel 8

### Penjualan Tetes

Keterangan	Dasar Perhitungan	Jumlah
Tetes yang dihasilkan		20.360,7
Tetes yang dijual		20.360,7
Harga tetes/liter		Rp 3.500,00
<b>Total Penjualan</b>		<b>71.262.450</b>

Data penjualan tetes menunjukkan bahwa total penjualan PG Tjoekir, dari hasil tetes tebu x harga tetes/liter.

Tabel 9

### Perhitungan Biaya dan Manfaat Tetes

Keterangan	Dasar Perhitungan	Jumlah (Rp)
<b>Total Penjualan</b>		<b>Rp 71.262.450,00</b>
<b>Biaya atas Limbah:</b>		
Biaya Penyusutan Mesin		Rp 2.152.085,00
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp 69.110.365,00</b>
<b>Keuntungan Limbah Bagi Hasil (66:34)</b>		<b>23.497.5234,1</b>

Sama halnya dengan pengolahan limbah yang dilakukan pada ampas tebu, PG Tjoekir juga melakukan pengolahan terhadap limbah tetes guna memaksimalkan penggunaan dari produk sampingan ini. Tabel 6 menjelaskan tentang seberapa banyak tetes yang siap untuk diolah dan dijual kepada petani. Sedangkan tabel 7 menginformasikan tentang perbandingan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan dari penjualan tetes kepada petani.

Akuntansi lingkungan menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan oleh perusahaan khususnya industri manufaktur mengingat informasi lingkungan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan produksi memiliki manfaat tersendiri untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis dampak lingkungan dengan menggunakan PEMA dan MEMA juga akan dapat menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi pihak manajemen khususnya terkait kebijakan lingkungan.

Pengolahan ampas tebu menjadi tenaga listrik dan memberikan *supply* terhadap mesin-mesin produksi menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan mampu menghemat pengeluaran untuk pos biaya listrik dan mengalihkannya untuk pemenuhan pos biaya yang

lain, tak terkecuali biaya lingkungan.

Penjualan tetes sebagai produk sampingan dari PG Tjoekir memberikan manfaat tersendiri khususnya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kegiatan kemitraan dengan petani tebu dalam hal jual beli tetes harus dipertahankan guna memanfaatkan kesempatan dari tetes secara moneter. Namun demikian, sangat disayangkan pihak PG Tjoekir kurang mampu memaksimalkan penggunaan limbah lain layaknya blotong untuk dijual kepada pihak lain.

Informasi yang diberikan dari kegiatan manajemen lingkungan sangatlah kompleks. Tidak hanya terbatas pada informasi fisik mengenai alur material, energi dan air namun juga informasi moneter atau keuangan yang sangat penting bagi penunjang performa lingkungan dan ekonomi perusahaan. Terdapat beberapa keuntungan dari penerapan akuntansi manajemen lingkungan ini antara lain : (a) EMA akan membantu perusahaan untuk dapat mengakses informasi lingkungan sehingga kebijakan lingkungan yang diambil akan lebih tepat sasaran. (b) Kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan akan menjadi pendorong untuk menciptakan performa perusahaan yang lebih baik baik ditinjau dari segi lingkungan maupun ekonomi, (c) Performa perusahaan yang unggul akan membantu perusahaan untuk memenuhi tingkat kepuasan tertentu dari para stakeholders yang akan berdampak positif pula bagi perusahaan baik jangka pendek, menengah maupun panjang, (d) Ampas tebu yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar ketel dan sebagai bahan campuran untuk penyuburan tanah perusahaan menunjukkan bahwa PG Tjoekir telah mengolah ampas tebu dengan cukup baik, (e) Tetes tebu hasil produksi gula PG Tjoekir dapat dijual lagi di Pabrik lain seperti PT Ajinomoto, hal ini menunjukkan bahwa pengolahan tetes tebu di PG Tjoekir cukup baik, (f) Penggunaan blotong sebagai bahan baku pupuk untuk menyuburkan tanaman tebu di PG Tjoekir seharusnya dapat didayagunakan secara maksimal oleh per-

sahaan dengan cara menjual blotong tersebut kepada pihak lain sehingga menghasilkan pendapatan tambahan bagi perusahaan.

## 5. Kesimpulan

PG Tjoekir adalah salah satu perusahaan manufaktur di Jombang yang memproduksi gula membawa beberapa dampak positif terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Sayangnya, ada banyak dampak negatif juga disebabkan oleh kegiatan produksi di perusahaan. Dampak negatifnya adalah limbah dan emisi dalam bentuk padat, air dan gas yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar pabrik.

PG Tjoekir telah melakukan beberapa tindakan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Tindakan tersebut melakukan beberapa upaya untuk mengelola limbah dan emisi yang dihasilkan dari setiap stasiun dalam proses produksi. Ada 3 jenis limbah atau disebut output non-produk, yaitu ampas tebu, blotong dan tetes. Ampas tebu dari stasiun penggilingan akan diubah menjadi bahan pendukung untuk menghasilkan tenaga listrik. Blotong dari stasiun pemurnian akan diberikan gratis kepada petani tebu tanpa memberikan perawatan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah tetes dari sentrifugasi stasiun yang akan dijual kepada petani dengan menerapkan metode pembagian keuntungan.

Penerapan EMA di PG Tjoekir memberikan dua jenis informasi. Informasi pertama adalah PEMA yang memiliki tujuan untuk mengukur keseimbangan antara *input* dan *output* (produk dan *output* non-produk). PG Tjoekir berhasil mengklasifikasikan input dan output dari masing-masing stasiun. Analisa PEMA menunjukkan beberapa perbedaan dari pencatatan perusahaan yang terkait dengan limbah, yaitu ampas tebu dan tetes. PG Tjoekir hanya mencatat masukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan bukan jumlah yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan konservasi lingkungan sangat

butuh untuk ditingkatkan.

Analisis MEMA mengungkap berapa banyak biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh terkait dengan kegiatan konservasi. Sebagai dampak yang lebih baik, PG Tjoekir dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan manfaat limbah dan melakukan efisiensi biaya listrik.

PG Tjoekir belum membuat laporan biaya lingkungan. Pelaporan biaya ini sangat penting karena akan memberikan informasi yang lebih luas kepada manajemen dalam membuat keputusan terkait perlindungan lingkungan. PG Tjoekir dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap inovasi dan perubahan dengan membuat pengungkapan lingkungan (pelaporan biaya lingkungan).

#### **Daftar Rujukan**

- Ikhsan, Arfan. (2008). Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Ikhsan, Arfan. (2009). Akuntansi Manajemen Lingkungan. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- PGTjoekir (<http://www.jatimtimes.com/tak-tahan-bau-limbah-warga-demo-pg-djombang-baru>).
- Rossje. (2006). Akuntansi Lingkungan Suatu Perspektif.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Liananda, Hidayati Aras. 2017. *“Implementasi Akuntansi Lingkungan untuk Mengukur Dampak Bisnis dengan menggunakan EMA”*
- Nilasari. (2014). *“Analisis Implementasi Akuntansi Lingkungan untuk Pengelolaan Limbah”*
- Sudjana dan Azizah. (2012). *“Penerapan Akuntansi Lingkungan untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Perusahaan”*.
- Hansen, Don R. & Moen, Maryanne M. 2004. Akuntansi Manajemen Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat
- <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/855791-tarif-listrik-desember-2016-naik-ini-daftar-lengkapnya>



## Dukungan IFRS pada FDI dalam Peningkatan Kemakmuran Negara

Riesanti Edie Wijaya

Universitas Surabaya

riesanti@staff.ubaya.ac.id

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.87

### Informasi Artikel:

Tanggal masuk 2018-08-20

Tanggal revisi 2018-09-03

Tanggal diterima 2018-09-30

### Keywords:

IFRS, FDI, GDP, reporting quality, unemployment.

### Abstract

*The purpose of this study is to investigate the role of IFRS application in economic welfare. Based on macroeconomics data from World Bank, the regression analysis was used to observe the relationship between IFRS and FDI. The IFRS fail to entice FDI flow in Indonesia. Unfortunately, the financial reporting quality has not increased yet by IFRS application. Furthermore, IFRS fail to lessen the risk of doing business in Indonesia. FDI investments are not intended for transferring technology and knowledge. To sum up, FDI potentially become a burden for the economic welfare.*

### Kata Kunci :

IFRS, FDI, kualitas pelaporan, pengangguran

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran aplikasi IFRS dalam kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan data makroekonomi dari Bank Dunia, analisis regresi digunakan untuk mengamati hubungan antara IFRS dan FDI. IFRS gagal untuk memikat aliran FDI di Indonesia. Sayangnya, kualitas pelaporan keuangan belum meningkat dengan aplikasi IFRS. Selanjutnya, IFRS gagal mengurangi risiko berbisnis di Indonesia. Investasi FDI tidak dimaksudkan untuk mentransfer teknologi dan pengetahuan. Singkatnya, FDI berpotensi menjadi beban bagi kesejahteraan ekonomi.

### 1. PENDAHULUAN

Seorang investor membutuhkan informasi sebelum membuat keputusan bisnis. Salah satu informasi yang dibutuhkan para investor ada dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan akan mengidentifikasi, mencatat, meringkas dan melaporkan berbagai transaksi

ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Dengan membaca laporan keuangan, para pengguna akan melihat bagaimana fenomena keuangan terjadi dalam perusahaan. Informasi keuangan pada laporan bersifat umum. Artinya, laporan keuangan tidak dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan sekelompok pengguna tertentu.

Laporan keuangan yang baik seharusnya bisa dibandingkan dengan lainnya. Perbandingan laporan keuangan memiliki berbagai kemanfaatan mulai dari memperendah kos, mendapatkan informasi, peningkatan kuantitas dan kualitas informasi relevan yang dibutuhkan para pembuat keputusan bisnis (De Franco, Kothari, & Verdi, 2011). Agar bisa diperbandingkan antara satu dengan lainnya, maka laporan harus dibuat dengan standar keuangan akuntansi. Standar akuntansi akan memberikan panduan pelaksanaan prinsip untuk membuat pelaporan keuangan perusahaan (Epstein & Jermakowicz, 2010). Setiap negara memiliki standar pelaporan keuangan sendiri. Perbedaan standar pelaporan antar negara membuat format dan muatan laporan keuangan menjadi berbeda antar negara. Perbedaan tersebut melemahkan daya komparabilitas laporan keuangan (Subramanyam, 2014). Sedangkan, harmonisasi standar akan menguatkan daya komparabilitas antar negara (Wang, 2014)

Arus globalisasi menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui aliran dana dari satu negara ke negara lainnya (Dreher, 2006). Para calon investor menggunakan berbagai informasi sebelum melakukan keputusan bisnis. Laporan keuangan merupakan salah satu gudang penyedia informasi keuangan. Namun, perbedaan standar akuntansi antar negara membuat para investor membutuhkan biaya lebih banyak karena harus mengubah sesuai dengan format dan bahasa sesuai dengan yang biasa mereka pakai (Ball, 2006). Proses konversi laporan keuangan sesuai dengan standar asal calon investor membutuhkan waktu, sehingga dipandang menyulitkan. Untuk itu, pemerintah harus turun tangan untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka harmonisasi standar internasional (Arnold, 2012). Campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki daya komparabilitas laporan keuangan entitas. Pengadopsian IFRS secara penuh diharapkan juga bisa memperbaiki hubungan bilateral antar negara yang berpotensi mendorong penanaman modal asing di dalam negeri (Arnold, 2012). Bagi negara berkembang, keberadaan aliran masuk modal asing sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas entitas domestik negeri. Untuk itu, penerapan IFRS sebagai langkah harmonisasi standar berpeluang meningkatkan *Foreign Direct Investment (FDI)* (Gordon, Loeb, & Zhu, 2012). Di Indonesia, otoritas berwenang menetapkan standar adalah Dewan Standar Ikatan

Akuntan Indonesia (DSAK). DSAK berperan menyusun standar akuntansi keuangan untuk entitas privat di Indonesia. Di Indonesia, DSAK bertugas melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menjawab pertanyaan terkait standar dari pemerintah, asosiasi, dan lembaga luar negeri (IAI Global). Untuk menghadapi era globalisasi yang telah digambarkan di atas, pemerintah Indonesia melalui DSAK menuntut adanya harmonisasi standar akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang dapat digunakan oleh *stakeholder* atau pengguna laporan keuangan. Jika tidak ada harmonisasi standar akuntansi, investor di berbagai negara akan mengalami kesulitan mendapatkan informasi yang dapat diandalkan. Misalnya investor Inggris yang mengadopsi IFRS sulit membaca laporan keuangan perusahaan di Indonesia yang masih mengadopsi GAAP. Implementasi dari harmonisasi ini adalah pemerintah melalui DSAK menyetujui adaptasi SAK mengikuti SAK yang telah ditetapkan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) yang disebut dengan IFRS (*International Financial Reporting Standard*) yang sebenarnya diadopsi dari IAS (*International Accounting Standard*).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran aplikasi IFRS dalam kesejahteraan ekonomi melalui FDI. IFRS adalah standar yang mengatur pelaporan keuangan untuk perusahaan privat. IFRS diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Harapannya, peningkatan kualitas pelaporan akan direspon baik oleh para investor asing dalam bentuk FDI. Peningkatan FDI diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, penelitian ini memberikan cakrawala baru tentang bagaimana kemampuan ekonomi mikro [penerapan IFRS] dalam mempengaruhi ekonomi makro [kemakmuran] di Indonesia, sehingga penelitian ini menutup celah yang memisahkan keduanya.

## 2. KAJIAN TEORI

Kehadiran IFRS merupakan suatu kelanjutan dari IAS yang disusun oleh International Accounting Standard Committee (IASC) pada tahun 1973. IASC sendiri sebenarnya merupakan suatu organisasi yang beranggotakan badan ataupun organisasi profesi dari berbagai negara, antara lain Australia, Kanada, Perancis,

Jerman, Jepang, Meksiko, dan Belanda (IAI, 2009). Adanya kemunculan dari IFRS dirasa merupakan suatu kebutuhan bagi Indonesia untuk memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia bagi para pemain asing. Adanya percepatan penerapan standar akuntansi global oleh *International Accounting Standard Boards* (IASB) sebenarnya ditujukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan adanya *agency cost* yang mungkin dikeluarkan oleh para pemain asing untuk bermain di negara lain. Perjalanan standar di Indonesia sebenarnya merupakan suatu rangkaian panjang. Bermula dari keberadaan standar gaya Belanda yang disebut *Sound Business Practice* yang berlangsung sampai dengan tahun 1995 (IAI, 2009). Selanjutnya, adanya Prinsip akuntansi yang menggantikan standar ala Belanda pada tahun 1974. Standar ini mengikuti standar akuntansi Amerika yang biasa dikenal dengan GAAP. Lebih lanjut, Indonesia tampak mulai berpaling dari GAAP dengan mulai mengacu pada *International Accounting Standards Comitee* (IASC). Bahkan, pada tahun 1994, Indonesia mulai mengikuti IASC (IFRS) (IAI, 2009).

*International Financial Reporting Standard* (IFRS) mulai diadopsi penuh di Indonesia pada tahun 2012 sesuai imbauan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapan IFRS ini diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan *go public*. Standar ini dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) yang sebelumnya bernama IASC. Penerbitan IFRS dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurang transparansinya laporan keuangan (Wiyani, 2012). Dari uraian ini terkesan bahwa standar keuangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh berbagai negara kurang menjamin adanya transparansi atas laporan keuangan yang disajikan, dan arsitektur keuangan global saat ini masih dirasa kurang kokoh, sehingga IFRS ini diperlukan oleh banyak negara di dunia. Tetapi apakah memang demikian kenyataannya? IFRS disinyalir bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penerapan IFRS akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan berupa transparansi dan ketepatan waktu pengungkapan pengakuan kerugian sehingga berpotensi menurunkan *agency cost* serta meningkatkan tata kelola perusahaan (Ball, 2006). Di samping itu, penerapan IFRS akan mengurangi risiko informasi (*information risk*) antar negara (Márquez-Ramos, 2011).

IFRS juga berpotensi meningkatkan image baik para investor pada negara yang menerapkan IFRS secara penuh dibandingkan parsial (Kim & Shi, 2012). Lebih dari itu, penurunan asimetri informasi akibat penerapan IFRS telah meningkatkan aliran dana asing [FDI] di beberapa negara Eropa (Márquez-Ramos, 2011). Namun, beberapa fakta empiris menunjukkan penerapan IFRS hanyalah merupakan keputusan politik semata. Sebagian besar direktur perusahaan di Romania menyatakan hanya sedikit kemanfaatan yang mereka dapatkan dari penerapan IFRS (Ionas dkk., 2007). Bahkan, penerapan IFRS tidak bisa dimanfaatkan untuk menggenjot aliran dana asing [FDI] masuk pada negara-negara Afrika (Nnadi & Soobaroyen, 2015). Sementara di Indonesia, penerapan IFRS ditujukan agar akuntan lokal dapat sejajar dengan lain di dunia dan keanggotaan [bagian negara G-20] tidak tergeser (Hamidah, 2014). Kecenderungannya, pengaplikasian IFRS di berbagai negara berkembang ditujukan untuk mendapatkan kucuran dana Bank Dunia (Gordon dkk., 2012). Bahkan, Hopper dkk. (2017) meyakinkan bahwa IFRS merupakan perwujudan pendirian merupakan salah satu bentuk upaya mendirikan kerajaan neo-liberalisme di beberapa negara lemah secara ekonomi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan paradigma positif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh IFRS dalam meningkatkan perekonomian bangsa melalui peningkatan FDI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Bank Dunia sepanjang tahun 1981-2017. Data untuk IFRS akan dikelompokkan dengan mengacu pada Maradona and Chand (2018). Penerapan IFRS akan dikelompokkan menjadi empat kelompok besar berdasarkan fase penerapan: (1) IFRS belum diterapkan pada tahun sebelum 1991, (2) fase adopsi antara 1991-2007, (3) fase kedua tahun 2008-2012, (4) fase adopsi penuh tahun 2013-2018. Selain menganalisis pengaruh IFRS terhadap FDI, peneliti juga mempelajari kemampuan FDI dalam meningkatkan kemampuan kemakmuran bangsa. Peneliti menggunakan beberapa variabel control antara lain: pengendalian korupsi, stabilitas politik, upah minimum rata-rata nasional, populasi, angkatan kerja untuk lebih memahami fenomena FDI. Peningkatan kemakmuran ditinjau dari *Gross Domestik Product* (GDP), transfer teknologi,

penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia. Pada beberapa bagian pembahasan, peneliti menggunakan data makro Thailand dan Vietnam sebagai negara yang tidak mewajibkan penerapan standar internasional bagi perusahaan yang listing di Bursa.

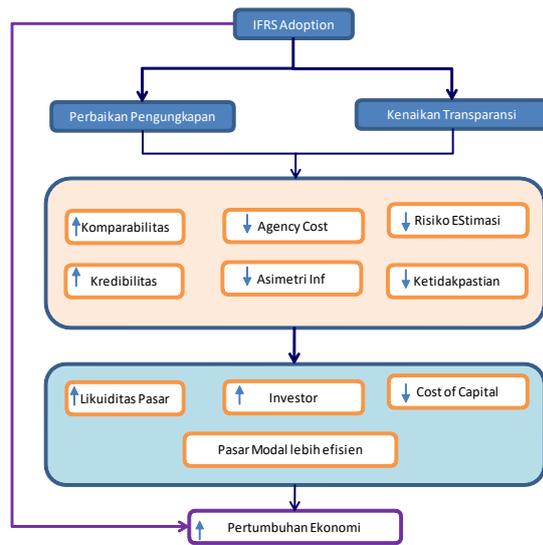
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaung IAS (*International Accounting Standards*) sebagai cikal bakal IFRS sudah mulai diterapkan pada tahun 1994 di Indonesia (Aprilicia, 2014). IFRS menawarkan angin surga bagi para penggunanya atas semua kemanfaatan yang ditawarkan olehnya. Untuk itu, tidak khayal, bila menteri keuangan Sri Mulyani saat awal pengadopsian berargumen bahwa pengadopsian IFRS merupakan suatu kebutuhan bagi Indonesia agar mendapat pengakuan maksimal dari komunitas internasional penganut IFRS (Kompas, 2010). Sebagai regulator, menteri keuangan serta para legislator tersihir dengan IFRS seperti yang dikemukakan oleh Hamidah (2013). Menilik pernyataan menteri keuangan saat itu, maka terkesan janggal bagi kita untuk tidak mempertanyakan mengapa kita harus melakukan itu. Dimana, kita tanpa sadar tersihir oleh kemolekan dan kecanggihan IFRS.

IFRS menawarkan upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi bagi para pengadopsinya yang diskemakan pada Bagan 1. Bagan 1 menunjukkan cara kerja IFRS dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomis suatu negara. Pada bagan 1 nampak bahwa IFRS akan memperbaiki kualitas pengungkapan serta transparansi pelaporan perusahaan. Pengungkapan yang baik akan menampilkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak berkepentingan dengan perusahaan bersangkutan.

Grafik 2 menunjukkan bahwa pengungkapan informasi untuk pemegang saham minoritas tidak berubah pada masa-masa penerapan IFRS. Luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan yang tercatat dalam bursa masih tetap sama sebelum dan setelah pengungkapan. Pada bagan juga memperlihatkan luas pengungkapan negara Vietnam dan negara Thailand. Kedua negara tersebut tidak mengharuskan perusahaan yang listing di bursa untuk menerapkan IFRS. Luas pengungkapan Indonesia memang jauh lebih baik dibandingkan Vietnam, tetapi sama dengan Thailand.

IFRS sebenarnya lebih ditujukan untuk menarik dana maupun bantuan asing ke Indonesia.



Bagan 1. Dampak Adopsi IFRS

Berbagai bentuk aliran dana dan bantuan asing masih sangat dibutuhkan oleh negara berkembang untuk menumbuhkan perekonomian mereka (Nwaogu & Ryan, 2015). Untuk itu, pemerintah mengupayakan penerapan IFRS dalam paket kebijakan untuk mendorong dana maupun bantuan asing di Indonesia. Sebagaimana, paket kebijakan ternyata merupakan resep ampuh meningkatkan FDI pada beberapa negara berkembang (Sauvant & Mallampally, 2015).

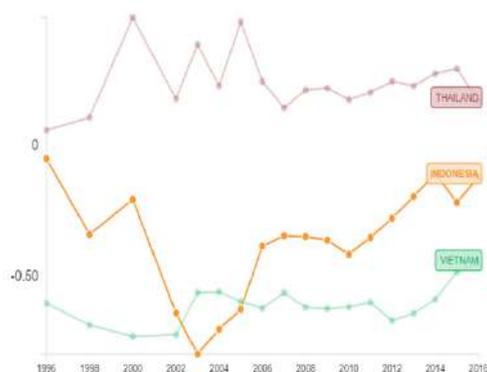
Tabel 1 menunjukkan bagaimana peranan IFRS dalam meningkatkan FDI di Indonesia dari tahun 1996-2016. Tabel 1 menunjukkan probabilitas IFRS sebesar 0,8067, artinya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi FDI. Hasilnya, stabilitas politik (PS) merupakan satu-satunya variabel yang mampu meningkatkan FDI di Indonesia. Padahal, IFRS merupakan cara yang digadagadag mampu meningkatkan FDI di Indonesia.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.46E+11	1.10E+11	-1.327456	0.2091
IFRS	-1.10E+09	4.39E+09	-0.250174	0.8067
CC	7829625	2.09E+08	0.037474	0.9707
IMP	1.46E+08	2.25E+08	0.647735	0.5294
LF	-1.77E+03	1.49E+03	-1.191178	0.2566
POP	1479.852	1203.945	1.229169	0.2426
UMR	-6674.973	13953.92	-0.478358	6.41E-01
PS	6.16E+08	2.94E+08	2.091167	5.85E-02

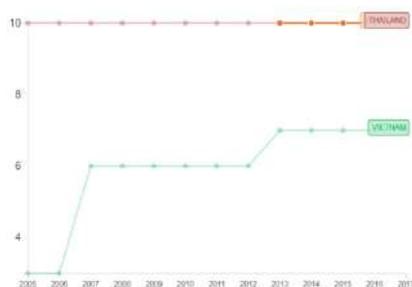
Tabel 1: Peranan IFRS dalam Peningkatan FDI

IFRS memang secara langsung tidak mampu mempengaruhi FDI di Indonesia. Namun,

IFRS setidaknya mampu memengaruhi persepsi investor asing dalam mempertimbangkan segala upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan sektor privat tampak pada Grafik 1. Dari grafik, persepsi atas kualitas dukungan pemerintah atas sektor swasta melalui regulasi nampak meningkat. Angka tersebut memberikan bukti empiris bahwa dukungan pemerintah atas penerapan IFRS ditanggapi positif oleh investor asing sepanjang tahun 1981-2018. Grafik menunjukkan kenaikan persepsi dunia bisnis atas upaya pemerintah mulai tahun 2003. Persepsi dunia usaha atas pemerintah Indonesia masih di atas Vietnam, namun masih jauh lebih rendah daripada Thailand.



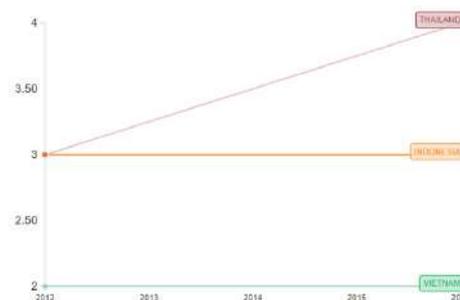
Grafik 1: Kualitas Regulator



Grafik 2: Perlindungan Investor Minoritas: Luas Pengungkapan [ Index]

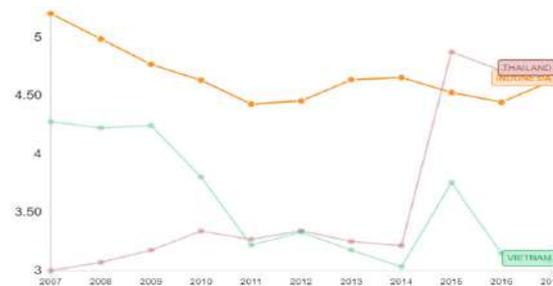
IFRS diharapkan mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan para emiten yang terdaftar di Bursa. Pelaporan dapat dikatakan transparan apabila mampu menampilkan berbagai informasi ekonomis dalam laporan keuangan (Barth & Schipper, 2008). Bagan 3 menampilkan transparansi atas pelaporan keuangan pada perusahaan yang listing di bursa dengan memberikan informasi lebih banyak kepada pemegang saham minoritas. Walau bagan 3 menunjukkan derajat transparansi Indonesia

lebih baik daripada Vietnam. Namun, penggunaan IFRS terlihat tidak mampu meningkatkan derajat transparansi pelaporan keuangan. Bahkan, derajat transparansi Thailand cenderung naik, walaupun tidak mewajibkan penerapan IFRS. Pengadopsian tersebut bukan merupakan jaminan akan perbaikan tingkat relevansi laporan keuangan, malah mungkin memperburuk relevansi kandungan informasi, seperti pengalaman di Spanyol (Callao dkk., 2007).



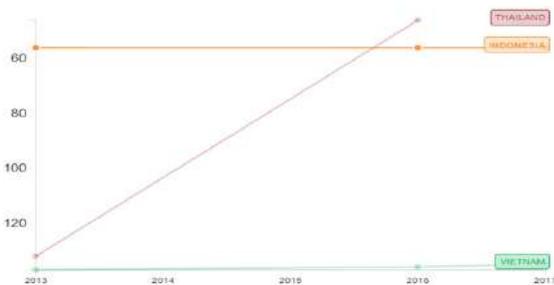
Grafik 3: Transparansi Informasi pada Perusahaan yang Terdaftar Bursa

IFRS mengupayakan untuk memperbaiki akuntansi keuangan berbagai negara dengan melakukan harmonisasi standar. Melalui pengukuran dan pengungkapan kos yang diatur dalam IFRS diyakini akan meningkatkan akuntabilitas keuangan (Barth, 2015). Bagan 4 mengilustrasikan derajat akuntabilitas keuangan sebelum dan setelah penerapan IFRS. Pada awal tahun 2007, derajat akuntabilitas Indonesia mengalami penurunan tajam. Sejak tahun 2012, derajat akuntabilitas mulai mengalami kenaikan perlahan. Dari bagan, derajat akuntabilitas Indonesia cenderung lebih tinggi daripada Thailand dan Vietnam. Bila dikaitkan dengan penerapan IFRS yang mulai diadopsi penuh sejak 2012, maka kenaikan derajat akuntabilitas mungkin terjadi karena pengadopsian standar tersebut.



Grafik 4: Indeks Akuntabilitas

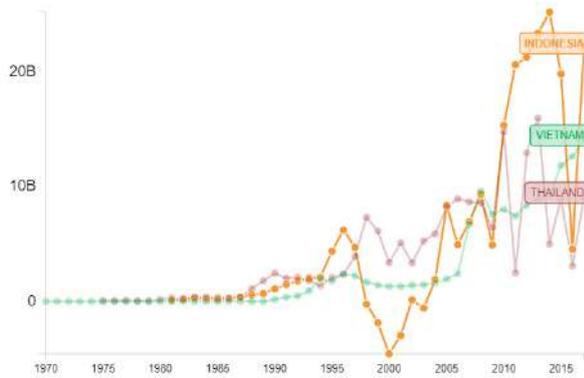
IFRS mempunyai kemampuan untuk menurunkan berbagai macam ketidakpastian di antaranya *country risk* (Bradbury, 2010). Kepatuhan atas penerapan standar internasional merupakan salah satu nilai yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko negara (Ramady, 2013, p. 33). *Country risk* berpeluang memengaruhi minat para investor untuk berinvestasi pada suatu negara tujuan. Bagan 5 menunjukkan bagaimana kecenderungan *country risk* di Indonesia, Thailand dan Vietnam. *Country risk* Indonesia tidak bergeser walaupun telah diterapkannya IFRS. Grafik 3 menunjukkan kemampuan Vietnam dalam mempertahankan peringkat *country risk* yang rendah, walau negara tersebut tidak mewajibkan penerapan IFRS bagi para emiten di bursa saham mereka.



Grafik 5: Country Credit Rating, Value

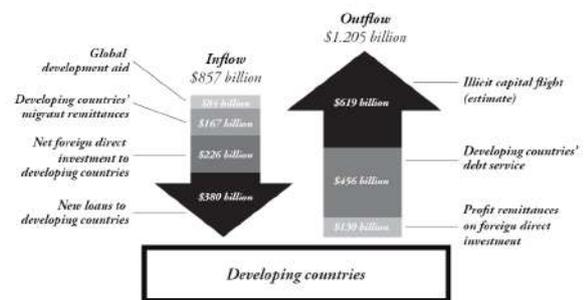
Internasionalisasi standar pelaporan keuangan ternyata tidak mendapatkan ruang untuk menurunkan *country risk* di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya harmonisasi standar internasional tidak cukup kuat memengaruhi pandangan calon investor dunia atas lingkungan bisnis di Indonesia. Jadi, kemungkinan ada motif lain dibalik adanya pengadopsian standar internasional. Salah satu alasan pengadopsian adalah keinginan untuk mendapatkan dana dari Bank Dunia (Gordon, 2012). Untuk itu, tidak ada pilihan yang mungkin bisa dipilih oleh pemerintah selain mengikuti kehendak si empunya uang yaitu para investor dan berbagai lembaga donor internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF), dengan harapan akan mengalimnya dana mereka ke negara tertekan. Terlebih, keikutsertaan pada berbagai perjanjian perdagangan seperti GATT/WTO semakin menekan untuk melakukan berbagai hal agar menarik FDI guna menaikkan pertumbuhan ekonomi (Büthe dan Milner, 2008). Di Indonesia, penerimaan regulator terhadap IFRS adalah sebuah bentuk kompromi

(Efferin & Rudiawarni, 2014). Negosiasi penggunaan standar internasional dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan regulator dan terlaksananya agenda penerapan IFRS.



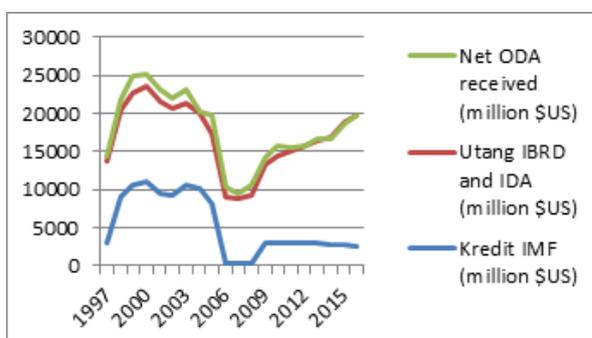
Grafik 6: Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US\$)

Pada awal perkembangannya, IFRS memang diskenarioikan untuk meningkatkan aliran dana luar untuk masuk di Indonesia. Grafik 6 menampakkan perkembangan FDI tari tahun ke tahun. FDI dari tahun awal data terlihat semakin lama semakin naik. Puncak kenaikan pertama terjadi di tahun 1996. Selanjutnya, dana asing yang masuk ke Indonesia lebih kecil daripada dana yang masuk sejak tahun 1998 sampai dengan 2001. Kondisi tersebut terjadi saat terjadi krisis moneter berkepanjangan di Indonesia, sehingga menurunkan minat para investor asing berinvestasi di Indonesia. Tahun 2002 merupakan tahun awal peningkatan FDI bersih di Indonesia. Aliran FDI bersih semakin kencang di Indonesia sepanjang 2006-2017. Kemampuan Indonesia dalam menarik FDI lebih unggul dibandingkan Thailand dan Vietnam yang tidak mewajibkan penerapan IFRS. Namun, peningkatan FDI di Indonesia juga membawa konsekuensi yang tidak dibayar murah oleh penerimanya.



Bagan 2. Illicit Capital Flight

Angan-angan yang ditawarkan dengan pengadopsian IFRS hanya tinggal bilamana pengadopsian IFRS tidak menunjukkan peningkatan dana investasi ke dalam negeri bagi negara berkembang, sebaliknya malah menurunkan aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI), serta nilai ekspor dan impor (Lasmin, 2011). Bagan 2 menunjukkan bagaimana negara sedang berkembang menerima konsekuensi penerimaan aliran dana asing. Bagan tersebut menunjukkan komposisi aliran masuk dan keluar yang diterima dan dikeluarkan negara-negara berkembang. Dari bagan, negara-negara berkembang harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk membayar layanan utang daripada yang diterima dari para penanam modal asing.

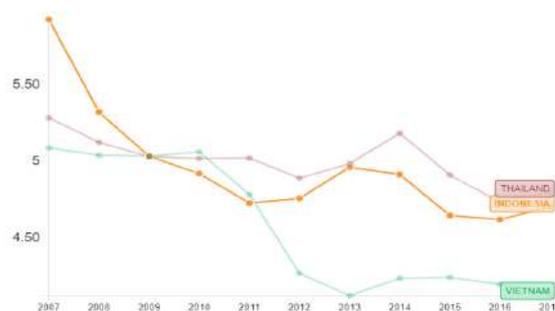


Grafik 7: Utang dan Bantuan dari Lembaga Asing

Kepatuhan Indonesia atas penerapan IFRS tidak terlepas dari campur tangan Bank Dunia, seperti halnya yang dialami oleh negara-negara Afrika (Fröberg dan Waris, 2011). Kepatuhan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan arisan berbunga dari pihak donor kepada kita. Arisan berbunga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Di beberapa negara, keberadaan pendanaan langsung (*Foreign Direct Investment/ FDI*) memang menjadi pendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Namun, ada hal yang harus diingat yaitu FDI tidak bisa secara otomatis bisa meningkatkan kinerja ekonomi negara penerima dana segar tersebut (Li dan Liu, 2005). Kenaikan utang memberikan beban berat bagi negara kita ini. Grafik 7 menunjukkan peningkatan utang IBRD dan IDA, serta ODA yang cukup signifikan sejak tahun 2009. ODA sebenarnya ditujukan untuk mengentaskan negara berstatus LDSCs (Biswas, 2018). Peningkatan ODA menandakan ketergantungan Indonesia masih sangat tinggi pada bantuan lembaga internasional. Sementara,

utang yang didanai oleh IMF cenderung mengalami penurunan. Peningkatan FDI meningkatkan kebutuhan dana untuk membayar bunga bagi pemilik modal. Bilamana apa yang kita dapatkan lebih kecil daripada yang diterima, maka negara penerima sebenarnya membayar *illicit capital flight* lebih banyak (Fröberg dan Waris, 2011). Penerapan IFRS dilakukan melalui berbagai fase pertumbuhan untuk menjadi penerapan penuh. Kualitas penerapan IFRS di Indonesia diharapkan akan meningkat setiap tahun dengan peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan. Peningkatan akuntabilitas ternyata ditanggapi positif oleh pemberi bantuan ataupun pinjaman dari lembaga asing.

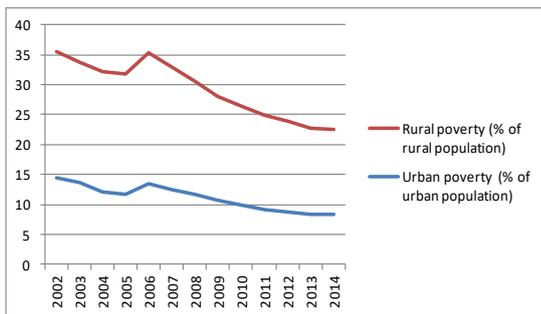
Ada beberapa argument yang menjadikan FDI dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan negara dengan cara memosisikan diri sebagai dana talangan untuk perluasan ekonomi (Mencinger, 2003). Disamping itu, FDI berpotensi meningkatkan transfer teknologi negara maju kepada negara penerima (Alfaro & Johnson, 2012). Transfer teknologi dan inovasi local menjadikan China dan India berhasil mengembangkan teknologi hijau (Lema & Lema, 2012). Di Indonesia, Suyanto and Salim (2013) menemukan tidak adanya kemanfaatan teknologi pada industry farmasi. Perusahaan farmasi asing tetap lebih efisien dibandingkan lokal, sehingga berkemampuan merusak pangsa pasar kita. Grafik 8 menunjukkan hubungan antara FDI dan transfer teknologi di Indonesia, Thailand dan Vietnam. Pada awal perkembangan, kesediaan investor asing untuk transfer teknologi lebih besar daripada kedua negara. Namun pada perkembangannya, kesediaan transfer teknologi semakin menurun. Bagan ini menunjukkan bahwa FDI tidak otomatis menyediakan transfer teknologi pada negara tujuan.



Grafik 8: FDI dan Transfer Teknologi

Aliran dana dari FDI juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di negara tujuan.

Kehadiran FDI diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia termasuk buruh (Nguyen, 2017). Namun, kemampuan FDI dalam menurunkan tingkat pengangguran tidak sama antar negara. FDI tidak mampu menurunkan tingkat pengangguran di Turki (Aktar & Ozturk, 2009). Sedangkan, FDI mengurangi angka pengangguran secara signifikan di Malaysia (Irfan dkk., 2016) serta Vietnam (Nguyen, 2017). Berdasarkan Grafik 9, pengangguran di Indonesia mencapai puncak kenaikan pada tahun 2005, selanjutnya tingkat pengangguran menurun.



**Grafik 9: Pengangguran di Desa dan Kota**

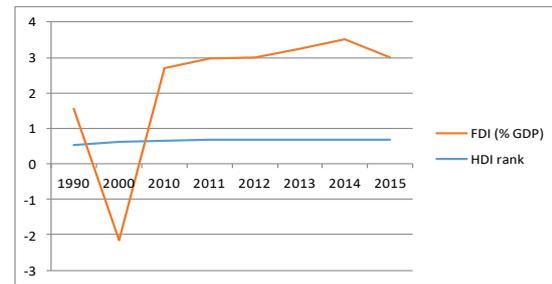
Pengangguran memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Apakah sekiranya FDI mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan tabel 2, FDI tidak cukup kuat menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Bahkan, bila dilihat arah koefisiennya. Kenaikan FDI cenderung akan menaikkan angka pengangguran walaupun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa FDI tidak dimanfaatkan untuk industri yang padat tenaga kerja, sehingga tidak memberikan kontribusi pada penurunan angka pengangguran.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.584689	0.362158	15.42057	0
FDINET	7.60E-11	4.49E-11	1.694416	0.1026

**Tabel 2: Hubungan antara FDI dan Pengangguran**

Kemakmuran suatu negara juga didasarkan pada kualitas manusia yang diukur oleh indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index*. Bagi negara berkembang, kehadiran FDI diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak peningkatan HDI (Colen, Maertens, & Swinnen, 2009) dengan menyediakan dana untuk pengembangan industri.

Grafik 10 menunjukkan tidak meningkatnya HDI di Indonesia dalam tahun observasi. Nilai FDI cenderung naik dari tahun ke tahun. Namun, peringkat HDI tidak banyak mengalami perubahan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa negara pendana tidak berminat untuk menurunkan ketergantungan Indonesia. Di negara berkembang, FDI akan berhasil bilamana negara tidak membiarkan investor asing memasuki semua sektor industri untuk melindungi kepentingan domestik serta tingkat korupsi yang rendah (Reiter & Steensma, 2010).

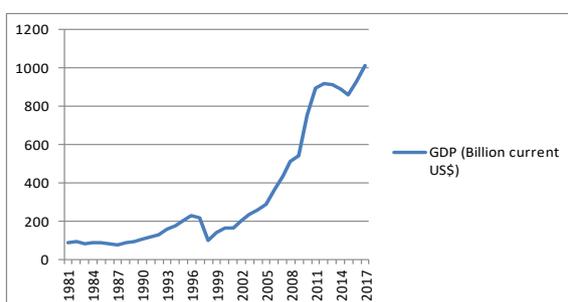


**Grafik 10: FDI dan HDI**

FDI sebenarnya hanya merupakan pendorong. Sebagai pendorong, IFRS memerlukan kondisi kondusif agar berjalan optimal, yaitu adanya *human capital* yang kuat pada suatu negara penerima dana tersebut serta kesenjangan teknologi yang tidak seberapa besar, apabila kondisi tersebut tidak tersedia, maka kemungkinan yang terjadi malah sebaliknya (Borenszteina dkk., 1998; Li dan Liu, 2005). Selanjutnya, bagi negara-negara sedang berkembang, FDI hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara penerima dengan syarat ada ketetapan pemerintah yang membatasi investor asing untuk memasuki sektor-sektor tertentu (Reiter dan Steensma, 2010), bila tidak ada pembatasan, maka kehadiran FDI akan berpotensi menggerus produk-produk lokal (Alfaro dkk., 2010). Lain dengan negara maju, FDI cukup kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan kedua faktor tersebut (Alfaro dkk., 2010).

Lebih lanjut, tingkat korupsi juga tidak bisa dipandang sebelah mata untuk berjalannya FDI. Sebagaimana Reiter dan Steensma (2010) membuktikan bahwa FDI berhubungan positif dengan tingkat korupsi suatu negara. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Tingkat persepsi korupsi suatu negara umumnya dinilai dengan *Corruption Perception Index* (CPI) yang mengukur tingkat persepsi korupsi pada

birokrasi pemerintahan serta politisi suatu negara. Menurut *transparency international org.*, tingkat persepsi korupsi Indonesia mengalami perbaikan walaupun tidak drastis, dari 32 (2012), 32 (2013), menjadi 34 (2014). Skor semakin tinggi menunjukkan semakin bersihnya suatu negara atas tindak korupsi, menurut skala tersebut ada 10 tingkatan dari mulai terkorup (0-0) sampai dengan sangat bersih dari tindak korupsi (90-100). Walaupun masih jauh untuk menuju bersih, namun setidaknya ada perbaikan.



Grafik 11: GDP Indonesia

FDI bisa dikatakan memakmurkan bangsa penerima bilamana mampu meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) negara tujuan. Grafik 11 menunjukkan peningkatan GDP Indonesia dari tahun ke tahun. Bagi negara berkembang, FDI merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi penggerak perekonomian (Sengupta & Puri, 2018). Berdasarkan olah data sepanjang tahun 1981-2017 yang nampak di tabel 3, FDI berpengaruh signifikan negatif terhadap GDP  $p$  value sebesar 0,000. Pada negara berkembang, FDI umumnya berkemampuan meningkatkan GDP dalam jangka panjang melalui transfer pengetahuan dan aplikasi teknologi baru (Hansen & Rand, 2006). Namun, bahasan sebelumnya menunjukkan FDI tidak berdampak pada transfer teknologi dan pembangunan manusia. Dengan demikian, peningkatan FDI lebih menjadi beban bagi kemakmuran rakyat Indonesia. FDI bukan merupakan senjata ampuh untuk meningkatkan kemaakmuran masyarakat.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.56E+11	2.56E+10	6.084002	0
FDINET	-49.5833	3.713813	-13.35105	0

Tabel 3: Hubungan FDI dengan GDP

## 5. KESIMPULAN

Konvergensi standar internasional dirasa menjadi kewajiban yang harus dijalankan, khususnya bagi negara berkembang. Internasionalisasi diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaporan bagi perusahaan di Indonesia. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan bisa diukur dengan perbaikan pengungkapan serta kenaikan transparansi. Penerapan IFRS telah meningkatkan persepsi dukungan pemerintah atas yang mendukung dunia bisnis. Namun, penerapan IFRS tidak banyak memengaruhi pengungkapan minoritas yang menggunakan pelaporan keuangan untuk kepentingan bisnis mereka. Kualitas pelaporan keuangan dalam bentuk transparansi juga tidak bergeser dari posisinya. Walaupun transparansi dan kualitas pengungkapan tidak bergeser. Pemain asing masih melihat adanya peningkatan akuntabilitas dari tahun ke tahun.

Internasionalisasi standar di Indonesia bukanlah penentu masuknya aliran FDI dan ODA di Indonesia. Stabilitas politik suatu negara merupakan kunci dari investasi asing. Pelaksanaan FDI ternyata juga tidak diringi dengan transfer teknologi dan pengetahuan. Tidak meningkatnya Indeks pembangunan manusia memberikan indikasi tidak adanya minat dari pemilik modal asing untuk membangun sumber daya manusia di negara penerima. Sementara, tingkat pengangguran juga belum berhasil diturunkan dengan bantuan FDI. Penurunan pengangguran juga tidak berubah dengan naiknya aliran FDI. Berdasar data, keberadaan FDI malah menjadi beban bagi kemakmuran masyarakat. Akhirnya, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa FDI yang selama ini menjadi alasan konvergensi standar akuntansi keuangan di Indonesia terbukti malah menjadi beban bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aktar, I., & Ozturk, L. (2009). Can unemployment be cured by economic growth and foreign direct investment in Turkey. *International Research Journal of Finance and Economics*, 27(2009), 204-211.
- Alfaro, L., & Johnson, M. (2012). Foreign direct investment and growth *The evidence and impact of financial globalization* (pp. 299-309): Elsevier.
- Arnold, P. J. (2012). The political economy of

- financial harmonization: The East Asian financial crisis and the rise of international accounting standards. *Accounting, Organizations and Society*, 37(6), 361-381.
- Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors. *Accounting and Business Research*, 36(sup1), 5-27.
- Barth, M. E. (2015). Financial accounting research, practice, and financial accountability. *Abacus*, 51(4), 499-510.
- Barth, M. E., & Schipper, K. (2008). Financial reporting transparency. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 23(2), 173-190.
- Biswas, R. (2018). The Least Developed Countries: Opportunities and Challenges *Emerging Markets Megatrends* (pp. 167-186): Springer.
- Bradbury, M. E. (2010). Commentary: discount rates in disarray—evidence on flawed goodwill impairment testing. *Australian Accounting Review*, 20(3), 313-316.
- Colen, L., Maertens, M., & Swinnen, J. (2009). Foreign direct investment as an engine for economic growth and human development: a review of the arguments and empirical evidence. *Hum. Rts. & Int'l Legal Discourse*, 3, 177.
- De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability. *Journal of Accounting Research*, 49(4), 895-931.
- Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. *Applied economics*, 38(10), 1091-1110.
- Efferin, S., & Rudiawarni, F. A. (2014). Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia Dalam Adopsi IFRS: Tinjauan Aspek Kepentingan, Bahasa, Dan Budaya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 138-164.
- Epstein, B. J., & Jermakowicz, E. K. (2010). *WILEY Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2010*: John Wiley & Sons.
- Gordon, L. A., Loeb, M. P., & Zhu, W. (2012). The impact of IFRS adoption on foreign direct investment. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(4), 374-398.
- Hamidah. (2014). *Kebijakan Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia dalam Perspektif Ekologi Akuntansi*. (Doctoral Degree (unpublish)), Brawijaya University, Malang.
- Hansen, H., & Rand, J. (2006). On the causal links between FDI and growth in developing countries. *World Economy*, 29(1), 21-41.
- Hopper, T., Lassou, P., & Soobaroyen, T. (2017). Globalisation, accounting and developing countries. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 125-148.
- Ionas, cu, I., Ionas, cu, M., Olimid, L., & Artemisa Calu, D. (2007). An empirical evaluation of the costs of harmonizing Romanian accounting with international regulations (EU Directives and IAS/IFRS). *Accounting in Europe*, 4(2), 169-206.
- Irpan, H. M., Saad, R. M., Nor, A. H. S. M., Noor, A. H. M., & Ibrahim, N. (2016). *Impact of foreign direct investment on the unemployment rate in Malaysia*. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series.
- Kim, J.-B., & Shi, H. (2012). IFRS reporting, firm-specific information flows, and institutional environments: International evidence. *Review of Accounting Studies*, 17(3), 474-517.
- Lema, R., & Lema, A. (2012). Technology transfer? The rise of China and India in green technology sectors. *Innovation and Development*, 2(1), 23-44.
- Maradona, A. F., & Chand, P. (2018). The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 30, 57-68.
- Márquez-Ramos, L. (2011). European accounting harmonization: Consequences of IFRS adoption on trade in goods and foreign direct investments. *Emerging markets finance and trade*, 47(sup4), 42-57.
- Mencinger, J. (2003). Does foreign direct investment always enhance economic growth? *Kyklos*, 56(4), 491-508.
- Nguyen, M. (2017). The Influence of FDI on an Economy As Overall in Vietnam (2006 – 2015).
- Nnadi, M., & Soobaroyen, T. (2015). International financial reporting standards and foreign direct investment: The case of

- Africa. *Advances in Accounting*, 31(2), 228-238.
- Nwaogu, U. G., & Ryan, M. J. (2015). FDI, foreign aid, remittance and economic growth in developing countries. *Review of Development Economics*, 19(1), 100-115.
- Ramady, M. A. (2013). *Political, economic and financial country risk*: Springer.
- Reiter, S. L., & Steensma, H. K. (2010). Human development and foreign direct investment in developing countries: the influence of FDI policy and corruption. *World development*, 38(12), 1678-1691.
- Sauvant, K. P., & Mallampally, P. (2015). Policy options for promoting foreign direct investment in the least developed countries. *Transnational Corporations Review*, 7(3), 237-268.
- Sengupta, P., & Puri, R. (2018). Exploration of Relationship between FDI and GDP: A Comparison between India and Its Neighbouring Countries. *Global Business Review*, 0972150918760026.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis* (Eleventh edition ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Suyanto, & Salim, R. (2013). Foreign direct investment spillovers and technical efficiency in the Indonesian pharmaceutical sector: firm level evidence. *Applied Economics*, 45(3), 383-395.
- Wang, C. (2014). Accounting standards harmonization and financial statement comparability: Evidence from transnational information transfer. *Journal of Accounting Research*, 52(4), 955-992.
- Wiyani, N. T. (2012). Standarisasi, Harmonisasi, dan Konvergensi IFRS. *Makalah Akuntansi*.



## Menelusuri Makna Keuntungan Di Balik Bertahannya Angkutan Umum “Pedesaan”

Indriani Ayu Rimadani, Achdiar Redy Setiawan, dan Muhammad Asim Asy’ari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura  
ayurimadani0@gmail.com

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.98

### Informasi Artikel:

Tanggal masuk 2018-09-12  
Tanggal revisi 2018-09-12  
Tanggal diterima 2018-09-30

### Abstract

*This study aims to explore the deep meaning of profits seen from rural transport drivers' point of view in Kamal, Bangkalan-Madura. This study uses qualitative research with transcendental phenomenology methods. The results indicate that profits as material are used to support the family needs and the cost of public transportation itself. Meanwhile, For the profits that are interpreted as a non-material form, namely inner satisfaction profits where they can help people who need transportation and spiritual profits by applying “flexible” cost. In spite of feeling anxiousness about their, they believe that will get more than what he gives to others.*

### Keywords:

*Profits;  
Rural Transportation  
Driver;  
Phenomenology;*

### Kata Kunci :

Keuntungan;  
Sopir Angkutan Pedesaan;  
Fenomenologi

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kesadaran dua informan secara mendalam mengenai makna keuntungan yang dilihat dari sudut pandang sopir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal, Bangkalan-Madura. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi transcendental. Hasil penelitian menunjukkan keuntungan dimaknai sebagai bentuk materi digunakan untuk menghidupi keluarganya serta biaya angkutan pedesaan itu sendiri. Keuntungan dimaknai sebagai bentuk non materi yaitu keuntungan kepuasan batin dengan merasa bahagia membantu para masyarakat yang membutuhkan transportasi dan keuntungan spiritual dengan menerapkan tarif “fleksibel” dan tidak pernah merasa rugi membantu setiap penumpangnya, beliau akan mendapatkan rezeki yang lebih dari apa yang diberikannya kepada orang lain.

### 1. Pendahuluan

Dalam perkembangan transportasi yang begitu cepat dan mudah saat ini, masih terdapat transportasi zaman dahulu yang masih bertahan hingga pada saat ini, transportasi itu adalah “Angkutan Pedesaan” yang disebut juga Angdes atau Angkudes.

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angkutan desa yang biasa masyarakat sekitar menyebutnya “Pedesaan”. Pada tahun 1985 “Pedesaan” beroperasi 24 angkutan yang berawal dari program Organda pemerintah dan kemudian menjadi milik pribadi. Trayek 24

angkutan pedesaan dari dulu hingga saat ini masih sama karena hal tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Pedesaan” melayani rute Pelabuhan Kamal ke Perumnas Kamal.

Dengan adanya pelabuhan penyeberangan tersebut, angkutan pedesaan merupakan salah satu transportasi yang terjangkau oleh penumpang atau masyarakat Kecamatan Kamal yang membutuhkan transportasi, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Setelah sebelumnya terdapat pelabuhan penyeberangan Kamal, pada pertengahan tahun 2009 dibangunlah Infrastruktur transportasi berupa jembatan yang sangat berpengaruh yaitu Jembatan Suramadu yang merupakan gerbang utama kedua bagi Pulau Madura, hal ini sebenarnya telah menjadi wacana sejak tahun 1970an yang digagas oleh mantan gubernur Jawa Timur yaitu bapak Mohammad Noer ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)). Namun, realisasinya baru dilaksanakan tahun 2003 dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2009 tepatnya pada bulan Juli.

Keberadaan jembatan Suramadu menyebabkan penyeberangan kapal ferry di pelabuhan Kamal mengalami penurunan jumlah penumpang hingga (ASDP) mengalami kerugian hingga Rp 150 juta setiap bulan. Walaupun merugi, PT ASDP tetap melayani masyarakat yang hendak menggunakan jasa transportasi laut. Meski diakui PT. ASDP biaya operasional kini disokong oleh ASDP Pusat ([www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)).

Operasi kapal yang sebelumnya empat buah dermaga Pelabuhan Kamal yang sebelumnya aktif, kini dua diantaranya dinonaktifkan (Akbarwati dan Ariastita,2013). Sehingga, pelabuhan Kamal yang dulunya aktif 24 jam sekarang hanya beroperasi dari pukul 06.00 sampai 21.00 Malam. Akibat hal itu, para penumpang mengalami keterlambatan sekitar dua jam untuk tiba di Surabaya yang hanya berjarak sekitar lima kilometer dari Pelabuhan Kamal. Puluhan kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Ujung, Surabaya, menumpuk di Pelabuhan Kamal ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Dengan banyaknya pengaruh seperti yang sudah dijelaskan di atas, pengaruh tersebut juga dirasakan oleh para angkutan umum salah satunya yaitu angkutan desa “Pedesaan” yang berada

di Kecamatan Kamal ini yang biasanya berada di sekitar Pelabuhan Kamal. Dampak tersebut dapat dilihat dari berkurangnya penumpang serta pendapatan atau keuntungan yang didapatkan oleh para Sopir angkutan pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelusuri makna dari keuntungan di balik bertahannya angkutan umum pedesaan.

## 2. Kajian Teori

Profesi sopir merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Pekerjaan ini akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selama masih terdapat masyarakat yang membutuhkan transportasi untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain. Maka profesi sopir angkutan pedesaan ini akan selalu ada.

Salah satu hal yang ingin diperoleh dari aktivitas usaha yaitu berupa keuntungan. Keuntungan seringkali dianggap sama dengan laba. Pendefinisian laba sebagai pendapatan (revenue) yang dikurangi beban (expense) merupakan pengertian laba secara akrual (Suwardjono,2014) atau lebih mudahnya pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya selama jangka waktu tertentu (Darmini,2011). Dalam perspektif masyarakat, laba yang dimaksud keuntungan biasanya dilihat dari kenaikan kemakmuran. Perubahan profil, kepemilikan dan kemewahan dianggap sebagai sebuah keuntungan. Konsep dari laba akuntansi sebenarnya berawal dari konsep laba ekonomi yang dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik (Sari,2014). Pada abad 20, Fisher, Lindahl, dan Hicks memberikan pandangan baru mengenai konsep laba ekonomi dengan tiga sifat, yaitu laba kepuasan batin (physical income), laba sebenarnya (real income), dan laba uang (money income) (Subiantoro dan Triyuwono, 2004).

Laba memiliki arti dalam banyak bahasa. Dalam PSAK no. 23 penghasilan diartikan sebagai (income) dan pendapatan adalah (revenue). Pendapatan (revenue) merupakan penghasilan (income) dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda

seperti penjualan, bunga, penghasilan jasa (fees), royalti, dividen dan sewa. Oleh karena itu, income merupakan perolehan hasil kegiatan operasional suatu organisasi, sedangkan revenue merupakan pendapatan yang diperoleh suatu organisasi dari kegiatan operasionalnya. Adapun istilah asing yang memiliki arti yang sama dengan laba yaitu profit dan earnings.

Earnings menurut Suwardjono (2014), lebih bermakna sebagai laba yang diakumulasi selama beberapa periode sehingga earnings lebih menunjuk laaba periode, Profit lebih mengarah pada pengertian awal laba, yaitu keuntungan. Berdasarkan pembahasan akan keuntungan terhadap laba lebih tampak dalam bentuk profit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia akuntansi, "Laba" bermakna pula sebagai sebuah "keuntungan". Dari hubungan tersebut maka dapat diartikan bahwa salah satu arti laba merupakan keuntungan. Namun, berbeda dari sudut pandang profesi sopir, belum tentu keuntungan sebagai laba.

Di Indonesia terdapat penelitian mengenai makna keuntungan, khususnya dari profesi, seperti penelitian Ubaidillah et., al (2013) meneliti makna keuntungan pedagang kaki lima di Bangsari Jepara yang menemukan tiga makna "keuntungan" yaitu "Keuntungan materi", "Keuntungan spiritual" dan "Keuntungan kepuasan batin". Senada dengan penelitian tersebut Asiyah et., al (2017) meneliti makna keuntungan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Ahmad Yani Singaraja yang menemukan dua makna keuntungan yaitu keuntungan materi dalam bentuk simpanan dan keuntungan spritual yang terlihat dari kemauan pedagang kaki lima untuk tetap melaksanakan perintah Allah SWT dalam bentuk sumbangan.

Penelitian selanjutnya terkait dengan profesi dokter yang dilakukan oleh Sari (2014) menemukan empat makna. Pertama, keuntungan dalam bentuk tabungan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi. Kedua, keuntungan dalam bentuk spiritual dalam tolong-menolong orang lain maupun mengembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, keuntungan merupakan martabat yang disegani oleh masyarakat. Keempat, keuntungan adalah kepuasan batin apabila pasien yang dirawatnya dapat sembuh.

Selain itu terdapat penelitian yang memak-

nai laba suatu institusi yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyiyah Malang yang memberikan pemaknaan tentang laba, yaitu penelitian Mursy dan Rosidi (2013) yang menghasilkan tiga pemaknaan, pertama laba dimaknai dari bentuknya secara abstrak yaitu rasa. Kedua, wujud laba sebagai rasa syukur dan rasa bahagia. Ketiga, laba berfungsi sebagai penebar rasa bahagia.

Selanjutnya penelitian yang mencoba mengungkap makna laba dalam perspektif islam yaitu Ekasari (2014) menemukan bahwa seharusnya bisnis dibangun di atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran. keuntungan yang diperoleh perusahaan seyogyanya tidak hanya memperkaya perusahaan saja, namun juga harus memakmurkan sesama manusia, alam dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, Farhan (2016) meneliti Mengenai Laba Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun dengan hasil pertama tambahan nilai yang disebabkan karena adanya tambahan nilai produksi, kedua, laba dipengaruhi oleh respon permintaan karena ada perubahan harga dan kebutuhan masyarakat, ketiga, laba harus tercipta dari kerja nyata yang dapat menambah nilai barang atau jasa, dan keempat, keuntungan yang diperoleh secara tidak sengaja merupakan rezeki dari Allah SWT.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, peneliti masih belum dapat menemukan penelitian yang menyoroti profesi sopir atau jasa angkutan dalam memaknai keuntungan mereka. Maka dari itu, peneliti mencoba meneliti mengenai makna keuntungan dari sudut pandang profesi sopir angkutan pedesaan yang berada di Kecamatan Kamal. Hal ini dirasa unik, karena selama peneliti tahu angkutan pedesaan yang merupakan transportasi zaman dahulu ini masih bertahan dengan berbagai pengaruh yang dirasakannya hingga era modern saat ini. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana makna keuntungan yang dilihat dari sudut pandang sopir angkutan umum "pedesaan" di Kecamatan Kamal, Bangkalan-Madura?

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Upaya untuk menelusuri makna kuntungan dari sudut pandang profesi sopir angkutan

pedesaan yang sudah bertahan lama dan dengan kemajuan zaman seperti sekarang angkutan pedesaan ini masih bertahan. Gaya penelitian kualitatif dianggap paling cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai makna keuntungan yang dilihat dari sudut pandang profesi sopir angkutan desa “pedesaan” yang merupakan salah satu transportasi zaman dahulu yang masih bertahan dengan banyaknya pengaruh yang dihadapi, sehingga memiliki keunikan dalam makna keuntungan yang dirasakan oleh para sopir angkutan tersebut jika dibandingkan transportasi online yang sedang berkembang pada saat ini. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mengungkap semua rasa keingintahuan dalam bentuk kata-kata yang bermakna. Kata-kata yang bermakna ini adalah sebuah kata yang menjadikan pembacanya merasakan ikut berada dalam dunia penelitian tersebut. Penelitian kualitatif menjadi sarana untuk para peneliti untuk mengeksplorasi rasa penasarannya dengan bertanya langsung kepada para aktor yang memiliki pengalaman atau menjalani dalam kehidupan sehari-harinya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Moleong (2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **3.2 Fenomenologi Sebagai Tiang Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Edmund Husserl sebagaimana dikutip oleh Kamayanti (2016), fenomenologi berfokus pada suatu studi kesadaran. Fenomenologi bertugas untuk mengupas secara mendalam permasalahan yang akan diteliti, dan mengajukan pertanyaan hingga tidak ada pertanyaan lagi yang dapat diungkapkan. Menurut Kamayanti (2016) fenomenologi adalah mencari jawaban secara mendalam melalui informan/ “Aku”.

### **3.3 Situs Penelitian**

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah sopir angkutan pedesaan yang berlokasi di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura yang menjadi pertimbangan lain peneliti mengambil situs penelitian ini dikarenakan masih bertahannya angkutan pedesaan tersebut yang masih aktif beroperasi hingga zaman modern saat ini.

### **3.4 Informan Penelitian**

Pemilihan informan tidak dibidikkan kepada semua sopir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal, namun ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kriteria, kriteria dalam pemilihan informan dalam penelitian ini yang pertama yaitu peneliti memilih informan yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun, dimana dengan lamanya mengikuti pekerjaan tersebut, peneliti dapat mengetahui lebih banyak pengalaman dalam menjalani profesinya sebagai sopir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal. Kedua, peneliti memilih sopir yang memiliki angkutan pedesaannya sendiri, hal ini dirasa penting, karena dengan memiliki kendaraan sendiri dapat menjadikan potret yang lebih utuh bertahan dengan kepemilikan kendaraan.

Dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi beberapa kriteria yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini yaitu Bapak Muin dan Bapak Yanto yang merupakan sopir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal. pencarian dari kesadaran informan tidak dapat hanya mempercayai informan yang bersangkutan, sehingga dalam penelitian ini terdapat informan pendukung. Terdapat lima informan pendukung dalam penelitian ini yaitu Bapak Bunari dan Bapak Edi yang merupakan sesama sopir angkutan pedesaan, selain itu istri dari kedua informan utama yaitu Ibu Suhaima dan Ibu Yuni. Terakhir yaitu Ibu Srie yang merupakan pengguna jasa angkutan pedesaan yang telah setia menggunakannya selama 30 tahun.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Sebuah penelitian dikatakan dapat dimulai, ketika peneliti berhasil mengumpulkan data

sehingga dapat diolah menjadi sebuah hasil yang berguna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan) dilakukan di tempat pangkalan angkutan pedesaan yaitu di daerah pelabuhan Kamal dan depan SMP 1 Kamal. Selain itu peneliti juga mengikuti langsung beroperasinya angkutan pedesaan ini sehingga peneliti akan merasa langsung berada dalam peristiwa atau keseharian sopir angkutan pedesaan ini. Wawancara dilakukan di rumah informan dan pangkalan sopir angkutan pedesaan, dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan pedoman garis besar yang akan diteliti, wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menulis wawancara tersebut dalam sebuah transkrip wawancara. Selain itu, peneliti juga akan mendokumentasikan ketika berada di lapangan.

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Sebuah penelitian tidak lepas dari kepercayaan orang akan proses dan hasil penelitian. Peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi karena teknik ini merupakan cara yang memudahkan peneliti menghilangkan perbedaan-perbedaan kejadian di lapangan. Triangulasi sumber diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda yaitu dari sopir angkutan pedesaan lainnya, istri sopir dan penumpang angkutan pedesaan di situs penelitian. Triangulasi teknik yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu biasanya juga mempengaruhi kredibilitas data, sehingga peneliti melakukan teknik pengumpulan data kepada narasumber dalam waktu dan situasi yang berbeda.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Ketika data penelitian sudah terkumpul, maka peneliti selanjutnya akan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data fenomenologi transcedental menurut Kamayanti (2016) yaitu ada beberapa kunci yang harus dipahami oleh seorang fenomenolog yaitu: 1) Noema, 2) Noesis, 3) Epoche (Bracketing), 4) Intentional Analysis, 5) Eidetic Reduction.

### Potret Beroperasinya Angkutan Pedesaan Di Kamal

Munculnya Angkutan Umum “Pedesaan” ini berawal dari adanya pengadaan Organda. Organda adalah organisasi angkutan darat yang merupakan gabungan dari pengusaha-pengusaha angkutan darat. Pengadaan tersebut berawal mulai tahun 1985-an, dimana pada awalnya angkutan pedesaan ini hanya berjumlah 9-10 saja. Setelah tahun 1990-an jumlah angkutan pedesaan bertambah hingga berjumlah 24 angkutan pedesaan, jumlah itu merupakan jumlah terakhir. Jumlah angkutan pedesaan telah diatur oleh Dishub Bangkalan.

Angkutan pedesaan merupakan salah satu penggerak aktivitas bagi masyarakat dalam suatu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. (PP No. 41 Tahun 1993).

Kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angkutan umum yaitu angkutan pedesaan yang hanya beroperasi di Kecamatan Kamal dengan trayek yaitu Kamal-Perumnas. Selain melayani penumpang dalam trayek, angkutan pedesaan hingga saat ini masih dapat di carter untuk berbagai macam kegiatan. Walaupun masyarakat telah memiliki kendaraan pribadi. Tetapi, tidak semuanya yang memiliki kendaraan mobil yang dapat mencukupi banyak orang. Selain itu harga carter yang murah juga merupakan salah satu alasan masyarakat memilih mencarter angkutan pedesaan ini.

Setiap tarif yang digunakan oleh para sopir angkutan pedesaan di Kamal ini sama antara satu angkutan pedesaan dengan yang lain, karena angkutan pedesaan di Kamal memiliki paguyuban sehingga tarif yang digunakan itu sudah ditetapkan bersama.

Selama ini, angkutan pedesaan merupakan salah satu transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat Kamal, terutama mas-

yarakat Perumnas. Karena pada awal Perumnas berdiri angkutan pedesaan ini juga mulai bermunculan. Dulu, masyarakat tidak banyak yang memiliki kendaraan pribadi, sehingga angkutan pedesaan ini merupakan salah satu transportasi yang dapat digunakan masyarakat Kamal terutama Perumnas. Selain itu, trayek yang tetap dari dulu hingga sekarang menjadikan para sopir pedesaan memiliki ikatan kekeluargaan sendiri yang timbul karena seringnya masyarakat Perumnas ini menjadi penumpang dengan rute angkutan pedesaan sendiri yang hanya Kamal-Perumnas.

Jadi, dapat dikatakan masyarakat Perumnas itu sudah menyatu dengan pedesaan, Karena dari awal adanya Perumnas, angkutan pedesaan ini merupakan salah satu akses transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat perumnas. Trayek yang tetap dari dulu hingga sekarang juga menjadikan masyarakat Perumnas sudah terbiasa dan mengenal para sopir angkutan pedesaan sehingga terjalin hubungan kekeluargaan. Sampai saat ini pun masyarakat Perumnas masih banyak yang menikmati jasa transportasi ini baik untuk sekolah atau masyarakat yang pergi ke pasar, walaupun tidak seramai dulu.

### **Fenomena Berkurangnya Eksistensi Angkutan Pedesaan Di Kecamatan Kamal**

Angkutan pedesaan merupakan salah satu transportasi jaman dahulu yang masih bertahan di kecamatan Kamal, transportasi ini pernah Berjaya pada zamannya, yaitu pada tahun 1990-2000. Pada tahun tersebut transportasi ini benar-benar pada puncak kejayaannya, karena pada saat dahulu masyarakat Kamal tidak ada akses. Saat ini, angkutan ini mulai berkurang eksistensinya seperti yang terlihat dari pengguna jasa angkutan pedesaan dahulu, pengguna jasa angkutan pedesaan ini beragam-ragam baik dari kalangan atas hingga kalangan menengah kebawah. Angkutan pedesaan ini dulunya merupakan satu-satunya akses yang dapat digunakan dan dijumpai dengan mudah oleh masyarakat kamal.

Semakin berkembangnya zaman, transportasi angkutan pedesaan yang berada di Kecamatan Kamal ini sudah mulai berkurang eksistensinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang ada, pada penelitian ini peneliti mencoba

menggal faktor yang mempengaruhi dari berkurangnya eksistensi angkutan pedesaan ini salah satunya yaitu dari adanya Jembatan Suramadu pada tahun 2009, Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang melintang di selat Madura yang menghubungkan pulau Madura dengan kota Surabaya dan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

Dengan terdapatnya infrastruktur Jembatan Suramadu tersebut, kebanyakan dari masyarakat lebih memilih jalur darat daripada laut. Hal ini disebabkan karena waktu tempuh yang lebih efisien dibandingkan dengan melewati jalur laut yang bisa menghabiskan waktu tempuh sekitar satu jam. Selain itu, secara ekonomi juga lebih terjangkau sehingga masyarakat beralih untuk menggunakan akses yaitu Jembatan Suramadu.

Hal itu justru mengganggu eksistensi transportasi zaman dahulu yaitu angkutan pedesaan yang memiliki trayek Kamal-Perumnas. Seperti yang diungkapkan Bapak Muin:

“Yaa {berpengaruh juga}, kalau diukur dengan pemasukan pengeluaran sekarang berpengaruh, besar pengaruhnya, soalnya sekarang yaa anggaphlah bensinnya besar, kalau bensin anggap 50 setoran 50 hasil juga harus 50 juga”.

Bapak Muin menjelaskan bahwa terdapatnya Jembatan Suramadu berpengaruh sangat besar terhadap pemasukan dan pengeluaran dari profesinya. Seperti biaya bensin besar dan tanggungan setoran kepada pemilik. Semenjak berdirinya Jembatan Suramadu sampai saat ini biaya yang dikeluarkan tetap sama. Namun, penghasilan yang didapatkan berbeda.

Tidak sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh Bapak Muin sebelumnya mengenai fenomena yang mempengaruhi eksistensi dari angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal ini, Menurut Bapak Yanto Jembatan Suramadu bukanlah hal yang mempengaruhi berkurangnya eksistensi dari angkutan pedesaan ini, namun terdapatnya dealer sepeda motor yang berada di Kecamatan Kamal. Sehingga, masyarakat Kamal dapat memiliki kendaraan pribadi dengan mudah ditambah saat ini kredit kendaraan bermotor yang cukup murah. Seperti yang Beliau katakan:

“Ya itu {masuknya dealer sepeda motor} di Kamal ini yang berpengaruh, karna apa

mbak dulunya orang-orang itu kan jarang ada yang punya motor, semenjak ada itu kan jadi banyak yang beli dan punya motor, kebanyakan kan sekarang ini hampir setiap keluarga kan pasti ada kendaraan”.

Bapak Yanto merasa bahwa Jembatan Suramadu tidak berpengaruh terhadap berkurangnya eksistensi angkutan pedesaan di Kamal. Pendapat Bapak Yanto sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini, disebabkan Beliau merasa fenomena yang mempengaruhi berkurangnya angkutan pedesaan yaitu terdapatnya dealer kendaraan bermotor di Kecamatan Kamal, yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa harga kredit kendaraan bermotor yang cukup murah. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Yanto adalah “aku merasa terdapatnya dealer kendaraan bermotor di Kecamatan Kamal yang mempengaruhi berkurangnya eksistensi angkutan pedesaan, selain itu uang muka yang murah menjadikan masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor sendiri”.

Dengan berbagai fenomena yang mempengaruhi berkurangnya eksistensi angkutan pedesaan ini, pengguna jasa transportasi yang dulu selalu ada berjejer menunggu transportasi biru ini mulai dari kalangan atas hingga kalangan menengah ke bawah kini sudah mulai berkurang satu persatu dikarenakan faktor-faktor yang ada, sehingga hal tersebut dapat mengurangi eksistensi angkutan pedesaan yang dulu dapat dikatakan berjaya, saat ini mulai sirna. Angkutan pedesaan saat ini sudah tidak seperti dahulu lagi, karena yang beroperasi pada hanya 6-10 angkutan pedesaan saja.

#### 4. Hasil Penelitian

##### 4.1. Perolehan Keuntungan Dalam Usaha Angkutan Pedesaan

###### 4.1.1 Bapak Muin

Pendapatan Bapak Muin dari usaha yang sudah 21 tahun Beliau geluti ini diperoleh dari pendapatan operasional yang berasal dari beroperasinya angkutan pedesaan dan pendapatan non operasional yaitu dari sewa/carter dan pekerjaan sampingan.

Bapak Muin beroperasi sebagai sopir angkutan pedesaan dengan trayek Kamal-Perumnas

ini setiap hari, selama Beliau masih sehat. Jam beroperasi Bapak Muin tidak menentu, karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang terikat waktu. Jadi, jika terdapat penumpang yang menghubungi Beliau, Beliau siap dalam 24 jam untuk mengantarkan penumpangnya.

Dalam operasi di pagi hari Beliau hanya jalan 3-4 kali dengan sekali perjalanan jika diambil rata-rata sekali perjalanan 5 penumpang pada pagi hari, tapi itu tidak menentu. Pada siang hari Beliau mengangkut pelajar dengan 2 kali jalan dalam trayek dengan pelajar kurang lebih 10 yang diantarkan Beliau sekali jalan. Selanjutnya, Pada sore hari, Beliau berhenti di pelabuhan untuk menunggu penumpang yang sekali Beliau antarkan 4 sampai 5 penumpang. Biasanya, Beliau pada sore hari 2 kali jalan. Bapak Muin menceritakan mengenai penghasilan yang didapatkannya saat ini dalam menjalankan profesinya, berikut ceritanya:

“Kalau penghasilan kotornya anggap aja kalau {diambil rata-rata 150.000} perhari tapi {kadang lebih} { kadang gak sampai segitu}”.

Bapak Muin menceritakan bahwa penghasilan kotor yang didapatkan Beliau perharinya tidak menentu. Namun, jika diambil rata-rata yaitu Rp 150.000. Karena, penghasilan tersebut belum dikurangi dengan biaya-biaya yang ada.

Setiap usaha tidak terkecuali usaha perorangan jasa transportasi atau sopir angkutan pedesaan pasti terbentur dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Sebelum menjalankan pekerjaannya, para sopir pedesaan harus mengetahui biaya apa saja yang ditanggung untuk beroperasi. Pada gambar di bawah ini merupakan rincian biaya yang dikeluarkan Bapak Muin:

Biaya tetap :	
- Bensin	: Rp 50.000/hari
- Retribusi terminal	: Rp 1.500/hari
- Pajak Tahunan	: Rp 200.000
- Uji Kir	: Rp 150.000
- Pajak lima tahun	: Rp 520.000
(Pajak+asuransi+plat kuning)	_____
	Rp 923.500
Biaya Tak Terduga :	
- Ganti ban	: Rp 300.000
- Tambal ban	: Rp 15.000
- Ganti Oli	: Rp 60.000
- Aki	: Rp 250.000
- Sparepart, dll	: Rp 200.000
	_____
	Rp 825.000

Gambar 5.4 Rincian Biaya Bapak Muin

Untuk mengetahui pendapatan bersih Bapak Muin perhari, dapat dilihat dengan hanya mengurangi pendapatan kotor dengan biaya tetap yang pasti dikeluarkan saat beroperasi setiap harinya. Karena jika pendapatan tersebut dikurangi biaya yang sifatnya dibayarkan tahunan dan biaya tak terduga ikut dikurangi, pendapatan bersih Bapak Muin akan mengalami minus dengan penghasilan bersihnya sebesar Rp 98.500/hari.

Selain mendapatkan penghasilan dari beroperasinya angkutan pedesaan, Bapak Muin juga mendapatkan pendapatan dari sewa/carter kendaraannya atau pendapatan non operasional. Pendapatan Non Operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan (di luar usaha pokok) yang bersifat insidental (Kusnadi,2000). Dari dulu hingga saat inipun angkutan pedesaan masih banyak yang menyewa pedesaan ini untuk berbagai kegiatan, walaupun banyak juga yang sudah memiliki kendaraan pribadi. Tapi, tidak semuanya yang memiliki kendaraan mobil, karena mobil bisa mencukupi untuk banyak orang. Selain itu harga carter yang murah juga merupakan salah satu alasan masyarakat memilih mencarter pedesaan ini.

Angkutan pedesaan dari dulu sudah ada yang mencarter karena pada saat dulu masih sepi kendaraan. Namun, saat inipun angkutan pedesaan juga masih ada yang mencarter untuk berbagai kegiatan dan seperti yang sudah dijelaskan Bapak Muin, penumpangnya bisa langsung menolongnya untuk mencarter pedesaan tersebut.

Dalam kehidupan keluarganya, Bapak Muin tidak hanya bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan di Kamal saja, Beliau juga memiliki pekerjaan sampingan, walaupun pekerjaan sampingan tersebut tidak selama Beliau menggeluti pekerjaan sopir angkutan pedesaan. Begini pengakuan Beliau:

“Iya sopir pedesaan ini {pekerjaan utama} dik, kalau masa-masa sekarang ini saya {banyak kerja sampingannya}, yaa nyervis yaa itu aja nyervis udah itu aja gak usah banyak-banyak nanti kalau banyak-banyak dikira banyak uang saya, tapi kadang-kadang kalau ada besi tua saya tampung”.

Penjelasan Bapak Muin menunjukkan bahwa

profesi sopir angkutan pedesaan merupakan pekerjaan utama Beliau dan saat ini Beliau memiliki pekerjaan sampingan yaitu menyervis dan menampung besi tua.

#### 4.1.2 Bapak Yanto

Bapak Yanto merupakan salah satu sopir angkutan pedesaan yang berada di kecamatan Kamal, Beliau sudah 30 tahun menjalani pekerjaan sebagai sopir pedesaan ini. Dalam menjalankan profesinya sebagai sopir ini Bapak Yanto bekerja setiap hari selama Beliau sehat dan kendaraan angkutan pedesaannya tidak rusak. Jam operasi Bapak Yanto saat ini sudah tidak seperti dulu, saat ini Beliau hanya beroperasi sampai para pelajar pulang sekolah atau pada siang hari.

Dalam beroperasi, pada pagi hari Bapak Yanto mengantar penumpang ke pasar dengan hanya jalan 5 kali dalam trayek dengan sekali perjalanan jika diambil rata-rata sekali perjalanan membawa 5 penumpang pada pagi hari. Pada siang hari Beliau mengangkut pelajar dengan 3 kali jalan dalam trayek dengan pelajar kurang lebih 10 yang diantarkan Beliau sekali jalan dan setelah mengantar anak pelajar Beliau memilih untuk pulang. Selanjutnya Beliau menceritakan mengenai penghasilan yang didapatkannya saat ini dalam menjalankan profesinya, berikut ceritanya:

“kalau penghasilan kotor ini rata-rata 100.000-150.000 itu belum yang lain-lain”. Bapak Yanto menceritakan bahwa penghasilan kotor yang didapatkan Beliau perharinya tidak menentu. Namun, jika diambil rata-rata yaitu Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Karena, penghasilan tersebut belum dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Pada gambar di bawah ini merupakan rincian biaya tetap dan biaya tak terduga yang dikeluarkan oleh Bapak Yanto:

Biaya tetap :	
- Bensin	: Rp 50.000/hari
- Retribusi terminal	: Rp 1.500/hari
- Pajak lima tahun	: Rp 550.000
(Pajak+ijin trayek+asuransi+plat kuning)	
	<u>Rp 601.500</u>
Biaya Tak Terduga :	
- Ganti ban	: Rp 150.000
- Tambal ban	: Rp 10.000
- Aki	: Rp 220.000
- Sparepart, dll	: Rp 200.000
	<u>Rp 580.000</u>

Gambar 5.10 Rincian Biaya Bapak Yanto

Untuk mengetahui pendapatan bersih Bapak Yanto perhari, dapat dilihat dengan hanya mengurangi pendapatan kotor dengan biaya tetap yang pasti dikeluarkan saat beroperasi setiap harinya. Karena jika pendapatan tersebut dikurangi biaya yang sifatnya dibayarkan tahunan dan biaya tak terduga ikut dikurangi, pendapatan bersih Bapak Muin akan mengalami minus dengan penghasilan bersihnya sebesar Rp 98.500/hari.

Selain mendapatkan penghasilan dari beroperasinya angkutan pedesaan, Bapak Yanto juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sampingannya yaitu memiliki toko dan sewa/carter kendaraannya. Dari dulu hingga saat inipun angkutan pedesaan masih banyak yang menyewa pedesaan ini untuk berbagai kegiatan, walaupun banyak juga yang sudah memiliki kendaraan pribadi. Tapi, tidak semuanya yang memiliki kendaraan mobil, karena mobil bisa mencukupi untuk banyak orang. Selain itu harga carter yang murah juga merupakan salah satu alasan masyarakat memilih mencarter pedesaan ini. berikut penjelasan Bapak Yanto:

“Yaa kadang-kadang, kalau buat apa itu ya bermacam-macam kadang ada buat orang ke manten gitu, atau orang kebun dari pelabuhan carter kesana, atau ke telang”.

Bapak Yanto menjelaskan bahwa kendaraan yang selama ini Beliau gunakan untuk mengantar penumpang dalam trayek itu juga dapat digunakan keluar trayek angkutan pedesaan ini karena untuk dicarter oleh penumpang, mengenai acara menurut yang dijelaskan Beliau, acara tersebut bermacam-macam.

## **4.2 Keuntungan Dalam Pandangan Sopir Angkutan Pedesaan**

### **4.2.1 Bapak Muin: Bertahan karena Rasa Mencintai**

Penggalian kesadaran kali ini didapat dari salah satu informan yang memiliki kepribadian yang ramah, sabar, pembawaannya yang baik dan tampak sederhana, semua itu terlihat dari gaya bicaranya yang memiliki selera humor yang tinggi. Bapak Muin memiliki kepribadian yang mengagumkan yang ditunjukkan dengan sikap tulus dan perhatian pada para penumpang dan para

sopir lainnya di lapangan. Momen-momen itu didapati saat proses penelitian berlangsung dan berbagai interaksi yang terjadi di lapangan.

Bapak Muin merupakan salah satu sopir angkutan pedesaan yang berada di Kecamatan Kamal, Beliau sudah 21 tahun menjalani pekerjaannya ini sebagai sopir angkutan pedesaan. Sebelum berprofesi sebagai sopir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal, Beliau sudah menggeluti beberapa pekerjaan lain yaitu menjadi pedagang tempe dan berprofesi sebagai sopir truk yang sebelumnya Beliau merupakan seorang pengangguran. Pada akhirnya Beliau beralih menjadi sopir angkutan pedesaan dengan bekerja kepada orang lain.

Beliau hanya lulusan SMP karena Beliau tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Menurut Beliau hal yang terpenting itu bukan pendidikan yang tinggi, namun, harus memiliki keterampilan dan keinginan yang terpenting pekerjaan yang tidak melawan hukum. Bapak Muin memiliki alasan memilih profesi sebagai sopir angkutan pedesaan yaitu dikarenakan pada saat dahulu, sopir angkutan pedesaan memiliki penghasilan yang cukup besar, karena pada saat itu transportasi masih jarang sekali ada.

Semakin berkembangnya zaman, angkutan pedesaan ini sudah mulai berkurang eksistensinya. Hal ini disebabkan oleh berdirinya Jembatan Suramadu yaitu pada tahun 2009. Namun, hal ini tidak menjadikan Bapak Muin untuk meninggalkan profesinya, Beliau beralasan bahwa:

“Tidak ada, alasannya yaa {keenakan} itu. Alasannya ya sudah {rutinitas pekerjaan} buat keluarga. Walaupun penghasilan gak tetap, kadang-kadang pedesaan ini melebihi dari penghasilan biasanya. Yaa misalnya ya cuma cerita ini udah di bawak ibu-ibu ke Bangkalan udah 150.000 yaa umpamanya ya itu kan sudah mencukupi segalanya, pas kerja disini dapat 100.000 ya kalau menurut saya kan itu sudah cukup banyak, jadi saling mengisi, jadi kadang disuatu hari sedikit, suatu harinya banyak. Karena {rezeki tuh gini sudah ada yang ngatur}”.

Bapak Muin beralasan bahwa Beliau tidak beralih profesi dikarenakan Beliau nyaman dengan profesi yang sudah lama digelutinya.

Selain itu Beliau beralasan bahwa sudah rutinitas pekerjaan. Walaupun, penghasilan yang Beliau dapatkan tidak tetap, Beliau tetap mensyukurinya karena menurut Beliau rezeki itu sudah ada yang mengatur. Bertahun-tahun berprofesi sebagai sopir angkutan pedesaan, Bapak Muin hanya bekerja kepada orang lain, Beliau tidak memiliki angkutan pedesaan sendiri. Akhirnya pada tahun 2017 Beliau memiliki angkutan pedesaan itu sendiri, berikut ceritanya:

“Ya aneh memang haha padahal kan kalau dipikir-pikir ya gitu, sekarang pedesaan itu sudah gak begitu ramai semenjak adanya suramadu itu, tapi kenapa saya baru beli? Yaa itu rezeki orang gak ada yang tau, padahal dulu itu yaa ramai-ramainya penumpang penghasilan juga pasti lumayan, tapi kenapa saya baru punya sekarang? Hehe kalau dipikir ya gitu. Saya beli juga karena sudah kerjaan tiap hari dan sudah {nyaman ini jadi sopir pedesaan}”.

Bapak Muin menceritakan bahwa Beliau baru memiliki angkutan pedesaannya baru-baru ini, padahal menurut Beliau, jika dihitung dari awal Beliau bekerja, seharusnya Beliau dapat membeli kendaraan tersebut dari dulu. Namun, Beliau baru membelinya saat ini. Hal itu Beliau anggap bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Selanjutnya peneliti mencoba menggali kesadaran dari Bapak Muin mengenai alasan Beliau tidak menjual angkutan pedesaannya itu, berikut jelasnnya:

“Yaa karena udah kerjaan sehari-hari kalau dijual mau kemana lagi haha sudah {terlanjur sayang}”.

Bapak Muin merasa bahwa tidak alasan untuk beralih profesi. Pendapat Bapak Muin sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini, disebabkan Beliau baru dapat membeli angkutan pedesaan sendiri. Yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa tidak akan menjual angkutan pedesaannya adalah karena Beliau sudah mencintai profesinya. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Muin adalah “aku tidak memiliki alasan untuk beralih profesi, aku dapat membeli angkutan pedesaan sendiri dan tidak akan menjualnya karena aku mencintai profesiku”.

### **Keuntungan Kepuasan Batin “Mengantar Penumpang dengan Rasa Bahagia”**

Pada dasarnya, setiap usaha yang dijalankan tentu akan selalu identik dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Berapapun jumlahnya, keuntungan tetap menjadi tujuan, sebab tidak ada seorangpun yang menginginkan kerugian. Namun, dalam penelitian ini tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Terdapat nilai kepuasan batin tersendiri yang diungkapkan oleh Bapak Muin dalam menjalankan profesinya ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengguna jasa angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal ini mulai berkurang yang dikarenakan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi eksistensi angkutan pedesaan ini. Penumpang angkutan pedesaan sudah tidak seperti dulu lagi, namun kalangan masih sama. Saat ini, penumpang angkutan pedesaan terbanyak dari anak sekolah dan orang ke pasar. Bapak Muin menjelaskan mengenai perasaan Beliau selama mengantar para penumpangnya yang sudah tidak seramai dulu, berikut ungkapannya:

“Ya bahagialah... seperti yang saya bilang ke sampeyan waktu itu, kan gak semuanya yang punya motor, kadang kan ibu-ibu ke pasar sama anak kesekolah kan gak bisa bawa motor, bisa dibilang membantu sesama”.

Bapak Muin merasa bahwa penumpangnya pada saat ini tidak seperti dahulu lagi. Pendapat Bapak Muin sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini, disebabkan pengalamannya yang masih beroperasi hingga saat ini, yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa Beliau merasa bahagia dengan membantu masyarakat. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Muin adalah “aku merasa penumpang sudah tidak seperti dulu, tetapi aku tetap merasa bahagia dengan membantu masyarakat”.

### **Keuntungan Spiritual “Rezeki Sudah Ada yang Mengatur”**

Berbeda dengan tarif angkutan pedesaan pada umumnya, selama beroperasi, Bapak Muin tidak pernah menerapkan tarif angkutan pedesaan seperti tarif angkutan pedesaan yang lain kepada para penumpangnya dengan tujuan kemanusiaan.

Angkutan pedesaan yang dijalankan oleh Bapak Muin ini memungkinkan penumpangnya membayar dengan tarif “fleksibel”. Namun, justru Bapak Muin masih dapat bertahan dengan profesinya ini dengan tidak pernah merasa rugi, tarif angkutan pedesaan pada umumnya sama. Namun, terdapat para penumpang yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ada dan menurut Beliau setiap kalangan dan kemampuan penumpang berbeda. Bapak Muin tidak pernah merasa rugi dengan hal tersebut.

“Kalau {ruginya gak}, buktinya {masih jalan} hahaha. Sebenarnya gini dik, rezeki tuh gini bukan kita yang ngatur karena sudah ada yang ngatur, kalau masalah rezeki ya kan dik, ada kadang-kadang kita rezeki 50.000 di dalam beras sudah punya ikan sudah punya kan kita gak kalong, kadang ada teman datang bawak apa, kadang ada teman itu datang memperbaiki segala tetek bengek mesin kadang-kadang dikasih uang akhirnya, ya Alhamdulillah kalau bagi saya ya cukup-cukup saja kalau bagi yang lain saya kurang tau, iyaa kalau masalah rezeki looh, itu kan khusus rezeki. Tapi aneh rezeki itu memang, meskipun dengan jalan kita kekurangan itu, dulu saya itu kan mulai tahun 1997 yaa? Yaa kalau di hitung-hitung kan ya rezeki itu saya tahun 2000 harusnya sudah punya pedesaan sendiri kan yaa?kok gak punya pedesaan itu? Baru sekarang itu rezeki itu, aneh rezeki itu, aneh yaa? Aneh hehe.. Kalau rezeki bukan 1+1 bukan, itu ada yang ngatur, disyukuri aja”.

Bapak Muin merasa bahwa tarif angkutan pedesaan yang diberikan fleksibel. Pendapat Bapak Muin sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini, disebabkan pengalamannya yang tidak pernah memaksa penumpangnya untuk membayar sesuai tarif yang ada, karena kemampuan setiap keluarga berbeda yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa Beliau tidak pernah merasa rugi dengan membantu setiap penumpangnya, Beliau akan mendapatkan rezeki yang lebih dari apa yang Beliau berikan kepada orang lain, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Muin adalah “aku tidak per-

nah memaksa penumpang untuk membayar sesuai tarif angkutan pedesaan, karena kemampuan setiap keluarga berbeda dan aku tidak merasa rugi dengan membantu penumpang karena rezeki sudah ada yang mengatur”.

### **Keuntungan Materi “Menghidupi Keluarga,- Simpanan dan Utang”**

Selain tidak pernah menargetkan tarif penumpang yang semestinya, Bapak Muin selama ini juga tidak pernah mencatat biaya yang dikeluarkan serta laba yang diperoleh dari hasil beroperasi perhari. Beliau tidak pernah mencatat pendapatan dan pengeluaran hasil beroperasi Beliau. Beliau hanya menghitung biaya yang dikeluarkan pada hari itu untuk mengetahui pendapatan yang Beliau dapatkan. Setelah mengetahui keuntungan yang Beliau dapatkan, Beliau menyisihkan hasil dari beroperasinya Beliau perhari untuk biaya-biaya angkutan pedesaan. Selain itu, Beliau juga menggunakan penghasilannya untuk menghidupi keluarganya dan menyicil kendaraannya ke Bank. Selanjutnya, mengenai penghasilan yang Beliau dapatkan dari profesi ini, Beliau mengaku bahwa penghasilan yang Beliau dapatkan tercukupi. Seperti yang Bapak Muin katakan:

“Alhamdulillah {tercukupi}, diterima aja, malah lebih kok, iyaa lebih kalau gak lebih gak bisa nyicil ini ke Bank hehehe”.

Bapak Muin merasa bahwa tidak pernah mencatat pendapatannya untuk mengetahui keuntungan yang diduplikannya. Pendapat Bapak Muin sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini, disebabkan Beliau hanya menghitung pendapatan yang Beliau dapatkan dari beroperasi yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa Beliau merasa tercukupi dengan pendapatan yang diduplikannya, karena dapat menghidupi keluarganya, menyimpan uang untuk biaya kendaraan dan membayar utang ke Bank, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Muin adalah “aku tidak pernah mencatat pendapatan yang aku dapatkan, aku hanya menghitungnya. Aku merasa tercukupi dengan pendapatan yang aku dapatkan karena dapat menghidupi keluargaku dan membayar utangku ke Bank”.

#### 4.2.2 Bapak Yanto: Bertahan karena Tidak Memiliki Keahlian

Penggalian kesadaran selanjutnya didapat dari informan kedua yaitu Bapak Yanto yang memiliki kepribadian yang cukup tegas, hal ini dikarenakan Beliau merupakan seorang ayah dari empat anak perempuannya yang dua diantaranya sudah duduk di bangku sekolah. Bapak Yanto memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, hal ini dikarenakan Beliau merupakan sarjana dari salah satu Universitas Swasta di Surabaya.

Bapak Yanto mengawali profesi sebagai sopir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal ini sejak 30 tahun yang lalu. Pada awal berprofesi sebagai sopir angkutan pedesaan Beliau sudah memiliki angkutan pedesaan sendiri. Sehingga jam operasi Beliau tidak menentu. Alasannya memilih profesi sebagai sopir angkutan pedesaan pada awal Beliau bekerja dikarenakan penghasilan dari profesi sopir angkutan pedesaan di kecamatan Kamal pada saat itu cukup besar dan akses transportasi di kecamatan Kamal jarang sekali.

Angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal ini semakin lama eksistensinya mulai berkurang, hal ini disebabkan terdapatnya dealer sepeda motor di Kecamatan Kamal, dengan terdapatnya dealer tersebut masyarakat Kamal banyak yang memiliki kendaraan pribadi. Bapak Yanto merasa pendapatan yang Beliau dapatkan itu tidak cukup dan menurut Beliau hanya terdapat pekerjaan ini, walaupun penghasilan sedikit Beliau masih dapat membiayai keluarganya. Bapak Yanto memiliki keinginannya untuk beralih dari profesi yang sudah digelutinya selama 30 tahun ini, seperti yang Beliau katakan kepada peneliti:

“Sebetulnya {keinginan ada}, tapi {kendala modal sama skill} mbak”.

Bapak Yanto merasa bahwa terdapatnya dealer kendaraan bermotor di Kecamatan Kamal mempengaruhi berkurangnya eksistensi angkutan pedesaan. Pendapatan Bapak Yanto sebagai bentuk kesadaran ekplisit (noema) ini, disebabkan penghasilannya yang tidak cukup, yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa Bapak Yanto memiliki keinginan untuk beralih profesi. Namun terkendala modal dan tidak memiliki keahlian lain. Pada titik ini,

pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Yanto adalah “aku merasa dealer kendaraan bermotor di Kecamatan Kamal mempengaruhi pendapatanku sehingga aku memiliki keinginan untuk beralih profesi, tetapi aku tidak memiliki modal dan keahlian lain”.

#### Keuntungan Materi “Menghidupi Keluarga dan Simpanan”

Selama beroperasi, Bapak Yanto tidak pernah mencatat pendapatan yang diperoleh dari profesinya sebagai sopir angkutan pedesaan, karena menurut Beliau, usaha Beliau bukan merupakan usaha yang besar. Berikut keuntungan menurut Bapak Yanto:

“Penghasilan di potong pengeluaran yaa sudah sisanya itu, misalnya kayak perharinya dapet 200.000 ya bensin 70.000, yaa labanya kan segitu. Penghasilan kotor dipotong bensin dipotong biaya sama dengan penghasilan bersih, pokoknya habis beli bensin itu sudah labanya, cuma nek gini ya yang di anggap bersih itu bukan pas perharinya habis beli bensin pas dikira bersih, itu sebenarnya sek nyimpen dulu, untuk tadi itu pengeluaran yang tak terduga sama terduga untuk pajak sama sparepart baru itu bersih, yang jelas ya untuk keluarga”.

Beliau melanjutkan:

“Kalau dari penghasilan itu yaa anggap saya dapet 120.000 bersihnya, saya kasihkan istri saya untuk belanja 60.000 terus buat anak-anak saya 30.000 kan sisa 30.000 itu saya simpan 20.000 buat tabungan takut ada biaya yang harus dikeluarkan suatu saat”.

Bapak Yanto merasa bahwa tidak pernah mencatat pendapatannya untuk mengetahui keuntungan yang didapatkannya. Pendapat Bapak Yanto sebagai bentuk kesadaran ekplisit (noema) ini, disebabkan hanya menghitung penghasilannya dengan cara mengurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa Bapak Yanto membagi penghasilannya untuk istri, anak dan menyimpan untuk biaya-biaya kendaraan. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku”

oleh Bapak Yanto adalah “aku tidak pernah mencatat pendapatanku untuk mengetahui keuntungan yang aku dapatkan, aku hanya menghitung dan mengurangnya dengan biaya-biaya. Aku menggunakan keuntungan itu untuk istri, anak dan menyimpan uang untuk biaya-biaya kendaraan”.

### **Keuntungan Kepuasan Batin “Bahagia Membantu Masyarakat”**

Pengguna jasa angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal ini mulai berkurang, hal ini dikarenakan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi eksistensi angkutan pedesaan ini. Saat ini pengguna jasa angkutannya terbanyak dari kalangan anak sekolah dan orang ke pasar. Memiliki kedekatan dengan anak-anak sekolah dan orang yang pergi ke pasar. Hal ini disebabkan karena Beliau setiap hari mengantarkan para penumpangnya yang umumnya dari kalangan anak sekolah dan orang ke pasar. Selanjutnya peneliti mencoba menggali lagi tentang perasaannya ketika mengantar para penumpangnya tersebut, berikut alasannya:

“Oh iya mbak, bahagia bisa membantu masyarakat yang membutuhkan kendaraan. Kayak anak sekolah iku kan gak semuanya bisa bawak motor”.

Bapak Yanto merasa bahwa penumpangnya saat ini terbanyak dari anak sekolah dan orang ke pasar. Pendapat Bapak Yanto sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini, disebabkan pengalamannya yang setiap hari selalu mengantar para penumpangnya, yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa Bapak Yanto merasa bahagia dengan membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Yanto adalah “aku merasa penumpang terbanyakku dari anak pelajar dan orang ke pasar, hal ini disebabkan karena aku setiap hari dapat mengantarkan para penumpangkku dengan merasa bahagia”.

## **5. Simpulan**

Keuntungan dalam khazanah keilmuan akuntansi hanya dinilai sebagai selisih antara pendapatan dan beban. Penilaian tersebut hanya

terbentuk pada satu makna, yaitu materi. Penelitian ini berusaha menemukan makna yang berbeda, dari profesi yang menghasilkan jasa yang di mana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Profesi tersebut yaitu sopir angkutan pedesaan, dalam penelitian ini mengambil angkutan pedesaan yang berada di Kecamatan Kamal, Bangkalan-Madura.

Melalui pendekatan fenomenologi ini, peneliti berhasil mencapai suatu kesimpulan tentang bagaimana pemaknaan keuntungan yang dilihat dari sudut pandang dua sopir angkutan pedesaan. Makna keuntungan yang terdapat dalam setiap kehidupan informan yang berprofesi sebagai sopir ini digali dan ditafsirkan, sehingga menemukan titik terang yaitu terdapat beberapa kesadaran mengenai implikasi laba terhadap profesi mereka.

Keuntungan yang digali dari kesadaran Bapak Muin muncul dalam tiga makna, yang pertama yaitu Keuntungan Kepuasan Batin “Mengantar Penumpang dengan Rasa Bahagia”, Keuntungan Spiritual “Rezeki Sudah Ada yang Mengatur” dan Keuntungan Materi “Menghidupi Keluarga, Simpanan dan Utang”.

Keuntungan yang digali dari kesadaran Bapak Yanto muncul dalam dua makna, yaitu Keuntungan Materi “Menghidupi Keluarga dan Simpanan” dan Keuntungan Kepuasan Batin “Bahagia Membantu Masyarakat”.

### **5.1 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan yaitu kurangnya keterbukaan informan kedua yang kurang memberi informasi mengenai pengalamannya dalam menjalankan profesinya. Sehingga peneliti kesulitan untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi mengenai transaksinya dalam melakukan pekerjaannya yang dilakukan oleh informan tersebut.

### **5.2 Saran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangsih, terutama untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui keunikan lain yang terdapat dalam makna keuntungan dari profesi yang menghasilkan jasa lainnya. Peneli-

tian ini memang hanya difokuskan untuk melihat sudut pandang “keuntungan” dari profesi sopir. Penelitian ini bersifat subyektif dan tidak dapat digeneralisasikan. Oleh sebab itu, penelitian ini masih bisa dikembangkan dari berbagai aspek. Pendekatan melalui profesi yang berbeda namun dekat dengan masyarakat yang masih melekatkan nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Pendekatan dengan metode penelitian yang berbeda juga dapat dikembangkan. Dengan pengembangan yang ada, diharapkan topik ini dapat semakin berkembang. Penelitian selanjutnya juga dapat melanjutkan keunikan profesi ini maupun profesi lainnya ditinjau dari segi hal perbandingan antara pendapatan dan kerugian.

### Daftar Rujukan

- Akbarwati, E. & Ariastita, P. G. (2013). Revitalisasi Kawasan Pelabuhan Di Madura. *Jurnal Teknik POMITS*. Vol.2, No.2 ISSN: 2337-3539.
- Aminah, A. N. 2017. Kendaraan Meumpuk di Pelabuhan Kamal. [www.republika.co.id/berita/ramadhan/info-mudik/17/06/25/os42ie384-kendaraan-menumpuk-di-pelabuhan-kamal](http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/info-mudik/17/06/25/os42ie384-kendaraan-menumpuk-di-pelabuhan-kamal). Diakses tanggal 7 April 2018.
- Asiyah, A., Ananta, W. T., dan Nyoman, T. H. (2017). Analisis Makna Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Ahmad Yani Singaraja. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 7 No. 1.
- Basri, A. 2017. ASDP Rugi Rp 150 Juta Saban Bulan. <https://www.jawapos.com/radar-madura/read/2017/10/02/16777/asdp-rugi-rp-150-juta-saban-bulan>. Diakses tanggal 7 April 2018.
- Bisri, M. 2010. Nama Mohammad Noer Diusulkan Jadi Pengganti Nama Jembatan Suramadu. <https://nasional.tempo.co/read/241161/nama-mohammad-noer-diusulkan-jadi-pengganti-nama-jembatan-suramadu>. Diakses tanggal 24 Maret 2018.
- Darmini, S. (penerjemah). (2011). *Bisnis The Key Concepts*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ekasari, K. (2014). Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 5 Nomor 1. Halaman 1-169
- Farhan, A. (2016). Hermeneutika Romantik Schleiermacher Mengenai Laba Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 7 Nomor 1. Halaman 1-155.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Kamayanti, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi : Pengantar Regiolitas Keilmuan*. Jakarta. Yayasan Rumah Peneleh.
- Kusnadi. (2000). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate) (Prinsip, Prosedur, dan Metode)*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Mursy, A. L. dan Rosidi. (2013). Sentuhan Rasa Di Balik Makna Laba. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 4 Nomor 2. Halaman 165-329.
- Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Menteri Perhubungan.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sari, D. P. 2014. Apa Makna “Keuntungan” Bagi Profesi Dokter?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 5, Nomor 1, April 2014.
- Subiyantoro, E., dan Iwan, T. (2004). *Laba Humanis Tafsir atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Suardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Ubaidillah, A., Mulyani, S., dan Dwi, E. E. (2013). Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara). *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 14 No. 1
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.



## Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Sebagai Determinan Manajemen Laba Perusahaan

Ika Afiffah, Kartika Hendra Titisari, Anita Wijayanti

Universitas Islam Batik Surakarta  
feafiffah@gmail.com

[doi.org/10.18382/jraam.v3i2.112](https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.112)

### Informasi Artikel:

Tanggal masuk	22-8-2018
Tanggal revisi	4-9-2018
Tanggal diterima	30-9-2018

### Abstract

*This study aims to determine the influence of the quality of the audit, company size and leverage against corporate earnings management sub sectors of the pharmacy listed on the Indonesia stock exchange period 2011 to 2016. The population of this research is the entire pharmaceutical sector sub companies. The results of this research points out that the size of the public accounting office doesn't have an effect on earnings management, while the size of the company and leverage effect on earnings management.*

### Keywords:

*Quality Audit, Leverage, Earning Management*

### Kata Kunci :

Kualias Audit, Leverage, Manajemen Laba

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba di perusahaan sektor manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor farmasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba.

## 1. Pendahuluan

Manajemen laba adalah sebuah fenomena yang terjadi di sektor akuntansi yang masih amat perlu untuk dikaji pada saat ini, meskipun memang telah begitu banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang manajemen laba. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Leuz *et al*(2003) dapat disimpulkan jika terjadinya praktek manajemen laba di Indonesia masih tinggi karena

lemahnya perlindungan investor. Sehingga peneliti masih tertarik melakukan penelitian tentang manajemen laba.

Di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus praktek manajemen laba, misalnya kasus yang terjadi pada PT. Kimia Farma dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI). PT. Kimia Farma melakukan penggelembungan (*overstated*) laba perusahaan pada laporan keuangan 2001 (Rani & Syafruddin, 2011).

Dengan adanya kasus ini juga maka auditor PT. Kimia Farma dijatuhi sanksi karena tidak dalam berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba tersebut, padahal sudah melakukan prosedur audit sesuai SPAP (Rani & Syafruddin, 2011).

Pengujian laporan keuangan merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan guna meminimalkan adanya tindakan kecurngan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Dan auditor adalah pihak independen yang dapat melakukan pengujian laporan keuangan tersebut. Spesifikasi auditor yang dipilih juga harus yang berkualitas, sehingga hasilnya akan lebih meyakinkan dan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Sampai saat ini kualitas audit sering dikaitkan dengan KAP yang ditugaskan melakukan audit. KAP sendiri terbagi menjadi dua yaitu KAP yang terdaftar dalam KAP-*big four* dan non *big four*. Masyarakat pada umumnya beranggapan jika KAP *big four* hasil kualitas auditnya lebih bagus daripada KAP non *big four*. Menurut (Luhgianto, 2010) ukuran KAP memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, dalam penelitiannya (Eksandy, 2013) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, begitupun menurut (Cristiani & Nugrahanti, 2014) dalam penelitiannya jika ukuran KAP juga tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga inilah yang menjadi GAP research penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba mengemukakan apakah terdapat pengaruh kualitas audit proksi ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.

## 2. Kajian Teori

Sulistyanto (2008) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk memengaruhi informasi

dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan menambah bias dalam laporan keuangan, serta dapat mengganggu para pemakai laporan keuangan dalam mempercayai angka-angka dalam laporan keuangan tersebut (Setiawati & Na'im, 2001).

Ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek manajemen laba. Pertama manajemen akrual, faktor ini biasanya berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*manager discretion*). Faktor kedua ialah penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib. Faktor ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut. Yang ketiga perubahan aktiva secara sukarela, faktor ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

Meutia (2004) mendefinisikan audit sebagai suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Indikator Kualitas Audit, Menurut Wooten (2003), indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah yang pertama deteksi salah saji. Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selaku mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan. Indikator yang kedua yaitu kesesuaian dengan standar umum yang berlaku. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit laporan keuangan. Dan indikator yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap SOP. Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit di-

ukur berdasarkan hal – hal sebagai berikut (Efendy, 2010). Kualitas proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme), besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau direkomendasikan yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptisme. Kualitas Hasil (Nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit), manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

Kualitas tindak lanjut hasil audit, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi, tekanan waktu, pengalaman kerja, etika, dan independensi. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama.

Dan dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien. Dalam pelaksanaan

audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman – pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

Selain memiliki pengalaman kerja, auditor juga harus beretika. Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Dan independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai auditor juga harus memiliki independensi yang juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Menurut Poerwadarminta (1983) ukuran perusahaan diartikan sebagai berikut: (1) alat-alat untuk mengukur (seperti menjengkal dan sebagainya), (2) sesuatu yang dipakai untuk menentukan (menilai dan sebagainya), (3) pendapatan mengukur panjangnya (lebar, luasnya, besarnya) sesuatu. Berdasarkan uraian tentang ukuran perusahaan, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran suatu perusahaan.

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya

yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Rasio leverage terdiri dari *Debt to Equity Ratio* dan *Debt Ratio*. *Debt to Equity Ratio* yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal. Semakin besar rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari sisi kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Ang, 1997).

Tingginya DER mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan, sebaliknya tingkat DER yang rendah menunjukkan kinerja yang semakin baik karena menyebabkan tingkat pengembalian yang semakin tinggi, dan investor cenderung memilih DER yang rendah. Sedangkan *debt ratio* atau rasio hutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya. *Debt ratio* atau rasio hutang ini dihitung dengan membagikan total hutang dengan total aset yang dimiliki. *Debt ratio* ini sering juga disebut dengan rasio hutang terhadap total aset.

### 3. Metode Penelitian

Populasi untuk penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi terdaftar di BEI periode 2011-2016 yang sudah di audit dengan spesifikasi (1) Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2016. (2) Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang menyampaikan laporan keuangan berturut-turut periode 2011- 2016. Jenis penelitian ini berdasarkan data dan analisisnya merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori serta hipotesis yang ada kaitannya dengan fenomena alam (Su-

giyono, 2012). Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Di ambil dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi periode 2011 – 2016.

Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Manajemen Laba. Perhitungan pada variabel dependen ini meliputi:

*Total accruals* diperoleh dengan rumus (Teoh, Welch, & Wong, 1998).

$$TAC_t = (NI_t - CFO_t)$$

dengan :

$TAC_t$  : *Total accruals* dalam periode tahun t

$NI_t$  : *Net income* dalam periode tahun t

$CFO_t$ : *Cash flow from operation* dalam periode tahun t

Perhitungan *nondiscretionary accruals*

Diasumsikan oleh De Angelo (1986) jika *total accruals* yang *nondiscretionary* mengikuti pola *random walk*. Maka, *total accruals* yang *nondiscretionary* (tingkat akrual yang wajar atau normal) pada periode t diasumsikan sama dengan *total accruals* yang *nondiscretionary* pada periode t-1.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

dengan keterangan:

$NDA_t$  : *Nondiscretionary accruals* pada periode t

$TAC_{t-1}$  : *Total accrual* dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t

Sesudah menghitung  $NDA_t$ , sehingga bisa dihitung besarnya  $DAt$ , dengan rumus:

$$DAt = (TAC_t - NDA_t) / TAt$$

Dengan keterangan:

$DAt$  = *Discretionary Accruals* pada periode t

$TAC_t$  = *Total accruals* pada perioda tahun t

$NDA_t$  = *Nondiscretionary Accruals* pada periode t

$TAt$  = *Total asset* pada perioda t

Variabel independen yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP (KAP *The big four* dan KAP *nonThe big-4*):

Pengukuran variabel ukuran KAP menggunakan variabel dummy, apabila perusa-

haan menggunakan jasa auditor KAP big four maka nilai 1 dan jika selainnya maka nilai 0 (Gerayli, Ma'atofa, & Yane, 2011).

Ukuran perusahaan dapat menentukan manajer untuk melakukan praktik manajemen. Perusahaan yang besar lebih cenderung hati-hati bertindak dalam mengelola perusahaan dan akan cenderung mengelola laba secara efisien. Menurut Zhou dan Elder (2004) perusahaan yang besar juga akan cenderung mengurangi praktek manajemen laba agar terhindar dari pengawasan yang ketat dari analisis keuangan dan para penanam modal. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan (Gerayli, Ma'atofa, & Yane, 2011). Berikut rumus ukuran perusahaan :

$$Size = Ln TA$$

*Leverage* merupakan perbandingan antara total hutang dan total aset yang menunjukkan beberapa bagian aset yang digunakan untuk menjamin hutang. Perusahaan yang memiliki peluang lebih tinggi dalam melanggar perjanjian hutang maka perusahaan juga cenderung melakukan praktek manajemen laba untuk menaikkan laba perusahaan (Healy & Palepu, 2001). *Leverage* untuk penelitian ini menggunakan proksi debt ratio.

Uji asumsi klasik ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan model. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji normalitas (metode Kolmogorov-Smirnov), Uji multikolinieritas (VIF), Uji autokorelasi (Run test) (Ghozali, 2001)

Penelitian ini mempergunakan analisis Uji Regresi Linier Berganda dengan model empiris sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

$Y$  = Manajemen Laba Perusahaan

$X1$  = Ukuran KAP

$X2$  = Ukuran Perusahaan

$X3$  = *Leverage*

$e$  = error term

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

**4. Hasil dan Pembahasan**

Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan spesifikasi tertentu. Berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya, sehingga diperoleh jumlah sampel 8 perusahaan yang memenuhi spesifikasi tertentu. Maka dari itu jumlah sampel untuk penelitian ini selama periode 2011 sampai 2016 terdapat 48.

Statistik deskriptif mempunyai tujuan guna memberi gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata-rata (mean) dari setiap variabel yaitu ukuran perusahaan, ukuran KAP, leverage, operating cash flow dan manajemen laba.

**Tabel 1. Uji Normalitas**

Variabel	Standard	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
Ukuran KAP			Data
Ukuran Perusahaan	0,05	<0,088	Berdistribusi Normal
Leverage			

Hasil dari uji normalitas diatas menunjukkan nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,08, artinya signifikansi yang dihasilkan >0,05 sehingga bisa disimpulkan jika penelitian ini berdistribusi normal.

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	Standard	VIF	Standard	Keterangan
Ukuran KAP	0,899	>0,1	1,113	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan	0,843	>0,1	1,186	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Debt ratio	0,907	>0,1	1,103	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Tabel 2 menunjukkan jika nilai tolerance ukuran KAP (0,899), ukuran perusahaan (0,843) dan debt ratio (0,907) lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang dihasilkan ukuran KAP (1,113), ukuran perusahaan (1,186) dan debt ratio (1,103) lebih kecil dari 10, hal ini berarti multikolinearitas tidak terjadi pada penelitian ini.

Hasil penelitian Tabel 3 P-Value ukuran KAP sebesar 0,323 lebih besar dari 0,05, P-Value ukuran perusahaan lebih besar dari 0,905 dan P-Value debt ratio sebesar 0,667

lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	P-Value	Standard	Keterangan
Ukuran KAP	0,323	>0,05	Bebas Heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan	0,905	>0,05	Bebas Heteroskedastisitas
Debt Ratio	0,667	>0,05	Bebas Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

Runs Test	
Test Value <sup>a</sup>	Unstandardized Residual
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	18
Z	-1,897
Asymp. Sig. (2-tailed)	,058

Hasil penelitian Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,058 lebih besar dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

**Tabel 5. Uji Regresi Linear**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	
1 (Constant)		,490
Ukuran KAP		-,011
Ukuran Perusahaan		,028
Leverage		-,031

Hasil dari analisis Tabel 5, dapat dijelaskan :

- Nilai konstantan adalah 0,490 artinya jika kualitas audit dengan proksi ukuran KAP, ukuran perusahaan dan leverage dengan proksi debt ratio, maka manajemen laba bernilai positif 0,490.
- Nilai koefisien regresi variabel kualitas audit dengan proksi ukuran KAP (X1) bernilai negatif yaitu -0,011; artinya setiap kualitas audit dengan proksi ukuran KAP dengan kenaikan sebesar 1% maka akan disertai dengan penurunan manajemen laba sebesar 0,011, dengan anggapan nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.
- Variabel ukuran perusahaan (X2) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,028; artinya setiap ukuran

perusahaan dengan kenaikan sebesar 1% akan diikuti kenaikan manajemen laba sebesar 0,028 dengan anggapan nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.

- d. Variabel *leverage* dengan proksi *debt ratio* ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien regresi bernilai negatif yaitu -0,031; artinya setiap *leverage* dengan proksi debt ratio dengan kenaikan sebesar 1% akan disertai dengan penurunan manajemen laba sebesar 0,031 dengan anggapan nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.

**Tabel 6. Uji Kelayakan Model (Uji  $F$ )**

$F$ Hitung	$F$ Tabel	Sig.	Standard	Keterangan
3,373	2,82	0,027	0,05	Model Layak Digunakan

Hasil uji kelayakan pada Tabel 6 menghasilkan nilai  $F$  hitung (3,373) >  $F$  tabel (2,82). Dengan demikian secara simultan variabel ukuran KAP, ukuran perusahaan dan debt ratio berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2016. Sehingga model layak digunakan.

**Tabel 7. Uji  $t$**

Hipotesis	$t$ hitung	$t$ tabel	Sig	Standard	Keterangan
H1	-0,131	>2,01537	0,896	<0,05	Ditolak
H2	2,818	>2,01537	0,007	<0,05	Diterima
H3	-0,192	>2,01537	0,849	<0,05	Ditolak

Hasil uji  $t$  di atas menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung (-0,131) <  $t$  tabel (2,01537), dapat disimpulkan jika ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016. Saat ini kebanyakan masyarakat berfikir jika KAP yang lebih besar maka akan menjamin kualitas audit yang lebih baik, tapi kenyataannya KAP *big four* maupun *non big four* tidak mampu mencegah praktek manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Paramita (2014), Eksandy (2013), Luhgiatno (2010) dan Cristian & Nugrahanti (2014) yang menyatakan jika ukuran KAP tidak memberikan pengaruh

terhadap praktek manajemen laba. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Dinuka dan Zulaikha (2014) yang menyebutkan jika ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ini menunjukkan jika KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang semakin besar, yang mana terdapat auditor yang berpengalaman dan berkeahliantinggi, maka praktek manajemen laba pada perusahaan tersebut akan kecil.

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai  $t$  hitung (2,818) > dari nilai  $t$  tabel (2,01537), maka ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016. Ini berarti jika semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin besar juga keinginan untuk melakukan praktik manajemen laba yang bertujuan untuk menarik para investor dan konsumen. Hal ini juga berarti pengelolaan laba perusahaan diduga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dimana jika ukuran perusahaan semakin besar maka pengelolaan labanya pun semakin tinggi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Medyawati dan Dayanti (2016) yang menyatakan jika manajemen laba dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2014) yang menyatakan jika manajemen laba tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan nilai  $t$  hitung (-0,192) <  $t$  tabel (2,01537), hal ini menunjukkan *debt ratio* tidak memberikan pengaruh terhadap (dvdlaris.com) manajemen laba perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya hutang perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba, dikarenakan sudah adanya perjanjian dari para shareholder, sehingga adanya pengawasan yang ketat menyebabkan manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan shareholder. Jadi untuk mengamankan perjanjian hutang tidak perlu bergantung pada manajemen laba. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Agustia (2013).

## 5. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dengan proksi ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *leverage* dengan proksi *debt ratio* terhadap manajemen laba perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan tidak ditunjang dengan bukti empiris. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Luhglatno (2010), Paramita (2014) dan Eksandy (2013), sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinuka dan Zulaikha (2014) yang menyatakan jika manajemen laba dipengaruhi oleh ukuran KAP. Pengujian hipotesis ke2 menyatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016 didukung oleh bukti empiris. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Medyawati dan Dayanti (2016) dan tidak sejalan dengan penelitian Putri et al (2014). Hipotesis ke3 menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen labaperusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016 tidak didukung dengan bukti empiris. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Agustia (2013).

Penelitian ini juga mencoba untuk menegaskan beberapa variabel yang ada pada penelitian sebelumnya berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan diantaranya ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *debt ratio*. Penelitian ini menunjukkan hanya ukuran perusahaan yang memberikan berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2016.

Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya adalah perusahaan untuk penelitian ini hanya terbatas pada periode 2011 – 2016, nilai koefisien determinasi pada penelitian ini

masih sangat rendah yaitu 13,2% , sedangkan sisanya 86,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan periode penelitian dan menambahkan variabel lainnya yang dapat meningkatkan nilai koefisien determinasi seperti spesialisasi industri auditor, *debt to equity ratio* dan lain – lain.

## Daftar Rujukan

- Agustia, D. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance, Free Cash Flow dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Amijaya, M. D., & Prastiwi, A. (2013). Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi*.
- Ang, R. (1997). *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
- Cheng, Q., & Lee, J. (2016). Internal Governance and Real Earnings Management. *The Accounting Review*.
- Cohen, D. A., & Zarowin, P. (2008). Accrual - Based and real Earning Management Activities Around Seasoned Equity Offering. *Journal of Economic*.
- Cristiani, I., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi*.
- De, A. L. (1981). Auditor size and audit quality. *J Account Econ*, 189-199.
- Deangelo. (1986). Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes : A Study of management Buyouts of Public Shareolder. *Thew Accounting Review*.
- Dechow, P. M., & Skinner, D. J. (2000). Earning Management : Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and regulators. *Journal Univercity of Michigan*.
- Dinuka, V. K., & Zulaikha. (2014). Analisis Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP dan Diverifikasi Geografis Terhadap

- Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Efendy, M. T. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Eksandy, A. (2013). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi*.
- Fitria, A. A. (2013). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Dengan Fee Audit sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi*.
- Gerayli, M., Ma'atofa, S., & Yane, S. A. (2011). Impact of Audit Quality on Earning Management : Form Iran. *Intenational Research Journal of Finance and Economics*.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Hamdi, Saepul, A., & Bahruddin. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Handayani, R. S., & Rachadi, A. D. (2009). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi*.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information Asymetri, Corporate Disclosure and The Capital Markets : A Review of The Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*.
- Leuz. (2003). Earning Management And Investor Protection : an International Comparison. *Journal of Financial Economics*, 505-527.
- Luhglatno. (2010). Analisis Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan yang Melakukan IPO di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Medyawati, H., & Dayanti, A. S. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba : Analisis Data Panel. *Jurnal Universitas Gunadarma*.
- Meutia, I. (2004). Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP big 5 dan non big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 333-350.
- Moradi, M., Salehi, M., & Shirdel, J. (2011). An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange. *Jurnal Ekonomi*.
- Paramita, A. H. (2014). Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba dan Cost of Equity. *Jurnal Ekonomi*.
- Poerwadarminta. (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priyatno, D. (2009). *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, M. S., & Titik, F. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Food and beverage. *e-Proceeding of Management*.
- Rani, P., & Syafruddin, M. (2011). Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Dengan Menggunakan Earning Restatement sebagai Proksi dari Manajemen Laba). *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Restuwulan. (2013). Pengaruh asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Salehi, M., & Nanjegowda, K. (2006). Audit Expectation Gap : Concept J Audit Pract. 69-73.

- Salehi, M., Moradi, M., & Ariyan, P. (2010). A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy. *Global J. Manage.* 148-158.
- Setiawan, J. A. (2013). Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba dan Biaya Modal Ekuitas. *Jurnal Ekonomi.*
- Setiawati, L., & Na'im, A. (2001). Bank Health Evaluation by Bank Indonesia and Earning Management in Banking Industry. *Gajah Mada International Journal of Business*, 159-176.
- Subramanyam, K. R. (1996). The Pricing of Discretionary Accrual. *Journal of Accounting and Economics*, 249-291.
- Sugiarta, I. P. (2008). Auditor eksternal, komite audit dan manajemen laba. *Jurnal Ekonomi.*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyanto, S. (2008). *Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris.* Jakarta: Grasindo.
- Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998). Earning Management and The Long - Run Market Performance of initial public offerings. *The Journal of Finance.*
- Wooten, T. G. (2003). It is Impossible to Know The Number of Poor-Quality Audits that Simply go undetected an unpublicized. *The CPA Journal*, 48-51.
- Zhou, J., & Elder, R. (2004). Audit Quality and Earning Management by Seasoned Equity Offering Firms. *Asia - Pasific Journal of Accounting and Economics.*



## Kode Etik Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah

Setyawan Eko Wardaya, Nur Indah Riwijanti, Apit Miharso

Politeknik Negeri Malang  
setyawanekow@gmail.com

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.122

### Informasi Artikel:

Tanggal masuk 2018-09-04  
Tanggal revisi 2018-09-11  
Tanggal diterima 2018-09-30

### Abstract

*The purpose of this research is to explore whether The Lecturer Accountant's Rules of Conducts has been in line with the perspectives of Maqashid Shariah and to explain the implementation of The Lecturer Accountant's Rules of Conducts in Accounting Department, State Polytechnic of Malang. This research uses primary data obtained from interviews and questionnaires conducted in the Accounting Departement, State Polytechnic of Malang. By using simple random sampling technique, there are two hundred and ninty three respondents who fill the questionnaires. The interview was conducted to three people consisting of two lecturers in the Accounting Department and one from Maqashid Syariah expert, State Islamic University of Malang. The result of this research indicate that the Lecture Accountant's Rules of Conducts have fulfilled the concepts of Maqashid Syariah and in the implementation of the Rules of Conduct, the educator accountant, in general, have done the concepts in accordance with the concept of Maqashid Shariah.*

### Keywords:

*The Lecture Accountant's  
Rules of Conducts,  
Maqashid Syariah*

### Kata Kunci :

Kode Etik Akuntan Pendidik,  
Maqashid Syariah

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kode etik akuntan pendidik yang sesuai dengan pandangan maqashid syariah dan untuk menjelaskan implementasi dari kode etik akuntan pendidik di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dilakukan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, terdapat 293 responden yang mengisi kuesioner. Wawancara dilakukan kepada 3 orang yang terdiri dari 2 orang pengajar di Jurusan Akuntansi dan 1 orang ahli maqashid syariah Universitas Negeri Islam Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik akuntan pendidik telah memenuhi konsep dari maqashid syariah dan dalam implementasi kode etik, akuntan pendidik, secara umum, telah melakukan konsep-konsep yang sesuai dengan konsep maqashid syariah.

### 1. Pendahuluan

Etika merupakan unsur utama profesi dan sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan dalam setiap profesinya. Kode etik akuntan merupakan kajian yang sangat penting bagi akuntan. Etika sangat diperlukan bagi seorang akuntan dalam menjalankan

kegiatan profesional. Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam segala hal mulai dari proses pencatatan hingga pelaporan. Akuntan dituntut untuk selalu mematuhi segala kode etik akuntan. Profesi akuntan meliputi beberapa bidang yaitu akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

Akuntan pendidik merupakan suatu bagian dari profesi akuntan. Akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi, membuat penelitian baru dan mengembangkan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan. Profesi akuntan pendidik memberikan jasa pendidikan kepada seluruh masyarakat agar bisa menciptakan akuntan-akuntan baru yang lebih profesional. Profesi akuntan pendidik sangat dibutuhkan agar seluruh ilmu akuntan dapat berkembang dengan sempurna. Semua generasi akuntan yang profesional dan handal berada ditangan para akuntan pendidik. Dalam melakukan tugasnya akuntan pendidik harus senantiasa bertindak sesuai kode etik yang ada. Akuntan pendidik harus menerapkan tanggung jawabnya serta senantiasa memegang moral dan profesional dalam segala kegiatan yang dilakukannya.

Kode etik akuntan pendidik diperlukan agar profesionalitas pendidik dapat dipertanggung jawabkan. Akuntan pendidik yang menerapkan kode etik dengan baik akan menghasilkan generasi baru akuntan yang lebih profesional dan beretika. Kurikulum yang akan disampaikan juga harus sesuai dengan seluruh kode etik akuntan pendidik. Pengembangan ilmu akuntansi juga harus mengedepankan kode etik akuntan agar kedepannya ilmu akuntansi tetap berada dalam koridor etika akuntan. Kode etik akuntan meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Agama Islam telah mengatur segala sesuatu yang ada di dalam berbagai unsur kehidupan yang ada di muka bumi. Karenanya Allah menjadikan agama ini sebagai anugerah bagi bagi seluruh umat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya :

*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku Ridhai Islam sabagai agama bagimu...”*

Agama telah mengajak seluruh umatnya untuk berbuat sesuai dengan apa yang telah ada di Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'Am ayat 155 yang artinya :

*“Dan ini adalah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.”*

Syariat Islam ditegakkan berdasarkan hukum Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu. Allah telah menitipkan seluruh perintah dan seluruh ilmu melalui perantara Rasulullah. Pemikiran manusia hanya sebatas mengkaji dan mengembangkan dari tafsir apa yang ada dalam Wahyu Allah tersebut. Sehingga manusia hanya mengedepankan imannya dalam mematuhi syariah tersebut (Jauhar, 2017:XIV).

Kemaslahatan umat adalah hal penting karena Allah ingin manusia hidup dalam kebahagiaan dan kejayaan umat. Maqashid Syariah adalah tujuan sebuah syariah. Maqashid bisa diartikan dalam bahasa yang artinya kesenjangan atau tujuan (Jauhar, 2017:XIV). Terdapat lima tujuan syariah ini yaitu untuk menjaga agama (hifdz Ad-Din), menjaga jiwa (hifdz An-Nafs), menjaga akal (hifdz Al-Aql), menjaga harta (hifdz Al-Mal), menjaga keturunan (hifdz An-Nazl).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kode etik akuntan pendidik dapat dibandingkan dengan maqashid syariah yang telah ada. Sehingga dalam implementasinya akuntan pendidik tidak hanya berpedoman dalam kode etik akuntan yang ada melainkan akuntan pendidik juga bisa menerapkan kode etik tersebut sesuai dengan Maqashid syariah yang telah ada. Sehingga dalam proses pendidikannya akan lahir akuntan-akuntan muda yang profesional baik dalam profesinya dan sesuai dengan Syariat Islam.

Seorang akuntan pendidik tidak hanya bertanggung jawab akan dirinya dan profesinya, namun seorang akuntan

pendidik juga harus memikirkan bagaimana maqashid syariah bisa tercapai dengan sempurna. Akuntan pendidik adalah sumber awal lahirnya akuntan masa depan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kode etik akuntan pendidik dalam pandangan maqashid syariah dan mengeksplorasi implemmentasi konsep kode etik akuntan pendidik dalam pandangan maqashid syariah di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang.

## 2. Kajian Pustaka

Definisi etika yang telah disampaikan beberapa ahli memiliki beberapa kesamaan. Beberapa pendapat para ahli semua menyatakan bahwa etika itu merupakan pembeda dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk (Robertson dan Louwers, 2002:462); (Boyton et al, 2001:97); (Arens et al, 2008:98). Prinsip Kode etik akuntan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI diputuskan dalam kongres VIII tahun 1998. Kode etik akuntan Indonesia bertujuan agar akuntan mampu bertanggung jawab kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Kode etik ini mengatur agar anggota selalu bertanggung jawab dan beretika dalam bekerja. Terdapat 8 prinsip kode etik menurut Ikatan Akuntan Indonesia yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektifitas, kompetensi dan kehati hatian, kerahasiaan, perilaku professional, dan standart teknis.

Islam menjaga seluruh apa yang ada dalam diri manusia, memperhatikan perlindungan untuk semua aspek hidup baik moral dan materi. Islam memberikan perlindungan melalui syariah yang telah ditetapkan. Allah menjelaskan apa saja yang perlu dan wajib kita lakukan untuk diri kita sendiri maupun sesama manusia. Maqashid syariah dalam bahasa terdiri dari dua suku kata, kata pertama yaitu maqashid adalah kata dari bentuk jamak yaitu maqashid yang berarti kesenjangan atau tujuan. Dan kata yang kedua yaitu syariah yang artinya jalan menuju air (Ibn dan Manzur, 1975:175).

Maqashid syariah adalah seluruh tujuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Allah. Seluruh tujuan ini dapat dipelajari dalam Al-Quran dan Hadist. Allah membuat seluruh hukum-hukumnya hanya untuk kepentingan umat dan mewujudkan kemaslahatan umat (M. Zein, 2005:233). Allah menciptakan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat-Nya. Kemaslahatan yang dituju tersebut yaitu kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Hal ini disimpulkan dari kajian para ulama terhadap seluruh ayat Al-Quran dan Hadist (Al-Syatibi, 2003:195).

Birton (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah" bertujuan untuk memberikan beberapa penjelasan dari konsep maqasid syariah dan membandingkan dengan berbagai tujuan laporan keuangan. Penelitian ini melihat bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap laporan keuangan entitas syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah berusaha mendorong berbagai macam bentuk kebaikan dan menghindari berbagai bentuk keburukan. Sedangkan Harkaneri (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Urgensi Etika Dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut Pandang Islam", telah menyinggung urgensi etika dalam sudut pandang Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting etika dalam akuntansi, jika dilihat berdasarkan sudut pandang Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana Islam melihat pentingnya sebuah etika dalam akuntansi. Jika etika Islam tersebut dilakukan, maka beberapa kasus kecurangan bisnis dan kasus pelanggaran etika tidak akan terjadi. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa banyaknya kasus pelanggaran kode etik akuntansi bila dilihat dalam sudut pandang Islam. Agama Islam merupakan agama universal, di mana jika seluruh kode etik digabungkan dengan seluruh sudut pandang Islam, maka dalam pelaksanaannya kecurangan akan menjadi sangat minim.

### 3. Metode Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi perhatian penting dalam suatu penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran dalam penelitian agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objek penelitian yang dipilih adalah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam bentuk studi kasus. Metode ini menekankan penelitian yang objeknya tidak dapat diukur dengan angka ataupun ukuran lainnya. Penelitian kualitatif ada karena kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumbernya untuk bisa diamati dan dicatat. Data ini merupakan sumber bahan utama penelitian. (Surahmat, 1994: 134). Dalam hal ini adalah informasi atau persepsi dari informan. Sumber dari data primer tersebut diperoleh dari penuturan maupun catatan pelaku (Faisal, 1982: 390-393). Dalam penelitian ini data primer yaitu seluruh dokumen atau catatan yang disiapkan dan telah ditulis dari semua hasil. Data pertama yaitu seluruh wawancara dengan ahli dalam bidang syariah dan akuntan pendidik mengenai kode etik akuntan pendidik dalam perspektif maqashid syariah. Data kedua merupakan hasil dari kuesioner yang dilakukan kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang mengenai penerapan kode etik akuntan pendidik. Penelitian ini membandingkan bagaimana kode etik akuntan yang sesuai dengan maqashid syariah. Sedangkan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah pengajar akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang serta ahli maqashid syariah yang juga sebagai pengajar pada Universitas Islam Negeri Malang.

Dalam proses pemilihan informan digunakan metode *purposive sampling* dengan berbagai kriteria antara lain tenaga

pendidik atau pengajar yang beragama Islam, tenaga pendidik atau pengajar yang memiliki ketertarikan dalam bidang pengembangan syariah, tenaga pendidik atau pengajar yang memegang teguh kode etik akuntan pendidik, dan ulama yang memperdalam ilmu tentang maqashid syariah.

Sedangkan dalam penyebaran kuesioner populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang yang berjumlah kurang lebih 1600 orang. Teknik yang digunakan dalam memilih responden dalam pengisian kuesioner menggunakan metode *simple random sampling*. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengacu pada tabel Issac dan Michael. Dalam hal ini menggunakan signifikansi 5% sehingga jumlah sampel yang terpilih minimal sebanyak 286 mahasiswa. Namun dalam penyebaran kuesioner keseluruhan responden yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 293 orang.

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menyusun daftar pertanyaan. Selanjutnya membuat kuesioner untuk lebih mengetahui bagaimana implementasi kode etik akuntan pendidik. Kuesioner ini dilakukan pada mahasiswa Politeknik Negeri Malang Jurusan Akuntansi. Kuesioner ini berisi beberapa poin-poin kode etik akuntan pendidik yang telah ada. Informan yang dibutuhkan yaitu akuntan pendidik yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang dan pengajar Universitas Islam Negeri Malang sebagai ahli dalam bidang maqashid syariah. Responden dipilih berdasarkan metode *simple random sampling*. Dari sekitar 1600 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner sebanyak 293 orang, jumlah itu melebihi jumlah sampel minimal sebanyak 286 orang. Sampel tersebut terdiri dari berbagai program studi, baik D4 Akuntansi Manajemen, D3 Akuntansi, dan D4 Keuangan. Dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah ada, data tersebut digunakan untuk melakukan proses berikutnya. Hal kedua, data berbentuk

*voice recorder* diubah terlebih dahulu menjadi data dalam bentuk teks. Proses ini merupakan proses inti dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini dikembangkan menuju bagaimana seharusnya implementasi dari kode etik perspektif maqashid syariah. Analisis ini bertujuan agar penelitian ini dapat berguna bagi objek yang telah diteliti.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam proses wawancara, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan ringkas yang dapat dikembangkan dalam berjalannya proses wawancara. Hal ini bertujuan agar narasumber yang ada menjawab pertanyaan yang diajukan dengan berpacuan pada kode etik akuntan pendidik dan dinilai apakah telah sesuai dengan nilai-nilai dari maqashid syariah. Terdapat delapan poin dalam kode etik akuntan pendidik berdasarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang ada dan dinilai berdasarkan lima nilai dalam maqashid syariah.

Kode etik akuntan tersebut dinilai oleh narasumber apakah telah sesuai dengan nilai nilai maqashid syariah yang telah ada. Nilai-nilai maqashid syariah tersebut antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Wawancara yang dilakukan kepada tiga orang narasumber antara lain yaitu dua orang akuntan pendidik pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang dan satu orang merupakan ulama yang memperdalam ilmu tentang maqashid syariah yang juga pendidik di Universitas Islam Negeri Malang.

Tanggung jawab profesi merupakan kode etik akuntan pendidik yang pertama. Hal ini menyangkut profesionalitas dan pertimbangan moral dalam bekerja. Hal ini sangat penting mengingat akuntan pendidik harus sangat bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan ilmu dengan benar. Kita dapat menilai bagaimana kode etik tanggung jawab profesi mampu atau tidak dalam memenuhi maqashid syariah. Narasumber pertama berpendapat bahwa:

“...Dari kode etik yang pertama yaitu

tanggung jawab profesi harus profesional itu menjaga akal. Pertimbangan moral dalam bekerja lebih kearah menjaga agama dan jiwa.”

Kode etik akuntan berikutnya yaitu kepentingan publik. Sebagai seorang akuntan sangat erat kaitannya dengan publik. Hampir seluruh akuntan selalu berhubungan dengan publik. Baik itu akuntan publik, akuntan perusahaan, dan akuntan pendidik itu sendiri. Akuntan dituntut untuk menjaga nama baik profesinya pada publik. Kepercayaan publik sangat erat kaitannya dengan jasa akuntan. Sehingga, komitmen dan profesionalisme juga dituntut dalam setiap pengambilan keputusan untuk tidak menerima segala bentuk kecurangan juga sebagai cara agar kepercayaan publik tetap terjaga. Sebagai akuntan pendidik hal-hal di atas ditanamkan pada seluruh anak didik. Dalam hal ini kita menilai bagaimana kepentingan publik apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah. Ketiga narasumber berpendapat bahwa komitmen dan profesionalisme dapat dikategorikan menjaga harta dan menjaga akal yang diperkuat dengan kisah dari Nabi Yusuf As :

*“Jadikan aku menteri yang aku menjaga kekayaan ini karena aku orang yang amanah dan alim atau mempunyai ilmu. Tidak menerima bentuk kecurangan menjaga agama.”*

Sebagai akuntan pendidik, integritas merupakan hal yang sangat penting. Mengajarkan kepada mahasiswa untuk bersikap jujur, tegas, dan lugas. Selain itu akuntan pendidik tidak bisa memberikan informasi yang menyesatkan mahasiswa. Narasumber kedua berpendapat bahwa semua hal yang menyangkut dengan integritas merupakan proses dalam menjaga agama. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari narasumber ketiga yaitu “Jujur, tegas, dan lugas bisa artinya apa adanya ya. Jujur ini menjaga agama. Tegas disini bisa menjaga

harta dan agama. Kalau tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan ini, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.”

Ketika menjalankan segala sesuatu dalam profesi dengan tegas, maka seluruh harta akan terjaga. Karena ketika terjadi peluang kecurangan, kita akan tegas untuk menjawab tidak. Selain itu, menyampaikan informasi yang tidak menyesatkan termasuk dalam menjaga keturunan, dalam hal ini bukan hanya keturunan biologis melainkan keturunan atau kelanjutan profesi. Selain itu menjaga jiwa, ketika tidak ada informasi yang menyesatkan maka jiwa orang yang telah dididik tidak terancam.

Dalam profesi akuntan pendidik, objektivitas berkaitan dengan tidak terpengaruh benturan kepentingan, baik kepentingan pribadi atau golongan. Selain hal itu adil dalam mengambil keputusan, keputusan tersebut bisa terkait dengan nilai ataupun dalam memperlakukan setiap individu mahasiswa. Narasumber pertama berpendapat sebagai berikut: “Objektivitas adalah kita tidak terpengaruh benturan kepentingan yang berarti menjaga harta. Dengan kata lain, adil dalam mengambil keputusan. Kalau kita perhatikan dalam segi akuntan di perusahaan yang berbentuk PT kita harus adil dalam membagi deviden dan mengambil keputusan.”

Mengacu pada pendapat di atas bahwa menjaga harta dalam pendapat tersebut adalah tidak mementingkan diri sendiri dan golongan. Sehingga ketika bekerja harus totalitas dan tidak gaji buta. Dalam sesi lain narasumber kedua memberikan pendapat bahwa objektivitas merupakan proses dalam diri kita untuk menjaga akal dan jiwa.

Sebagai seorang akuntan pendidik kompetensi sangat dibutuhkan untuk penyampaian materi. Karena dalam hal ini ilmu pengetahuan sangat cepat untuk berkembang. Sebagai pendidik seharusnya selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Selain itu pendidik dituntut untuk selalu bertindak tekun dan cermat. Narasumber ketiga berpendapat bahwa:

“Memelihara pengetahuan dan keahlian profesi ini adalah menjaga akal. Bertindak tekun dan cermat ini adalah menjaga harta. Berhati-hati dalam mengambil keputusan ini adalah menjaga agama dan menjaga harta.”

Dalam hal ini unsur menjaga harta lebih banyak, karena akuntansi berhubungan dengan harta. Ketika terjadi kesalahan dan ketidak-hati-hatian maka harta tidak akan terjaga lagi. Pendapat di atas diperkuat lagi dengan penjelasan yang lebih mendalam oleh narasumber “Jadi gini ilmu itu ada dua kan yang harus dimiliki, pertama ilmu yang terkait dengan kewajiban Allah SWT yang dalam menjalankan kewajiban itu ada ilmunya. Jadi kalau sebagai pendidik harus ada ilmu sebagai pendidik. Kedua ilmu yang terkait sebagai profesinya, saya sebagai akuntan berarti saya harus memiliki ilmu akuntansi.” Memelihara pengetahuan dan keahlian merupakan kewajiban dari setiap manusia. Tidak sedikit perintah untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Bahkan di dalam Al Quran terdapat ayat yang ada kaitannya dengan profesi dan ilmunya. Sehingga dapat diambil pelajaran bahwa semua tindakan harus didasari oleh ilmu pengetahuan dan selalu dikembangkan. Berhati-hati dalam mengambil keputusan juga merupakan hal penting dalam perilaku akuntan pendidik. Selain mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, akuntan pendidik wajib menanamkan pada anak didiknya untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal tersebut diperkuat dengan hadist sebagai berikut:

*“Kehati-hatian itu datangnya dari Allah SWT, sedangkan ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan.” (HR Baihaqi)*

Kerahasiaan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik. Dalam hal ini sebagai contoh yaitu aib dari mahasiswa. Sebaiknya seorang pendidik tidak menyampaikan sesuatu aib mahasiswa di depan kelas. Pendidik bisa melakukan pendekatan melalui pemanggilan siswa yang bersangkutan. Selain itu tidak

sedikit pendidik yang memiliki profesi akuntan lain. Dalam hal ini informasi klien diluar tidak bisa diceritakan kepada siapapun termasuk dalam proses belajar mengajar. Narasumber pertama berpendapat bahwa “Menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan pribadi itu menjaga agama, yang berarti kita amanah.”

Sedangkan narasumber kedua memiliki pendapat bahwa tidak menggunakan informasi klien dan kerahasiaan termasuk dalam upaya kita menjaga harta dan agama. Hal ini karena agama sangat memegang teguh sikap amanah. Sebagai seorang akuntan tidak bisa semena-mena menggunakan data klien. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari narasumber ketiga yang ahli dalam kajian maqashid syariah yang menyatakan bahwa “Menjaga kerahasiaan informasi ini untuk menjaga agama dan akal. Tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan pribadi ini untuk menjaga agama dan menjaga jiwa. Informasi yang salah juga bisa merusak generasi. Selain itu informasi yang salah juga bisa menghilangkan harta, bahkan sampai bisa menghilangkan jiwa. Menjaga kerahasiaan informasi ini kaitannya dengan amanah.”

Dari pendapat di atas dapat kita perhatikan bahwa menjaga rahasia merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya menjaga agama, bahkan jiwa seseorang bisa terenggut ketika tidak bisa menjaga rahasia. Tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan pribadi juga merupakan proses dalam menjaga agama dan jiwa. Sebagai contoh pada dunia bisnis zaman sekarang ketika seorang akuntan tidak dapat menjaga rahasia seorang klien maka beresiko menghilangkan jiwa. Bahkan dalam dunia bisnis terkadang bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ketika seseorang berbuat kesalahan maka seseorang tersebut akan berbuat kesalahan lagi untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun seperti yang kita ketahui sebagai seorang mukmin kita

memiliki perintah untuk selalu menjaga harta dan jiwa orang lain.

Dalam hal yang berkaitan dengan akuntan pendidik, akuntan pendidik harus taat dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan. Selain itu nama baik profesi harus selalu diperhatikan dan dijaga dalam setiap tindakan. Bertindak profesional dalam bekerja demi menjaga nama baik dan melahirkan akuntan baru yang lebih baik. Narasumber pertama yang merupakan akuntan pendidik berpendapat sebagai berikut “Mematuhi ketentuan hukum dan peraturan ini jelas menjaga agama dan menjaga keturunan. Selain itu, menjaga reputasi baik profesi juga menjaga agama dan menjaga keturunan. Karena ketika kita tidak menjalankan ketentuan hukum dan peraturan jelas anak keturunan kita ikut.”

Dari pendapat di atas dapat kita peroleh sebuah gambaran bahwa betapa pentingnya menjaga perilaku profesional. Narasumber kedua berpendapat bahwa perilaku profesional merupakan hal mutlak. Hal tersebut untuk menjaga agama dan harta, karena ketika akuntan pendidik bersikap profesional maka tidak akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sedangkan, narasumber ketiga berpendapat sebagai berikut “Perilaku profesional mematuhi ketentuan hukum dan peraturan menjaga agama. Menjaga reputasi baik profesi ini untuk menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud disini bukan keturunan biologis saja, melainkan keturunan profesi juga jangan sampai karena satu akuntan ini nama akuntan ini jadi buruk. Ini juga gitu menanamkan mahasiswa untuk selalu komitemen terhadap aturan yang ada.” Dalam hal ini akuntan pendidik menanamkan nilai-nilai serta komitmen terhadap aturan dan etika. Dalam proses pembelajaran mahasiswa diberikan pedoman berupa nilai-nilai kode etik akuntan. Sehingga setelah lulus, akuntan muda sudah paham dan dapat memenuhi apa yang tertuang dalam kode etik profesi akuntan. Standart teknis dibuat dan disusun oleh ahli dalam bidangnya yang tergabung dalam ikatan profesi. Hal ini semata-mata

karena menjaga akal untuk selalu memenuhi dan bertindak sesuai standart. Berbeda dengan pendapat narasumber pertama, narasumber kedua berpendapat bahwa itu semua dalam proses menjaga agama dan menjaga jiwa.

Selain itu mengambil keputusan sesuai standart merupakan prsoses menjaga akal dan agama. Karena di situlah kita menggabungkan agama dan akal. Ketika memenuhi standart teknis harus sesuai akal dan aturan yang bersifat logika. Namun, disisi lain ada pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Sebagai contoh narasumber ketiga berpendapat bahwa “Ini tadi saya sampaikan ada pertanggung jawaban, jadi jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ibaratnya begini kalau kita melakukan sholat niatnya ikhlas dan tepat. Kalau perusahaan melakukan peraturan jual beli, kalau yang dipraktekan tidak sesuai dengan aturan kan jadi masalah. Jadi bertindak ini bagian dari jangan bertindak jika tidak mempunyai ilmu karena semua akan dimintai pertanggung jawaban.”

Terkait dengan implementasi kode etik akuntan pendidik dalam perspektif maqashid syariah, penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner pada mahasiswa seluruh program studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Kuesioner tersebut mngukur implementasi kode etik akuntan pendidik yang diuraikan dalam 18

pertanyaan. Penilaian ini dilakukan untuk menilai seberapa baik akuntan pendidik dalam menjalankan kode etiknya sebagai akuntan pendidik. Selain itu beberapa pertanyaan digunakan untuk menilai seberapa jauh akuntan pendidik melakukan nilai-nilai maqashid syariah. Berikut data hasil rangkuman kuesioner yang telah dibagikan.

## 5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, dapat diperoleh hasil bahwa kode etik akuntan pendidik telah sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Pendidik menilai bahwa apa yang telah dilakukan dan dipatuhi telah sesuai dengan maqashid syariah. Semua poin yang telah tertulis dapat memenuhi konsep dasar maqashid syariah. Poin dalam kode etik akuntan pendidik memenuhi dalam proses menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta serta menjaga ketuturan.

Dalam hal implementasi kode etik akuntan, responden menilai pendidik telah memenuhi dan mematuhi kode etik akuntan pendidik. Hanya sebagian kecil responden mengungkapkan bahwa, pendidik belum memenuhi hal-hal yang menyangkut kode etik dan maqashid syariah. Selain itu, tanpa disadari pendidik telah menamkan konsep dasar maqashid syariah kepada mahasiswa.

**Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Kuesioner**

No	Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total Responden
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pengajar melakukan proses belajar mengajar dengan profesional	86	29.4	204	69.6	3	1.0	0	0.0	293
2	Pengajar selalu menjaga moral dalam proses belajar mengajar	95	32.4	194	66.2	4	1.4	0	0.0	293
3	Pengajar mementingkan kepentingan mengajar daripada kepentingan pribadi	53	18.1	216	73.7	24	8.2	0	0.0	293
4	Pengajar mengajak seluruh mahasiswa bertindak jujur	139	47.4	148	50.5	4	1.4	2	0.7	293
5	Pengajar selalu berakal tegas dalam mengambil segala keputusan	93	31.7	184	62.8	16	5.5	0	0.0	293
6	Pengajar memberikan nilai sesuai dengan kemampuan mahasiswa	58	19.8	191	65.2	42	14.3	2	0.7	293
7	Pengajar menguasai materi yang akan diajarkan	119	40.6	169	57.7	5	1.7	0	0.0	293
8	Pengajar tidak pernah menentalkan hal-hal yang bersifat rahasia dan suatu entitas	69	23.5	199	67.9	25	8.5	0	0.0	293
9	Pengajar menjaga privasi dari setiap mahasiswa	90	30.7	179	61.1	24	8.2	0	0.0	293
10	Pengajar bertindak sesuai dengan peraturan jurusan dan kampus	79	27.0	197	67.2	17	5.8	0	0.0	293
11	Pengajar selalu menjaga kerahasiaan sebagai pengajar yang baik	83	28.3	195	66.6	14	4.8	1	0.3	293
12	Pengajar selalu menjelaskan dan mengajar sesuai standart akuntansi yang ada	99	33.8	187	63.8	6	2.0	1	0.3	293
13	Pengajar tidak pernah menyalah mahasiswa untuk perorangan pada saat belajar	136	46.4	141	48.1	14	4.8	2	0.7	293
14	Pengajar tidak pernah memukul atau memaki mahasiswa	148	50.5	140	47.8	4	1.4	1	0.3	293
15	Pengajar tidak pernah mengulangi kata-kata yang menentalkan mahasiswa	76	25.9	159	54.3	55	18.8	3	1.0	293
16	Pengajar memberikan nasihat mengenai menghormati uang dan korupsi	122	41.6	163	55.6	8	2.7	0	0.0	293
17	Pengajar memperhatikan mahasiswa sebagai manusia	67	22.9	192	65.5	33	11.3	1	0.3	293
18	Pengajar selalu memberikan nasihat kepada seluruh mahasiswa	128	43.7	159	54.3	6	2.0	0	0.0	293

Di sisi lain ahli maqashid syariah telah memberikan beberapa teori dan sikap yang menunjukkan bahwa kode etik akuntan pendidik sudah memenuhi konsep maqashid syariah. Selain itu kode etik yang berlandaskan budaya dapat memenuhi dan mengarahkan pendidik menuju akhlak yang berlandaskan Al Quran dan Hadist. Kode etik yang ada bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan umat yang sesuai dengan konsep maqashid syariah.

Narasumber berpendapat bahwa kode etik akuntan pendidik telah sesuai dengan maqashid syariah secara keseluruhan. Dalam implementasinya maqashid syariah di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang telah memuat secara detail aspek-aspek menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Secara umum aspek-aspek tersebut telah terpenuhi di dalam kode etik akuntan pendidik.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur kesesuaian kode etik akuntan pendidik dengan maqashid syariah adalah aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif tersebut merupakan motivasi diri untuk berorientasi pada nilai-nilai agama, sedangkan aspek objektif merupakan motivasi diri untuk berorientasi pada harta, akal, jiwa, dan keturunan. Hal yang terkait dengan masalah-masalah menjaga agama dinilai dari unsur niat dan motivasi. Dari kode etik yang telah ada kita dapat melihat kandungan dua unsur tersebut. Peran pendidik sangat penting dalam menanamkan motifasi pada mahasiswa untuk berorientasi pada akhirat.

Pendidik harus memunculkan motivasi anak didik untuk selalu menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT dalam segala situasi. Akuntan pendidik juga dituntut untuk meningkatkan kualitas diri anak didiknya. Sehingga tidak hanya menjalankan peraturan sesuai kode etik, tetapi bisa menjalankan aturan berlandaskan akhlak Islam. Sehingga mahasiswa yang melalui proses pendidikan tidak hanya sukses di dunia namun juga sukses di akhirat.

## Daftar Rujukan

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. "al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah." Kairo: Mustafa Muhammad, tt (1975).
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Erlangga (2008)
- Birton, M. Nur Abdullah. Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6.3 (2016): 421-431.
- Boynton, William C., Walter Gerry Kell, and Ray Johnson. Modern auditing. Wiley, 2001.
- Effendy, Satria, Muhammad Zein, and M. Zein. Ushul fiqh. Kencana, 2005.
- Faisal, Sanapiah. 1982. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Harkaneri, Harkaneri. Urgensi Etika Dalam Akuntansi Dilihat Dari Sudut Pandang Islam." *Jurnal EL-RİYASAH* 4.1 (2013): 48-5
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, and Khikmawati (Kuwais). Maqashid syariah. AMZAH, 2017.
- Manzur, Yamal al-Din Muhammad Ibn. Lisan al-arab. Al Dar al-Misriyya Li-l-ta'lif wa-l-tarhim, 1975.
- Robertson, Jack C., and Timothy J. Louwers. Auditing and Assurance Services. McGraw-Hill Publishing Company, 2002.
- Surahmat, Winarno. Penelitian Ilmiah. (1994).



## Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*

Agus Wahyudi<sup>1</sup>, Rr. Sri Pancawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, <sup>2</sup>Universitas Mataram

Agus Polly@yahoo.com

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131

### Informasi Artikel:

Tanggal masuk	3-9-2018
Tanggal revisi	11-9-2018
Tanggal diterima	30-9-2018

### Keywords:

*Village Financial Management, Good Governance*

### Abstract

*This study aims to analyze the harmony in village financial management in realizing good governance which is seen from the principles of transparency, accountability, and participatory. This research is a qualitative research using interpretive paradigm with informants namely the Village Head, Village Secretary, Section Head, Village Consultative Agency, and Community. The findings indicate that village financial management starting from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages has proceeded in according to the principles of transparency, accountability and participatory compliance with the laws and regulations derived from it.*

### Kata Kunci :

*Pengelolaan Keuangan Desa, Good Governance*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keharmonisan dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance yang dilihat dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif dengan informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan sesuai dengan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan turunannya.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 74.957 desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa juga sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (Misbahul Anwar (2012) dalam Rahmawati; 2015), namun sebenarnya desa memiliki budaya yang turun temurun dan kearifan lokal yang luar biasa. Keberadaan desa juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan sebuah revolusi pada desa untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dana/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah juga mengguncurkan dana desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya dana desa membuat pendapatan desa semakin bertambah yang semulanya pendapatan desa hanya bersumber dari pendapatan transfer bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan, dan pendapatan lain-lain. Sehingga membuat Pemerintah Desa untuk berhati-hati dalam bekerja.

Penggunaan pendapatan desa untuk membiayai kegiatan di desa diharapkan dapat berpegang teguh pada asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas ini merupakan perwujudan dari *good governance*. Di mana *good governance* adalah sebuah tuntutan dari publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan tiga unsur dalam ruang *governance* agar dapat bekerja dengan baik yakni pemerintah, sektor

swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerja sama dari unsur tersebut agar pemerintah benar-benar mampu memerintah (Amiruddin *et al*; 2012)

Dalam rangka menanggapi tuntutan publik terhadap pemerintah desa dalam menciptakan *good governance* maka diharuskan pemerintah desa dapat memperbaiki kinerja birokrasi yang profesional guna meningkatkan pelayanan pada publik. Seperti yang terjadi pada Desa Uma Beringin Kecamatan Kabupaten Sumbawa, di mana desa ini merupakan desa yang menerima predikat Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan maju dalam festival DBIP tingkat nasional pada tahun 2017 dan menjadi perwakilan desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta berkompetisi dalam festival dengan kegiatan Cerdas Tangkas, Gelar Budaya, Sambung Rasa, dan penganugerahan DBIP Award melawan 5.000 desa dari 34 Provinsi yang diselenggarakan mulai dari 28 November 2017 – 30 November 2017 di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB ([www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)). Adanya hal tersebut diharapkan Pemerintah Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes khususnya dan Pemerintah Desa lainnya dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja guna menciptakan *good governance*. Terciptanya *good governance* juga perlu didukung dengan keharmonisan hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dijalankan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Adanya kehar-

monisan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat begitu penting agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain Thomas (2013); Irma (2015); Nafidah dan Mawar (2015) sebagian besar menyoroiti pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sehingga untuk melengkapi penelitian terdahulu, peneliti menambahkan tahap penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa serta lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini berlokasi pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini juga melengkapi penelitian terdahulu yang hanya melihat pengelolaan keuangan desa dari asas akuntabilitas (Irma (2015); Nafidah dan Mawar (2015); Indrianasari (2017)), dan asas transparansi (Amiruddi, *et al* (2012; Iqsan (2016); Ritongo dan Syamsul (2016)), untuk melengkapi penelitian ini maka peneliti melihat pengelolaan keuangan desa dari asas akuntabilitas, transparansi, dan menambahkan asas partisipasi sebagaimana tercantum dalam Permendagri 113/2014 dan Perbup. Sumbawa No. 12/2015. Atas dasar inilah, maka penulis tertarik meneliti tentang keharmonisan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan *good governance* baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Adanya tulisan ini diharapkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Uma Beringin Khususnya dan Desa-Desa lain pada umumnya dapat berjalan secara maksimal dan mengedepankan kebutuhan publik.

## 2. Kajian Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan indivi-

du tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

*Stewardship theory* berangkat dari perspektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. Dalam *stewardship theory*, pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. *Stewardship theory* dalam akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara *shareholder* dan manajemen, atau dapat pula hubungan antara top manajemen dengan para manajer dibawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing (Anton, 2010).

Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan transparan, akuntabel, dan mengedepankan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukannya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk terpenuhinya *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa maka *stewards* (manajemen) atau pemerintah desa mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi

keuangan yang berkualitas dan dapat memegang teguh asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang diberikan hak-hak istimewa, salah - satunya adalah terkait pengelolaan anggaran desa. Dalam pengelolaan anggaran desa harus diterapkannya prinsip transparansi karena desa adalah ujung tombak dari miniatur pemerintahan Republik Indonesia (Iqsan; 2016).

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen, masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Mereka bermasyarakat rukun dan guyub. Karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) (Amiruddin, *et al*; 2012).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa yang menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat ialah pemerintah desa yakni kepala desa dibantu oleh

perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Di mana dalam konteks pengelolaan keuangan desa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa juga dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yakni sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

*Good governance* merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh negara dalam rangka mencapai tujuannya. Di mana karakteristik *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yakni pemerintah desa wajib mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam bekerja guna terpenuhi tuntutan tersebut.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi terbentuk atas dasar arus informasi yang bebas atas seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Konsep transparansi berhubungan erat dengan adanya ketersediaan informasi, kemudahan diakses dan digunakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Namun transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat di akses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah (Ritonga dan Syamsul; 2016). Sehingga dalam konteks transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib transparan dalam bekerja yakni dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga dari pembentukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga diterbitkannya laporan pertanggungjawaban

harus benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya. Dalam mencapai transparansi tersebut pemerintah desa wajib bersedia memberikan informasi kepada publik dengan tepat waktu dan mempertimbangkan kemudahan publik untuk mendapatkan informasi serta informasi yang diberikan mudah dipahami, benar apa adanya, akurat, memadai, dan lengkap.

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan *good governance* yang sedang dilakukan bangsa Indonesia pada saat ini. Akuntabilitas publik masyarakat bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (*public policy*), mengatur dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan (Kusuma; 2012).

Adanya akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk bertanya atau menggugat pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa baik pada tingkat program, daerah, maupun masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan mengedepankan asas akuntabel yakni memberikan pertanggungjawaban kepada publik baik pada masyarakat, BPD, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. namun tidak pada pihak eksternal saja, dalam struktur pemerintahan baik atasan kepada bawahan maupun bawahan ke atasan harus akuntabel dalam bekerja, guna tidak ada tumpang tindih dalam bekerja.

Adanya perubahan paradigma anggaran

di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Dalam konteks keuangan desa, untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi Kepala Desa dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adanya partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi ditingkat desa karena dalam partisipasi menyangkut aspek perencanaan dan pengawasan anggaran.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa semua unsur yang terdapat dalam masyarakat desa perlu berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Di mana unsur-unsur tersebut antara lain pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain perlu berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Unsur-unsur ini dapat berpartisipasi melalui penyampaian gagasan dalam pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan desa, baik berupa pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa mengulas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa tahun berkenan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa hingga penyusunan Rancangan APB-Des yang dilakukan melalui Musrembang. baik di tingkat dusun maupun desa sehingga terbentuklah APBDess yang transparan dan mengedepankan partisipatif. Kemudian Rancangan APBDes dievaluasi oleh Bupati dan terakhir penetapan APBDes.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa mengulas bagaimana Kepala

Seksi bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan. bentuk pertanggungjawaban perlu juga didukung dengan adanya dokumen rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti transaksi yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Tahap pelaksanaan di sini juga menilai seberapa jauh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan unsur masyarakat.

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa menilai bagaimana akuntabelnya Bendahara Desa baik pada Sekretaris Desa, Kepala Desa, maupun Pemerintah di atasnya mempertanggungjawabkan kas desa. Di mana bentuk pertanggungjawabannya ialah Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pencatatan tersebut menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini ialah menilai akuntabel dan transparansi pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala desa dalam hal menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan semester kedua. Sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dan transparansi anggaran kepada pemerintah di atasnya.

Terakhir yakni tahap pertanggungjawaban. Dalam tahap ini pemerintah desa berkewajiban menjalankan asas akuntabilitas dan transparansi baik kepada Bupati setiap tahun anggaran serta diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisi laporan realisasi pelaksanaan APBDes., laporan kekayaan milik desa, dan laporan tentang program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di desa.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskrip-

tif kualitatif, di mana penelitian ini berguna untuk mengungkapkan atau menemukan apa yang terjadi dan kemudian membuktikan apa yang ditemukan, penelitian ini juga untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat yang dinilai dari perilaku, persepsi, dan lain-lain dari informan. Dalam penelitian ini juga menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif berasal dari pemikiran Jerman. Fokus paradigma ini adalah pada bahasa, interpretasi simbol, dan pemahaman ilmu sosial serta pemikiran manusia. Dalam sosiologi, manusia dan sosial memiliki hubungan saling mempengaruhi secara inheren (Darmayasa dan Yuyung, 2015). Kualitas teori dalam paradigma ini diukur dari kemampuannya untuk memaknai serta lebih cenderung mengungkapkan temuan-temuan yang ada di masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan *good governance* baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Sehingga informan dalam penelitian ini ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang. baik di tingkat dusun maupun desa.

Adapun teknik pengumpulan data yakni menggunakan wawancara tidak terstruktur. Di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan terinci, namun secara besar peneliti berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga satuan kajian dalam penelitian ialah mengarah pada perhatian peneliti yakni mengungkap keharmonisan Pemerintah Desa dengan, BPD, dan mas-

yarakat dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance* dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penilaian *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di nilai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. teknik analisis data meliputi mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (2017) Desa Uma Beringin merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan UnterIwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Desa Uma Beringin mencapai 3,66 KM<sup>2</sup> dan jarak dari kantor kecamatan ke kantor desa 1, KM serta memiliki jumlah penduduk sebesar 2.304 jiwa dengan 1.137 jiwa laki-laki dan 1.167 jiwa perempuan. Desa ini memiliki 3 dusun yakni Dusun UnterGedong, Dusun Uma Beringin, dan Dusun Uma Kopang. Dengan jumlah aparatur desa berjumlah 9 orang, ketua RW 8 orang, dan ketua RT 16 orang. Adapun batas wilayah, mata pencarian, dan jumlah aparatur desa disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Batas Wilayah Desa Uma Beringin**

Sumber: [www.umaberinginsumbawa.desa.kemendesa.go.id](http://www.umaberinginsumbawa.desa.kemendesa.go.id), 2018

**Tabel 2. Mata Pencarian Penduduk Desa Uma Beringin**

Sumber: [www.sumbawakab.bps.go.id](http://www.sumbawakab.bps.go.id), 2018

Berdasarkan Tabel 2 maka mayoritas masyarakat Desa Uma Beringin menjadi petani sebanyak 211 kepala keluarga atau sekitar 39%. Sedangkan masyarakat yang bermata pencarian paling rendah yakni sebagai tukang jahit sebanyak 4 kepala keluarga dengan proporsi sebesar 1 %. Desa Uma Beringin Termasuk ke dalam kategori Desa Swakarya. Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan

produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Di mana terlihat dari mata pencaharian yang mayoritas adalah bertani. Hasil pertanian Desa Uma Beringin ialah padi yang selalu di pasarkan baik dalam daerah Kabupaten Sumbawa maupun ke luar Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara harmonis oleh pemerintah desa, baik sesama pihak internal maupun eksternal agar tujuan dari pengelolaan keuangan desa tercapai. Adanya harmonisasi ini diharapkan mampu menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari tahap perencanaan inilah dimulainya sebuah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif semua elemen dalam pengelolaan keuangan desa. Di mana Sekretaris Desa Uma Beringin menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun berkenan. Di mana rancangan ini dibuat berdasarkan aspirasi-aspirasi baik dari masyarakat Desa Uma Beringin, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak-pihak terkait. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa:

*“Kita selalu melibatkan masyarakat. Kita undang semua Perangkat Desa, RT., RW., Kadus., tokoh agama, tokoh pemuda” (Suraiman, Kepala Desa Uma Beringin, lokasi Kantor Desa Uma Beringin Rabu 31 Januari 2018 Pukul 11.25 WITA).*

Aspirasi-aspirasi ini disampaikan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam tahap Musrenbangdes. Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak dua kali yakni Musrenbangdes. Pada tingkat dusun dan Musrenbangdes. Pada tingkat desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yakni:

*“Pelaksanaan Musrenbang. diadakan pada tingkat Dusun dulu, setelah itu kita melaksanakan Musrenbang. di tingkat desa. Sebelum kita melaksanakan Musrenbang. di tingkat Desa, kita mengadakan evaluasi kembali hasil Musrenbang. tingkat dusun sebelum mengadakan Musrenbang. di tingkat desa”* (Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan, lokasi kediaman Kepala Seksi Pemerintahan Selasa, 13 Februari 2018 Pukul 20.20 WITA).

*“Saya selaku Ketua RW (Rukun Warga), pada saat Musrenbang. tingkat Dusun dan Musrenbang. tingkat Desa tetap di undang untuk berdiskusi mengenai program apa saja yang akan kita kerjakan di desa ini”* (Ishaka, Ketua RW 006 Desa Uma Beringin, lokasi kediaman Ketua RW 006 Desa Uma Beringin Sabtu, 20 Februari 2018 Pukul 17.10 WITA).

Adanya Musrenbang pada tingkat Desa dan Dusun ialah bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat terkait konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Musrenbang di tingkat Desa dilakukan untuk mensinkronisasikan hasil kesepakatan dalam Musrenbang di tingkat Dusun serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa (Indrianasari, 2017). Musrenbang ini juga berperan untuk mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Nafidah dan Mawar, 2015).

Perencanaan program dan kegiatannya Haruslah disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan (Irma, 2015). Sehingga dengan adanya Musrenbang. ini akan terbentuknya Pemerintah Desa yang transparan, akuntabel, dan mengedepankan asas partisipatif. Di mana Pemerintah Desa Uma Beringin melalui Musrenbang. ini dapat transparan mengenai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. begitu juga dengan asas akuntabel, adanya Musrenbang. ini mewajibkan Pemerintah Desa Uma Beringin untuk bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukannya kepada publik. Hal tersebut juga diikuti dengan asas partisipatif, di mana dengan adanya Musrenbang. ini yang merupakan wadah tempat menyampaikan aspirasi-aspirasi dan ide-ide dari berbagai elemen masyarakat baik itu ketua RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan lain-lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Setelah Musrenbang. selesai di adakan pemerintah desa mengevaluasi hasil Musrenbang., di mana yang bertindak dalam evaluasi ini ialah Tim Rencana Kerja Pembangunan Desa. Tim ini terdiri atas 11 orang yang berasal dari Aparatur Pemerintah Desa Uma Beringin, Anggota BPD, dan perwakilan elemen lainnya. Pengevaluasian dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan secara prioritas. Sejalan dengan teori *stewardship theory*, di mana teori ini menggambarkan situasi para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan publik perlu diutamakan

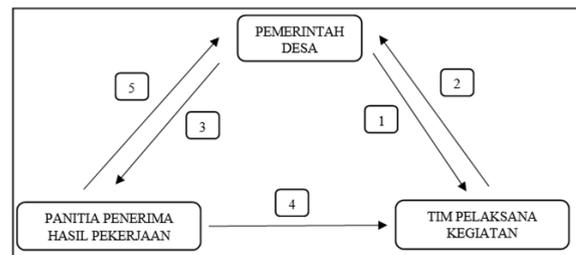
dari pada kepentingan individu.

Tidak sampai itu saja sebuah keharmonisan terjadi pada perencanaan pengelolaan keuangan desa, setelah tim ini selesai bekerja dan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) maka selanjutnya disampaikan RAPBDes untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini tercermin sampai saat ini tidak ada permasalahan yang serius antara kedua pihak. Kedua belah pihak selalu hidup rukun, keharmonisan ini membawa suasana yang tenteram di mata masyarakat.

Setelah RAPBDes ini disepakati oleh Kepala Desa dan BPD maka disampaikanlah RAPBDes ini kepada Bupati. Keharmonisan ini juga terjadi pada saat adanya evaluasi yang diberikan oleh bupati atas RAPBDes, Pemerintah Desa Uma Beringin segera untuk memperbaikinya dan mengevaluasi kembali. Sehingga keharmonisan ini tidak terjalin secara horizontal, namun juga secara vertikal. Setelah RAPBDes telah di setujui oleh Bupati maka Sekretaris Desa segera membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar menjalankan kegiatan dan program dalam bekerja.

Dengan berakhirnya tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang menimbulkan terbentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar dalam bekerja, maka masuklah dalam tahap selanjutnya yakni pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini Pemerintah Desa Uma Beringin menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk digunakan pada kegiatan atau program yang bersifat pada pembangunan fisik maupun non-fisik yang berpedoman pada APBDes tersebut. Dalam tahap pelaksanaan ini Pemerintah Desa Uma Beringin melaksanakan kegiatannya menggunakan sistem swakelola masyarakat dan menggunakan sumber daya yang berasal dari desa tersebut hal ini terlihat dari keharmonisan kehidupan antara masyarakat dan Pemerintah Desa yang mengedepankan kehidupan ber-

gotong royong. Sewaktu-waktu juga Pemerintah Desa Uma Beringin juga menggunakan tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan/program yang tidak dapat mereka kerjakan ataupun tidak terdapat sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. Terbentuknya transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di sini terlihat dari pembentukan serta peran aktif adanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan (PPHP). Di mana TPK di sini merupakan pihak yang akan melaksanakan kegiatan atau program di Desa Uma Beringin baik itu fisik maupun non-fisik, sedangkan PPHP di sini bertugas sebagai pihak yang mengevaluasi hasil kerja dari TPK. Hubungan antar Pemerintah Desa, TPK, dan PPHP, dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.**  
**Hubungan Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

Keterangan:

1. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan menyerahkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan TPK.
2. TPK menyampaikan laporan pelaksana kegiatan beserta bukti transaksi.
3. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
4. PPHP mengevaluasi hasil pekerjaan TPK

5. PPHP menyampaikan hasil evaluasi atas pekerjaan TPK kepada Pemerintah Desa.

Pembentukan TPK dan PPHP di sini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada Pemerintah Desa. Di mana anggota TPK dan PPHP itu sendiri berasal dari masyarakat itu sendiri yang ditunjuk secara musyawarah serta tetap berkoordinasi dengan Kepala Seksi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan bahwa:

*“Jadi untuk pelaksanaan itu ada namanya TPK yakni tim pelaksana kegiatan yang akan bertugas menjalankan tugas itu, mereka menjalankan kegiatan pelaksanaan proyek di desa. TPK ini dibentuk secara musyawarah, jadi tidak main tunjuk-tunjuk. Namun TPK tetap berkoordinasi dengan kepala seksi” (Muh. Akasha Hafiz Sekretaris Desa Uma Beringin, Lokasi Desa Uma Beringin Selasa 13 Februari 2018 Pukul 08.20 WITA.).*

Setelah TPK dan PPHP ditetapkan, maka mulailah pembangunan dilakukan. Dalam hal pembangunan seperti hal pembangunan fisik Pemerintah Desa Uma Beringin selalu membuat dan memasang papan proyek pada lokasi kegiatan yang berisi jumlah dana yang dianggarkan, siapa yang bekerja, dan jenis kegiatan. Diharapkan dengan adanya papan proyek ini terciptanya transparansi kepada masyarakat. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan (Irma, 2015). Hal ini yang sama dipertegas oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

*“Setiap kegiatan pembangunan ada papan proyek namanya yang tentunya sebagai media informasi kepada masyarakat yang bisa diakses langsung” (A. Rahmansyah Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Uma Beringin, Lokasi*

*Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Januari 2018 Pukul 19.45 WITA.).*

Kepala seksi dalam pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir olehnya mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pembuatan RAB ini terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pihak TPK oleh Kepala Seksi. Setelah RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa maka kegiatan dapat dijalankan, karena RAB ini pelaksana kegiatan dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. hal ini selaras dengan teori akuntabilitas bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu adanya akuntabilitas dalam hal ini pertanggungjawaban Kepala Seksi, TPK, Bendahara Desa, dan PPHP, agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sehingga hal ini mewajibkan Sekretaris Desa selalu memverifikasi data yang akan ditanda tangani, dikarenakan Sekretaris Desa memiliki peran sebagai koordinator Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Ketika pekerjaan TPK selesai maka selanjutnya Kepala Desa meminta PPHP untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dari TPK. Hal ini dilakukan agar apa yang diharapkan oleh masyarakat yang tertuang dalam APBDes dapat dilaksanakan semestinya. Ketika PPHP mengeluarkan pendapat tentang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK maka tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa berakhir. Sehingga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus benar-benar terjal, setiap orang berhak untuk meminta atau mendapatkan informasi terkait penggunaan keuangan desa. Sehingga penggunaan keuangan desa dapat diawasi oleh masyarakat agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan desa ialah tahap penatausahaan, di mana dalam tahap ini kita dapat melihat bagaima-

na Bendahara Desa menatausahakan keuangan desa sebagai proses dalam pertanggungjawaban keuangan desa kepada publik. Bendahara Desa Uma Beringin melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa selalu berdasarkan bukti-bukti transaksi antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab Belanja, dan lampiran bukti transaksi. Semua bukti ini di simpan secara baik guna pemeriksaan di kemudian hari. Hal ini dipertegas oleh Bendahara Desa Uma Beringin bahwa:

*“Selama ini untuk melakukan pencairan dana harus ada SPP, RAB, pernyataan tanggung jawab belanja, dan kwitansi dulu yang diajukan oleh Kepala Seksi, baru uangnya dapat dicairkan”* (Khairuddin, Bendahara Desa Uma Beringin, Lokasi Kantor Desa Uma Beringin, Selasa, 13 Februari 2018 WITA).

Bendahara Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, dan buku bank, baik pencatatan secara manual maupun komputerisasi. Penerapan program sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. hal ini didukung dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang memudahkan Bendahara Desa dengan mudah dan cepat dalam bekerja. Hasil pencatatan ini selalu dilaporkan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa setiap awal bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Dengan adanya pertanggungjawaban ini maka terciptalah akuntabilitas antar pihak internal dan berjalannya tugas-tugas pihak internal tersebut sesuai dengan aturan yang ada, baik itu Undang-Undang maupun turunannya.

Hasil pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta didukung oleh bukti-bukti transaksi yang telah dilaksanakan oleh Bendahara

Desa menjadi acuan dalam pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati oleh Kepala Desa. hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Uma Beringin bahwa:

*“Kami selalu membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap enam bulan sekali”* (Suraiman, Kepala Desa Uma Beringin, Lokasi Kantor Desa Uma Beringin Rabu, 14 Februari 2018 Pukul 9.30 WITA.).

Pembuatan laporan ini sudah menggunakan sistem komputerisasi yang mana penggunaannya telah dimulai pada tahun 2017. Sistem komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa (Ismail, et al. 2016). Dalam hal ini laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati terdiri atas dua laporan yakni laporan semester perama dan laporan semester akhir tahun. Laporan pelaksanaan APBDes secara berkala ini merupakan perwujudan akuntabilitas Pemerintah Desa Uma Beringi kepada Pemerintah di atasnya.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Maka diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini mempermudah Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa. Beban APBDes sebagai akibat dari pengeluaran desa memerlukan adanya rancangan berkaitan dengan peraturan desa yang membahas APBD Desa yang di tetapkan dalam peraturan desa. Kepala desa harus membuat laporan kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. Untuk menjamin akuntabilitas

dalam Pengelolaan keuangan desa, harus diatur berbagai regulasi yang jelas (Meutia dan Liliana, 2017).

Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibebankan kepada Kepala Desa, Kepala Desa Uma Beringin telah mempertanggungjawabkan kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Desa Uma Beringin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dan yang terdiri atas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan, dan laporan tentang program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di desa. Laporan pertanggungjawaban ini selalu diperiksa oleh pihak inspektorat. Semua Perangkat Desa Uma Beringin yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat. sehingga pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi demi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam upaya mewujudkan suatu organisasi yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (Darmada, *et al.* 2016).

Pertanggungjawaban yang serupa juga dilakukan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Uma Beringin. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa dengan menyampaikan laporan keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggung jawab kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif (Supriadi, 2015). Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

*“Selama ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa tentunya sesuai kegiatan masing-masing kepala seksi” (A. Rahmansyah Sekretaris Badan Permusy-*

*awaratan Desa Uma Beringin, Lokasi Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Januari 2018 Pukul 19.47 WITA.)*

Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabel anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pengelola dana. Bentuk transparansi dan akuntabel anggaran ini ialah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada publik melalui forum dan membagi laporan pertanggungjawaban tersebut secara tertulis dalam forum tersebut. Tidak berhenti di situ saja Pemerintah Desa Uma Beringin dalam menyampaikan pertanggungjawaban juga menggunakan media seperti papan informasi yang berada di Kantor Desa Uma Beringin, Baliho yang diletakkan di depan Taman Kerato Desa Uma Beringin, dan Melalui website desa.

Jadi dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Uma Beringin telah transparan baik kepada pemerintah Daerah, BPD maupun kepada masyarakat Desa Uma Beringin, baik penyampaiannya secara lisan maupun tulisan. Dalam mendukung pencapaian *goodgovernance* masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip *goodgovernance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. *Goodgovernance* juga sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah atas amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan hal ini *stewardship theory* juga menegaskan bahwa pemilik sumber daya (*principals*) mempercayai pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward*) yang lebih mampu dan siap. Di mana eksistensinya pemerintah daerah maupun pusat menyerahkan otonomi daerah kepada pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah ini juga mewajibkan pemerintah desa untuk akuntabel dalam pengelolaan sumber daya baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi)

kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat (Thomas, 2013).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai pengelolaan keuangan desa pada Desa Uma Beringin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, telah berjalan sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang dan peraturan turunannya yakni transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang selalu mendengar aspirasi masyarakat yang dilakukan pada saat Musrenbang baik pada tingkat dusun maupun desa. Begitu juga pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Uma Beringin selalu bekerja secara swakelola dan menggunakan sumber daya lokal hingga pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Tahap selanjutnya yakni penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, di mana Bendahara Desa selalu mempertanggungjawabkan pekerjaannya setiap awal bulan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Tahap keempat yakni pelaporan Kepala Desa Uma Beringin kepada Bupati Sumbawa tentang pelaksanaan APBDes secara semesteran maupun tahunan. Terakhir tahap pertanggungjawaban, di mana kepala desa selaku yang diberikan amanat sebagai pengguna dana selalu transparan dan akuntabel, hal ini tercermin dengan adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Sumbawa maupun masyarakat Desa Uma Beringin secara tertulis dan media informasi seperti papan pengumuman, baliho, dan website desa. Adapun keterbatasan penelitian ini ialah pada informan yang hanya terbatas pada lingkup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Seksi, Benda-

hara, dan Masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat menambah informan yakni dari Pemerintah Daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis desa-desa lainnya serta tidak hanya menilai dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, namun juga dari asas-asas lain seperti efektivitas dan efisiensi keuangan desa.

## Daftar Rujukan

- Amiruddin, *et al.* (2012). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*; Vol. 2(1), 17-31.
- Anton, FX. 2010. Menuju Teori *Stewardship* Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika* Vol. 1(2), 61-80.
- Darmada, D. K., *et al.* (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Multiparadigma*; Vol. 7(1), 51-60.
- Darmayasa, I N., Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Multiparadigma*; Vol. 6(3), 350-361.
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*; Vol. 16(1), 49-64.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak*; Vol. 1(2), 29-46.
- Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*; Vol. 4(1), 230-240.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal*

- Katalogis*; Vol 3(1), 121-137.
- Ismail, M., *et al.* (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*; Vol. 19(2), 323-340
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri). *Cahaya Aktiva*; Vol. 2(2), 45-57
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2007. Akuntabilitas dan Good Governance. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI. Jakarta.
- Meutia, Inten, Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Multiparadigma*; Vol 8(2), 227-429.
- Nafidah, Lina Nasihatun, Mawar Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*; Vol. 3 (1), 213-239.
- Rahmati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2<sup>nd</sup> University Research Coloquium 2015*; ISSN 2407-9189, 305-313.
- Ritonga, Irwan Taufik, Syamsul. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol. 20(2); 110-126.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 2015. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kajian Hukum dan Keadilan*; Vol. 3(8), 330-346.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tna Tidung. *E-Journal Pemerintahan Integratif*; Vol. 1(1), 51-64.
- [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id) (diakses 5 April 2018)
- [www.sumbawakab.bps.go.id](http://www.sumbawakab.bps.go.id) (diakses 10 April 2018)
- [www.umaberinginsumbawa.desa.kemendes.go.id](http://www.umaberinginsumbawa.desa.kemendes.go.id) (diakses 10 April 2018)